



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN



RENCANA STRATEGIS
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
PROVINSI JAWA TENGAH
2013 - 2018



KATA PENGANTAR

Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-NYA penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 telah dapat terselesaikan dengan baik. Potensi sumberdaya kelautan dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah yang demikian besar, meliputi 33 buah pulau-pulau kecil, garis pantai 741,49 km, luas kawasan pesisir sebesar 122.739,79 Ha, ekosistem mangrove yang mencakup 8,78% dari luas lahan pesisir, Perairan, dan hamparan terumbu karang seluas 987,64 ha memerlukan pengelolaan yang terpadu dan terarah untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan nasional.

Rencana Strategis yang disusun ini merupakan acuan dalam perencanaan dan perumusan program kegiatan di sektor kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Tengah periode tahun 2013-2018. Dengan tersusunnya renstra ini diharapkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah dapat menjadi *prime mover* pembangunan dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

Ucapan terimakasih, tak lupa penyusun sampaikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Renstra ini. Masukan dan saran yang membangun untuk penyempurnaan Renstra ini sangat kami harapkan. Dan semoga Renstra yang telah disusun ini dapat bermanfaat untuk kemajuan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, 2017
Tim Penyusun



DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISI.....ii

DAFTAR TABELiii

DAFTAR GAMBAR.....iv

BAB I PENDAHULUANI-1

1.1.Latar Belakang.....I-1

1.2.Landasan Hukum.....I-3

1.3.Maksud dan TujuanI-5

1.4.Sistematika PenulisanI-5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANANII-1

2.1.Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan PerikananII-1

2.2.Sumberdaya Dinas Kelautan dan Perikanan.....II-10

2.3.Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan dan PerikananII-28

2.4.Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan.....II-33

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSIIII-1

3.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan.....III-1

3.2.Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih di JatengIII-10

3.3.Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan.....III-18

3.4.Telaahan RTRW dan KLHSIII-22

3.5.Penentuan Isu-isu Strategis.....III-30

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKANIV-1

4.1.Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan PerikananIV-1

4.2.Strategi dan Kebijakan Dinas Kelautan dan PerikananIV-12

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIFV-1

BAB VI INDIKATOR KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN JAWA TENGAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD.....VI-1

BAB VII PENUTUPVII-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Aset/Modal Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah Tahun 2016.....	II-10
Tabel 2.2. a.	Rekapitulasi Jumlah Pegawai DKP Jawa Tengah Tahun 2016	II-14
Tabel 2.2. b.	Rekapitulasi Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di DKP Jawa Tengah Tahun 2016.....	II-16
Tabel 2.3.	<i>Review</i> Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	II-26
Tabel 2.4.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	II-32
Tabel 3.1.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	III-2
Tabel 3.2.	Sinergitas dan Keterkaitan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dengan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	III-12
Tabel 3.3.	Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah	III-23
Tabel 3.4.	Deskripsi Kajian Pengaruh dan Mitigasi Dampak Indikasi Program Prioritas Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 2013-2018	III-29
Tabel 3.5.	Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis	III-31
Tabel 3.6.	Nilai Skala Kriteria.....	III-31
Tabel 3.7.	Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis	III-32
Tabel 4.1.	Tujuan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2013-2018	IV-1
Tabel 4.2.	Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2013-2018	IV-3
Tabel 4.3.	Strategi dan Kebijakan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan.....	IV-12
Tabel 5.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	V-3
Tabel 6.1.	Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Jawa Tengah	VI-3



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa TengahII-7

Gambar 2.2. Bagan Organisasi UPT Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa TengahII-8

Gambar 2.3. Bagan Organisasi UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa TengahII-8

Gambar 2.4. Bagan Organisasi UPT Balai Budidaya Ikan Air Tawar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa TengahII-8

Gambar 2.5. Bagan Organisasi UPT Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa TengahII-8

Gambar 2.6. Bagan Organisasi UPT Balai Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa TengahII-8

Gambar 2.7. Bagan Organisasi UPT Pangkalan Pendaratan Ikan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa TengahII-8



BAB I

PENDAHULUAN

- 1.1.Latar Belakang
- 1.2.Landasan Hukum
- 1.3.Maksud dan Tujuan
- 1.4.Sistematika Penulisan

1.1. LATAR BELAKANG

Sumberdaya Kelautan dan Perikanan memiliki potensi yang unggul untuk memberikan kontribusi bagi pemenuhan kesejahteraan manusia. Provinsi Jawa Tengah yang terletak pada 5° 4' LS – 8° 30' LS dan 108° 30' BT - 111° 30' BT, memiliki wilayah seluas 32.284,268 km² atau sekitar 23,97% luas wilayah Pulau Jawa. Potensi geografis sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Jawa Tengah meliputi 8 buah pulau dan 37 buah pulau-pulau kecil, yang tersebar di Laut Jawa sebanyak 35 Pulau dan 10 pulau di Samudera Hindia yaitu Pulau Nusakambangan. Dari 45 buah pulau tersebut, hanya 30 buah yang memiliki nama sedangkan 15 buah pulau belum diberikan nama. Di samping itu, Jawa Tengah memiliki panjang garis pantai 791,76 km yang terdiri dari pantai utara 289,07 km, dan pantai selatan 502,69 km.

Potensi sumberdaya alam lainnya yang dimiliki Provinsi Jawa Tengah adalah hutan mangrove dan terumbu karang. Pada tahun 2016 luas hutan mangrove di Jawa Tengah 19.430,698 Ha dengan kategori baik 13.903,31 Ha, sedang 2.322,03 Ha dan rusak 2.818,89 ha. Jawa Tengah juga memiliki sumberdaya terumbu karang sebesar 9.745 ha (Tahun 2016) yang tersebar di wilayah pantai utara Jawa Tengah dan luas padang lamun sebesar 83,5 ha. Ketiga sumberdaya alam ini tentunya menjadi potensi tersendiri yang harus dikembangkan dan diatasi segala bentuk permasalahannya agar menjadi sumberdaya yang memiliki nilai ekonomi dan dapat bermanfaat bagi masyarakat pesisir pantai khususnya di Jawa Tengah.

Selain potensi tersebut, terdapat pula peluang pengembangan sektor Kelautan dan Perikanan, meliputi; arus globalisasi yang makin meluas, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) yang semakin pesat. Peluang-peluang tersebut akan berpengaruh pada akselerasi pembangunan kelautan dan perikanan di Jawa Tengah, tidak hanya berupa akselerasi produksi bahan pangan protein unggulan, tetapi juga *multiplier effects* berupa akselerasi kontribusi berbagai nilai tambah ekonomi.

Selain potensi dan peluang, pengembangan sektor Kelautan dan Perikanan di Jawa Tengah juga menghadapi berbagai hambatan dan tantangan. Daya saing produksi dan industrialisasi yang masih lemah, kualitas dan kuantitas infrastruktur yang belum optimal, kualitas lingkungan sumberdaya alam yang menurun, kualitas sumberdaya manusia dan penguasaan IPTEK yang masih terbatas, sumberdaya air yang belum terkelola secara optimal, kerja sama antar instansi / lembaga pemerintah dan kemitraan pemerintah dan swasta yang kurang optimal, serta pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang masih lemah, berakibat pada kurang terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan di Jawa Tengah.

Pengelolaan potensi dan pemanfaatan peluang tersebut memerlukan perencanaan pembangunan kelautan dan perikanan yang matang. Perencanaan pengembangan sektor kelautan dan perikanan tersebut tidak dapat dilepaskan dan harus mampu mengantisipasi perkembangan lingkungan strategis, baik nasional maupun internasional sebagai upaya antisipasi terhadap hambatan serta tantangan dalam pengelolaan. Secara teknis, perencanaan pengelolaan yang baik harus mampu mengantisipasi karakter sumberdaya perikanan laut yang pada hakekatnya tidak dapat dibatasi berdasarkan wilayah administrasi dan bersifat terbuka dalam pemanfaatannya. Pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan ke depan akan dikembangkan melalui berbagai industri kelautan dan perikanan yang berorientasi pasar dan berbasis pada kelestarian lingkungan.

Dengan demikian, upaya pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di Jawa Tengah memerlukan suatu model perencanaan yang mengintegrasikan berbagai perencanaan nasional dan regional dalam bentuk Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2013-2018, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana Strategis pengelolaan sektor Kelautan dan Perikanan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah mencakup; pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan, perumusan tujuan dan sasaran pelayanan jangka menengah, perumusan strategi dan kebijakan jangka menengah guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD Provinsi Jawa Tengah yang menjadi tupoksi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Hal lain yang termaktub dalam Rencana Strategis ini adalah perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan serta perumusan indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Jawa Tengah.

Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah perlu dilakukan revisi untuk disesuaikan dengan Perda No 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda No 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 dan menindaklanjuti Perda No 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah serta mengacu pada Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ini adalah

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
10. Undang-Undang No.31 tahun 2009 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan;
11. Undang-Undang No.32 tahun 2014 tentang Kelautan;
12. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Usaha Perikanan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumberdaya Ikan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;
24. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah;
26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perijinan Usaha Perikanan;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
31. Perda No 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Perda No 5 Tahun 2014 tentang RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Permendagri no 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
34. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 01/MEN/2007 tentang Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
35. Peraturan Menteri PAN Nomor 09/2007 tentang Indikator Kinerja Utama;
36. Peraturan Menteri PAN Nomor 20/2008 tentang Indikator Kinerja Utama;
37. Peraturan Menteri PAN Nomor 29/2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Komunikasi Krisis Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
38. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 75 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
39. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 105 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah;
40. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 88 Tahun 2008 tentang Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD-PPRB) Provinsi Jawa Tengah; dan
41. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Percepatan Pencapaian Target Millenium Development Goals Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015;

42. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2015.
43. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60/32 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ini dimaksudkan sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan program dan kegiatan pembangunan kelautan dan perikanan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah pada periode tahun 2013-2018 agar pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan dapat terlaksana secara sistematis, terarah, terpadu dan mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah :

- 1) Memberikan arah pembangunan kelautan dan perikanan Provinsi Jawa Tengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah sebagai penjabaran atas RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018;
- 2) Untuk mewujudkan kondisi yang diinginkan yaitu ikut mendorong tercapainya sasaran pembangunan kelautan dan perikanan yang ditetapkan, sekaligus mengantisipasi dinamika dan perkembangan situasi dan kondisi dalam negeri, lingkungan strategis, dan kecenderungan global yang berubah dengan cepat.
- 3) Memberikan pedoman dalam penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi Jawa Tengah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN,

Memuat tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD,

Memuat tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD, Sumberdaya OPD, Kinerja Pelayanan OPD dan Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD.

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI,

Memuat tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN,

Memuat tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD, serta Strategi dan Kebijakan OPD.

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF,

Memuat tentang Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.

BAB VI INDIKATOR KINERJA OPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD,

Memuat tentang Indikator Kinerja OPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.

BAB VII PENUTUP,

Memuat tentang kesimpulan atas substansi Renstra secara menyeluruh, harapan terhadap hasil yang diinginkan serta kaidah pelaksanaan.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2. Sumberdaya
- 2.3. Kinerja Pelayanan
- 2.4. Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, sesuai Peraturan Gubernur Nomor 75 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- b. Untuk menyelenggarakan tugas pokok yang dimaksud, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :
 - 1. Perumusan kebijakan Bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pengawasan, Penyuluhan dan Usaha Kelautan Perikanan;
 - 2. Pelaksanaan kebijakan Bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pengawasan, Penyuluhan dan Usaha Kelautan Perikanan;
 - 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Bidang Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, Kelautan Pesisir dan Pengawasan, Penyuluhan dan Usaha Kelautan Perikanan;
 - 4. Pelaksanaan dan pembinaan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
 - 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk menunjang pencapaian tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ditopang oleh struktur/susunan organisasi adalah sebagai berikut :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas untuk memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi, sebagaimana tersebut di atas.

B. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokoknya, Sekretariat mempunyai fungsi:

- (1) Penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- (2) Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- (3) Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
- (4) Penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- (5) Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- (6) Penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas; dan
- (7) Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- (8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahkan :

1. Subbagian Program:

Bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang program; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang program; menyiapkan bahan pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas; menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang program; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang program; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

2. Subbagian Keuangan:

Bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang keuangan; menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan; menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Subbagian Umum dan Kepegawaian:

Bertugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian; menyiapkan bahan pengoordinasian kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian; menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas; menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas; menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas; menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas; menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas; menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan melakukan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

C. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan

Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi, pendayagunaan pesisir dan pulau-

pulau kecil, pengelolaan ruang laut dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil mempunyai fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi, pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan ruang laut; dan
3. Penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan.

Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan, membawahkan:

1. Seksi Konservasi, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil:
Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang konservasi, pendayagunaan pesisir dan pulau-pulau kecil.
2. Seksi Pengelolaan Ruang Laut:
Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan ruang laut.
3. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan Perikanan.
Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan sumber daya kelautan perikanan.

D. Bidang Perikanan Tangkap

Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan dan kenelayanan, pengendalian penangkapan ikan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan serta kepelabuhan perikanan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Perikanan Tangkap mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan dan kenelayanan;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penangkapan ikan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan; dan
- 3) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhan perikanan.

Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan:

1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Kenelayanan:
Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan dan kenelayanan.
2. Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan:
Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penangkapan ikan, kapal perikanan dan alat penangkapan ikan.

3. Seksi Kepelabuhan Perikanan:
Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhan perikanan.

E. Bidang Perikanan Budidaya

Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di bidang produksi perikanan budidaya, sarana dan prasarana perikanan budidaya serta kesehatan ikan dan lingkungan budidaya.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Perikanan Budidaya mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi perikanan budidaya;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana perikanan budidaya; dan
- 3) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan budidaya

Bidang Perikanan Budidaya membawahkan:

- 1) Seksi Produksi Perikanan Budidaya:
Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang produksi perikanan budidaya.
- 2) Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya:
Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang sarana dan prasarana perikanan budidaya.
- 3) Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya:
Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan budidaya.

F. Bidang Penyuluhan dan Usaha Kelautan Perikanan

Bidang Penyuluhan dan Usaha Kelautan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan kelautan dan perikanan, pengembangan usaha dan logistik serta bina mutu dan diversifikasi produk.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, Bidang Penyuluhan dan Usaha Kelautan Perikanan mempunyai fungsi :

- 1) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan kelautan dan perikanan;
- 2) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha dan logistik; dan
- 3) penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina mutu dan diversifikasi produk.

Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan membawahkan:

1. Seksi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan:
Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penyuluhan perikanan kelautan.
2. Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk:
Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang bina mutu dan diversifikasi produk.
3. Seksi Pengembangan Usaha dan Logistik:
Bertugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan usaha dan logistik.

G. UPT – Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (BP2MHP)

UPT BP2MHP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

- a. BP2MHP Semarang
- b. BP2MHP Pekalongan

Unit Pelaksana Teknis (UPT) di atas mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, UPT-BP2MHP mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
- 2) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
- 3) evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian dan penerapan mutu hasil perikanan;
- 4) pengelolaan ketatausahaan; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi UPT-BP2MHP sebagai berikut:

- a. Kepala Balai;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengujian Mutu Hasil Perikanan;
- d. Seksi Penerapan Mutu Hasil Perikanan; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

H. UPT-Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)

Unit Pelaksana Teknis (UPT)-PPP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

1. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari Kota Tegal;
2. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Asemdayong Kab. Pemalang;
3. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Wonokerto Kab. Pekalongan;
4. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Klidang Lor Kab. Batang;
5. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tawang Kab. Kendal;
6. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Morodemak Kab. Demak;
7. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Karimunjawa Kab. Jepara;
8. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bajomulyo Kab. Pati;
9. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung Kab. Rembang;
10. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Logending Kab. Kebumen

Unit Pelaksana Teknis tersebut di atas mempunyai tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, UPT-PPP mempunyai fungsi:

- 1) penyusunan rencana teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- 2) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- 3) evaluasi dan pelaporan di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- 4) pengelolaan ketatausahaan; dan
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi UPT-PPP sebagai berikut:

1. Kepala Pelabuhan;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Operasional Pelabuhan dan Kesyahbandaran;
4. Seksi Tata Kelola dan Pelayanan Usaha; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

I. UPT-Balai Budidaya Ikan (BBI)

Unit Pelaksana Teknis BBI Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah terdiri dari:

- a. Balai Budidaya Ikan Air Tawar (BBIAT)
- b. Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut (BBIAPL)

Unit Pelaksana Teknis di atas mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok dimaksud, UPT-BBI mempunyai fungsi :

- 1) penyusunan rencana teknis operasional di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa;
- 2) koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa;
- 3) evaluasi dan pelaporan di bidang produksi dan penerapan teknologi serta pelayanan usaha dan jasa.;
- 4) pengelolaan ketatausahaan;
- 5) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi UPT BBI adalah sebagai berikut:

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Produksi dan Penerapan Teknologi;
4. Seksi Pelayanan Usaha dan Jasa; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

J. UPT Balai Pengawasan dan Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan

Unit Pelaksana Teknis tersebut di atas mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengawasan dan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok yang dimaksud, UPT-BPKSKP mempunyai fungsi:

1. penyusunan rencana teknis operasional di bidang pengawasan dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan;

2. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan;
3. evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan konservasi sumber daya kelautan dan perikanan;
4. pengelolaan ketatausahaan; dan
5. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

Adapun Struktur Organisasi UPT-BPKSKP sebagai berikut:

1. Kepala Balai;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. Seksi Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
4. Seksi Konservasi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
5. Kelompok Jabatan Fungsional

K. UPT - Unit Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan

Unit Pelaksana Teknis Unit Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengembangan sumberdaya manusia kelautan dan perikanan.

Adapun Struktur Organisasi UPT-UPSDMKP sebagai berikut:

1. Kepala Unit;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

L. UPT – Pangkalan Pendaratan Ikan Larangan

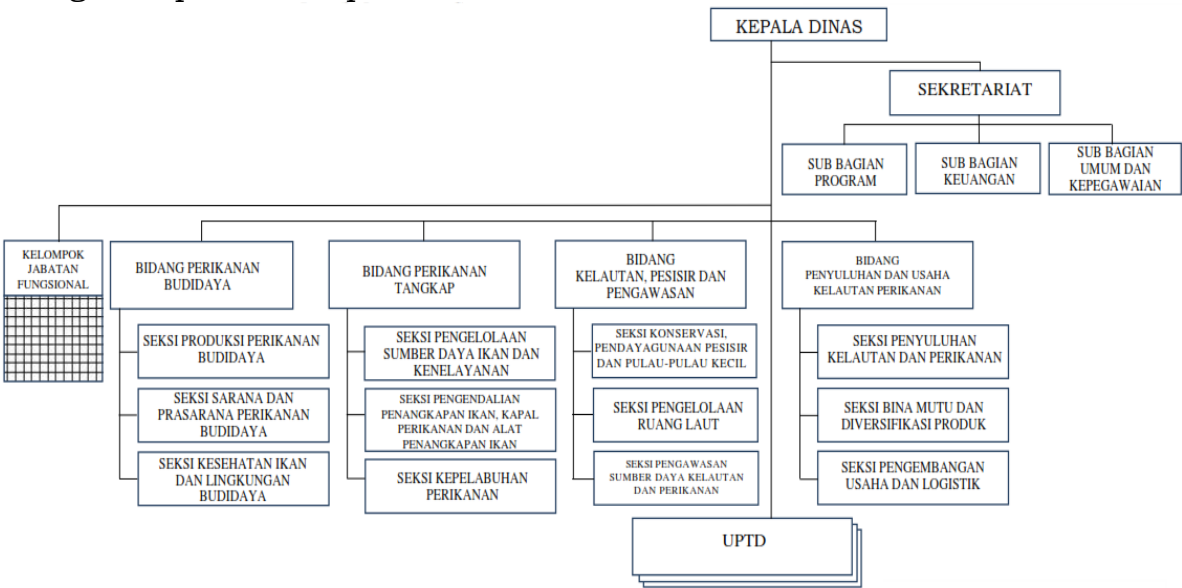
Unit Pelaksana Teknis PPI Larangan mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu Dinas di bidang pengelolaan pendaratan ikan dan kesyahbandaran.

Adapun Struktur Organisasi UPT-PPI sebagai berikut:

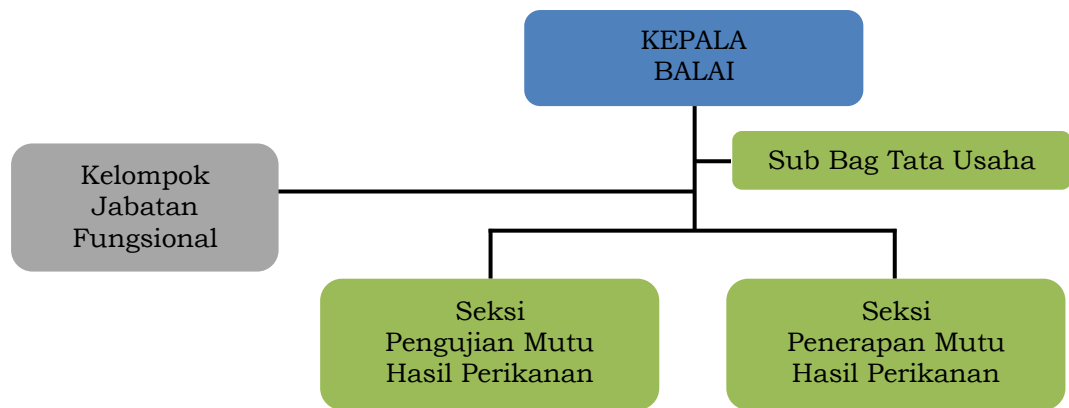
1. Kepala Pangkalan;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

M. Kelompok Jabatan Fungsional

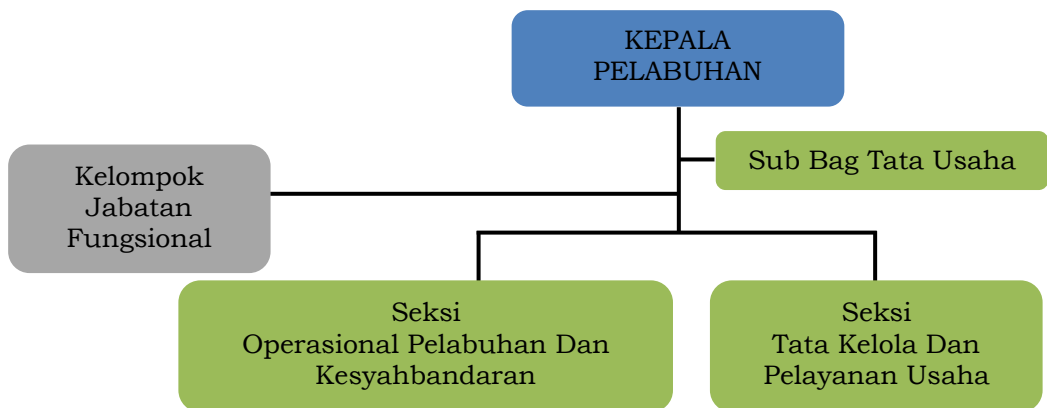
Sekretariat, Bidang-bidang Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Usaha Kelautan dan Perikanan, UPT serta Kelompok Jabatan Fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bagan organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2.1.



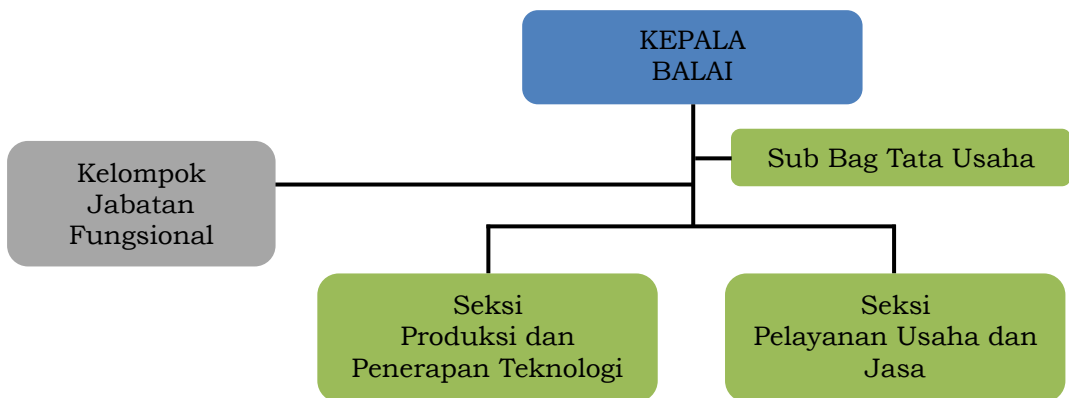
Gambar 2.1. Bagan Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



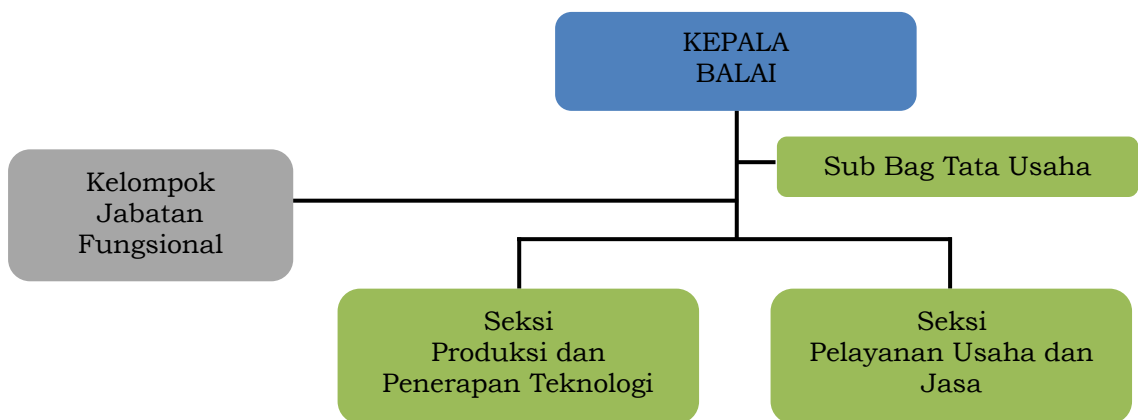
Gambar 2.2. Bagan Organisasi UPT Balai Pengujian Dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



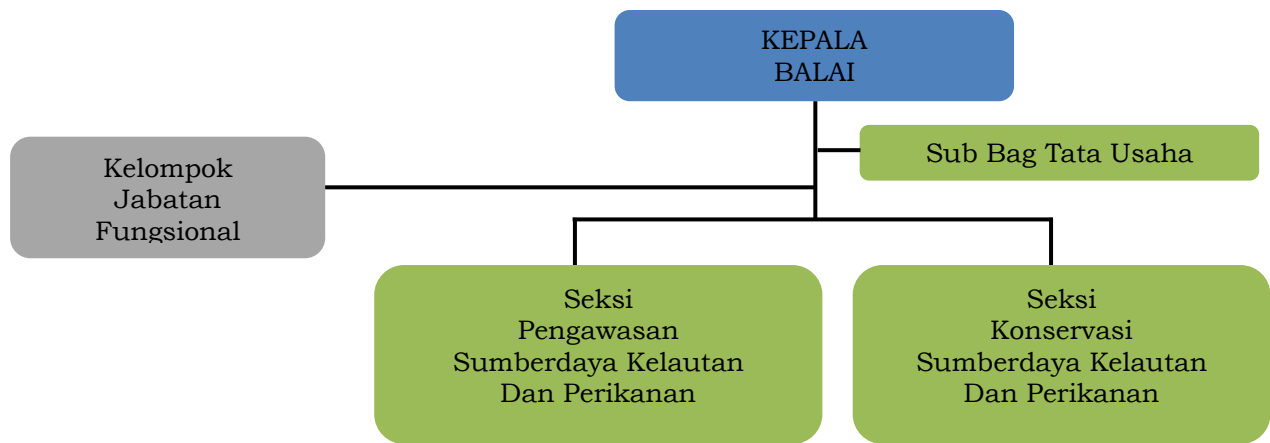
Gambar 2.3. Bagan Organisasi UPT Pelabuhan Perikanan Pantai Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



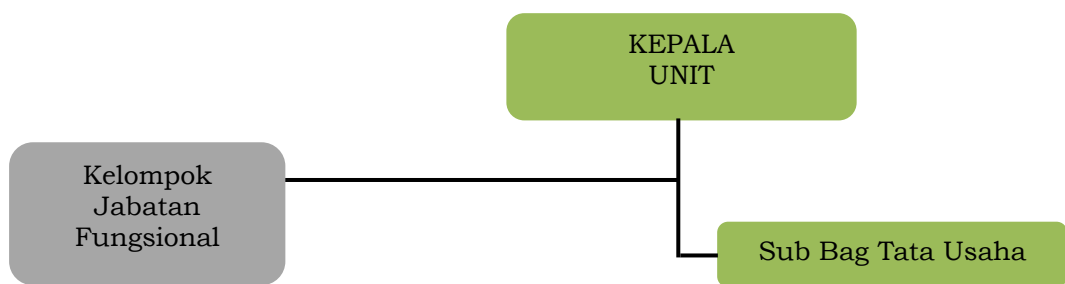
Gambar 2.4. Bagan Organisasi UPT Balai Budidaya Ikan Air Tawar Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



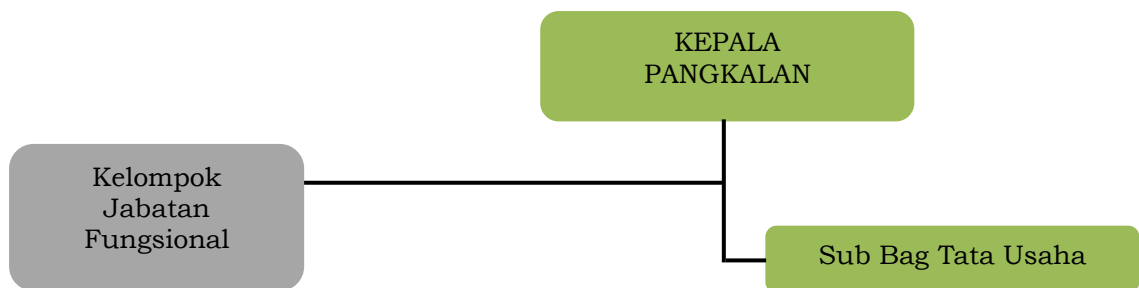
Gambar 2.5. Bagan Organisasi UPT Balai Budidaya Ikan Air Payau Dan Laut Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



Gambar 2.6. Bagan Organisasi UPT Balai Pengawasan Dan Konservasi Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan Kelas A Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



Gambar 2.7. Bagan Organisasi Unit Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan Kelas B Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah



Gambar 2.8. Bagan Organisasi Pangkalan Pendaratan Ikan Kelas B Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

2.2. SUMBERDAYA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.2.1. Jumlah Pegawai

Pada tahun 2016 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah memiliki jumlah pegawai sebanyak 340 orang. Sejumlah pegawai tersebut tersebar di seluruh bidang dan UPT dibawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Sebagaimana disajikan pada Tabel 2.2.a, dapat diketahui bahwa berdasarkan golongannya jumlah pegawai Golongan I berjumlah 18 orang, Golongan II sebanyak 62 orang, Golongan III sebanyak 226 orang dan Golongan IV sebanyak 34 orang. Berdasarkan tingkat pendidikan jumlah pegawai yang lulusan SD adalah 16 orang, SLTP sebanyak 13 orang, SLTA sebanyak 116 orang, Sarjana Muda sebanyak 24 orang, S1/DIV sebanyak 131 orang, dan S2 sebanyak 40 orang. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.2.b.

2.2.2. Aset/Modal

Sarana dan prasarana penunjang kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah secara bertahap terus ditingkatkan dari tahun ke tahun. Hingga Januari 2016, secara umum prasarana kerja berupa gedung perkantoran yang sudah milik sendiri antara lain: balai budidaya, laboratorium, kapal inspeksi perikanan, mobil laboratorium keliling dan mobil Gemarikan. Berikut ini merupakan Tabel 2.1. mengenai aset/modal Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah yang merupakan sarana dan prasarana penunjang kinerja.

Tabel 2.1. Aset/Modal Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah Tahun 2016

No	Gedung	Alamat	Luas Lahan (termasuk bangunan)
1	Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Jl. Imam Bonjol No. 134 Semarang-50132 Telp. (024) 3546469, 3546607 Fax. (024) 3551289	Luas Tanah: 5.793,96 m ² Luas Bangunan: 1.919,95 m ²
2	Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (BP2MHP) Semarang	Jl. Siliwangi no. 636 Semarang. Telp.(024) 7605311, 7623231. Fax. (024) 7605311	Luas Tanah: 2.320 m ² Luas Bangunan: 540 m ²
3	Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (BP2MHP) Pekalongan	Jl. Pantaisari II Panjang Wetan Pekalongan Telp. (0285) 421675	Luas Tanah: 2.000 m ² Luas Bangunan: 417,24 m ²
4	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari Kota Tegal	Jl. Blanak No.10C Kota Tegal Telp. (0283) 358787	Luas Tanah: 162.299 m ² Luas Bangunan: 4.802 m ²
5	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Asemdayong Kab. Pemalang	Desa Asemdayong Kec. Taman Kab. Pemalang Telp. (0248) 3278421	Luas Tanah: 5.780 m ² Luas Bangunan: 204 m ²

No	Gedung	Alamat	Luas Lahan (termasuk bangunan)
6	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Wonokerto Kab. Pekalongan	Desa Tratebang Kec. Wonokerto Kab. Pekalongan	Luas Tanah: 13.935 m ² Luas Bangunan: 3.243 m ²
7	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Klidang Lor Kab. Batang	Jl Yos Sudarso Utara, Boom Batang Telp. (0285) 391283	Luas Tanah: 88.559 m ² Luas Bangunan: 6.704 m ²
8	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tawang Kab. Kendal	Desa Gempol Sewu Kec. Rowosari Kab. Kendal Telp. (0294) 3645668	Luas Tanah: 1.300 m ² Luas Bangunan: 792 m ²
9	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Morodemak Kab. Demak	Dukuh Kongsu Desa Purworejo Kec. Bonang, Kab. Demak, Telp. (0291) 3406224	Luas Tanah: 3.900 m ² Luas Bangunan: 770 m ²
10	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Karimunjawa Kab. Jepara	Tanjung Benteng, Desa/Pulau Karimunjawa, Kec.Karimunjawa Kab. Jepara	Luas Tanah: 10.790 m ² Luas Bangunan: 1.395 m ²
11	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Bajomulyo Kab. Pati	Jl. Panglima Sudirman No.12A Desa Bajomulyo Kec. Juwana Kab. Pati Telp.(0295) 381689	Luas Tanah: - Luas Bangunan: 2.200 m ² (TPI Bajomulyo 1)
12	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tasikagung Kab. Rembang	Jl Dorang No.1 Kec.Rembang Kab.Rembang Telp. (0295) 691094	Luas Tanah: 8.200 m ² Luas Bangunan: 6.099 m ²
13	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Lohgending Kab. Kebumen	Desa Logending Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Luas Tanah: 18.850 m ² Luas Bangunan: 1.743 m ²
14	Sentra Pendaratan Ikan Pasir Kab. Kebumen	Desa Pasir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen	Luas Tanah: 132.681 m ² Luas Bangunan: 1.743 m ²
15	Sentra Pendaratan Ikan Sentolokawat Kab.Cilacap	Jl. Veteran No. 2 Cilacap	Luas Tanah: 14.012 m ² Luas Bangunan: 650 m ²
16	Balai Budidaya Ikan Air Tawar Muntilan Kab. Magelang	Jl. Kerkop No.1 Muntilan Kabupaten Magelang Telp. (0293) 587022	Luas Kolam keseluruhan: ±15.000 m ² ; Luas Bangunan: 1.638 m ²
17	Loka Budidaya Ikan Air Tawar Ngrajek Kab. Magelang	Jl Mayor Kusen (Jl Raya Borobudur) Km 4, Desa Ngrajek, Kec. Mungkid, Kabupaten Magelang Telp. (0293) 788306	Luas Kolam : ±35.000 m ² , Luas Bangunan: ±1.085 m ²

No	Gedung	Alamat	Luas Lahan (termasuk bangunan)
18	Loka Budidaya Ikan Air Tawar Janti Kab. Klaten	Desa Janti Kec. Polanharjo, Kab. Klaten. Telp./Fax. (0272) 552 947	Luas kolam ±15.000 m ² , Luas bangunan dan ruang terbuka: 2.500 m ² , saluran: 21 m ²
19	Loka Budidaya Ikan Air Tawar Ambarawa Kab. Semarang	Ds.Pojok Sari, Kec. Ambarawa, Kabupaten Semarang	Luas tanah: 9.510 m ² , Luas bangunan: 965 m ²
20	Loka Perbenihan Budidaya Ikan Air Tawar Tambaksogra di Kab. Banyumas	Desa Tambaksogra, Kec. Banyumas, Kab. Banyumas	Luas Tanah: 20.000 m ² Luas Bangunan: 1.500 m ² Luas kolam: ±10.000 m ²
21	Loka Perbenihan Budidaya Ikan Air Tawar Singosari di Kab. Banyumas	Desa Singosari, Kec. Karangwelas, Kab. Banyumas	Luas Tanah: 20.000 m ² Luas Bangunan: 2.000 m ² Luas kolam: ±10.000 m ²
22	Loka Perbenihan Budidaya Ikan Air Tawar Randudongkal di Kab. Pemalang	Desa Banjaranyar, Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang	Luas Tanah: 21.110 m ² Luas Bangunan: 150 m ² Luas kolam: ±10.000 m ²
23	Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut Tugu Semarang	Desa Karanganyar Kec.Tugu Kota Semarang	Luas tanah: 43.036 m ² Luas bangunan: 462 m ² Luas Tambak: ±35.000 m ²
24	Loka Budidaya Ikan Air Payau Maribaya Kab. Tegal	Jl Beringin Raya Km.10 Maribaya Kec. Kramat Kab. Tegal Telp. (0283) 3335709	Luas tanah: 91.940 m ² Luas bangunan: 540 m ² Luas Tambak: ±35.000 m ²
25	Loka Perbenihan Ikan Air Payau Sluke Kab. Rembang	Ds.Jatisari Kec.Sluke Kab.Rembang	Luas tanah: 5.751 m ² Luas bangunan: 384 m ² Luas Tambak/ Hatchery: 2.800 m ²
26	Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Laut Karimunjawa, Kab.Jepara	Pulau Karimunjawa Kec.Karimunjawa Kab.Jepara	Luas tanah : 11.236 m ² Luas bangunan: 240 m ²

No	Gedung	Alamat	Luas Lahan (termasuk bangunan)
27	Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pantai Utara Barat dan Pansela	Jl. Siliwangi no. 636 Semarang. Telp.(024) 7605311, 7623231. Fax. (024) 7605311 (Kantor Sementara)	-
28	Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pantai Utara Timur	Jl. Mpu Tantular No. 2 Semarang	Luas tanah: 692 m ² Luas bangunan: 350 m ²
29	Pangkalan Pendaratan Ikan Larangan	Desa Mujungagung, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal	Luas tanah: 1.790 m ² Luas bangunan: 200 m ²
30	Unit Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan	Jl. P. Diponegoro No.1 Magelang	Luas tanah: 54.000 m ² Luas bangunan: 200 m ²

Sarana kerja penunjang lain yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah berupa sarana informasi portal berupa *website* dengan alamat akses <http://dkp.jatengprov.go.id> dan Email: dkp@jatengprov.go.id Sarana informasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan layanan informasi pembangunan kelautan dan perikanan di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 2.2.a. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016

NO.	UNIT ORGANISASI	JUMLAH (4+9+14+ 19+25)	P E G A W A I																				
			JUM LAH (5 S/D 8)	I				JUM LAH (10 S/D 13)	II				JUM- LAH 15 S/D 18	III				JUM LAH 20 S/D 24	IV				
				a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Dinas Induk																						
	Kepala Dinas	1																1			1		
	Sekretaris	1																1		1			
	Sub Bag Program	9											8		2	6		1	1				
	Sub Bag Keuangan	11	1				1	2					7		4	1	3	1	1				
	Sub Bag Umum Kepegawaian	17	3			3		4	1		3		9		5	3	1	1	1				
	Bidang Kelautan,Pesisir dan Pengawasan	13						1			1		9		4	3	2	3	2	1			
	Bidang Perikanan Tangkap	18						2		1	1		14	1	6	5	2	2	1	1			
	Bidang Perikanan Budidaya	16						1			1		12	1	2	7	2	3	2	1			
	Bidang Penyuluhan dan Usaha Kelautan Perikanan	10						1			1		7		3	1	3	2	1	1			
	Jumlah	96	4			3	1	11	1	1	7		77	2	26	26	13	15	9	5	1		
2	BBIAT Muntilan (Loka PBIAT Ngrajek, Loka PBIAT Janti Klaten, Loka PBIAT Ambarawa, Loka PBIAT Singosari, Loka PBIAT Tambaksogra, Loka PBIAT Randudongkal	51	5			4	1	15	3		12		30	4	14	5	7	1		1			
3	BPBIAP Karanganyar (Loka PBIAP Maribaya, Loka PBIAP Sluke Rembang, Loka PBIAL Karimunjawa	14						2	1	1			11		4	4	3	1		1			
	Jumlah	65	5	0	0	4	1	18	4	1	12		37	4	18	9	10	2		2	0	0	0

NO.	UNIT ORGANISASI	JUMLAH (4+9+14+ 19+25)	P E G A W A I																				
			JUM LAH (5 S/D 8)	I				JUM LAH (10 S/D 13)	II				JUM- LAH 15 S/D 18	III				JUM LAH 20 S/D 24	IV				
				a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
4	BP2MHP Semarang	17						3		1	1	1	12		5	2	5	2	1	1			
5	BP2MHP Pekalongan	14	1				1	2	1		1		11	2	4	2	3	1		1			
	Jumlah	31	1	0	0	0	1	5	1	1	2	1	23	2	9	4	8	3	1	2			
6	PPP Tegalsari Kota Tegal	22	4		3	1		6			5	1	11		3	6	2	1		1			
7	PPP Logending Kab. Kebumen	10	1			1		2			2		6		3		3	1		1			
8	PPP Asem Doyong Kab Pemalang	11	0					2	1		1		9		4	1	3	1	1				
9	PPP Wonokerto Kab Pekalongan	8						3		1	2		5		2	1	2	1		1			
10	PPP Klidang Lor Kab Batang	12						2	1	1			7		4	1	2	2	1	1			
11	PPP Tawang Kab. Kendal	10						1	1				7		5		2	2	2	2			
12	PPP Morodemak Kab. Demak	7						1			1		5		2	1	2	1		1			
13	PPP Karimunjawa Kab. Jepara	14	1		1			1				1	11	4	4	1	2	1	1				
14	PPP Bojo Mulyo Kab. Pati	10						1		1			8		2	2	3	1		1			
15	PPP Tasik Agung Kab. Rembang	9						1			1		7	1	2	2	2	1	1				
	Jumlah	113	6	0	4	2	0	20	3	3	12	2	76	5	31	15	23	12	6	6			
16	BPKSDKP Pantura Barat dan Pansel	11	1				1	4			4		4	1		1	2	2	1	1			
	BPKSDKP Pantura Timur	9						3			3		6	1	1	1	3						
17	UPSDMKP	8											8		5	1	2						
18	PPI Larangan	7	1		1			3		3			3	1	1	1							
	J U M L A H	340																					

Sumber : DKP Jateng, 2016

Tabel 2.2.b. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah Tahun 2016

NO.	UNIT ORGANISASI	TINGKAT PENDIDIKAN							JENIS KELAMIN		KET.
		SD	SLTP	SLTA	Sarjana Muda	S1/DIV	S2	S3	L	P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Dinas Induk	4	3	18	6	35	26	0	51	41	
2	BBIAT Muntilan	3	5	22	1	18	2	0	40	11	
3	BBIAPL Karanganyar Tugu	1	0	4	1	8	0	0	11	3	
4	BP2MHP Semarang	0	1	6	2	4	5	0	7	11	
5	BP2MHP Pekalongan	1	1	4	3	6	0	0	9	6	
6	PPP Tegalsari Kota Tegal	4	0	9	2	9	0	0	13	11	
7	PPP Logending Kab Kebumen	1	0	5	1	3	0	0	10	0	
8	PPP Asem Doyong Kab Pemalang	0	1	5	1	5	0	0	10	2	
9	PPP Wonokerto Kab Pekalongan	0	0	5	0	4	0	0	6	3	
10	PPP Klidang Lor Kab Batang	0	0	7	0	2	2	0	11	0	
11	PPP Tawang Kab Kendal	0	0	3	1	4	1	0	7	2	
12	PPP Morodemak Kab Demak	0	0	3	0	3	1	0	6	1	
13	PPP Karimunjawa Kab Jepara	1	1	8	0	4	0	0	12	2	
14	PPP BojoMulyo Kab Pati	0	0	2	2	5	0	0	7	2	
15	PPP Tasik Agung Kab Rembang	0	0	2	1	5	0	0	8	0	
16	PPI Larangan Kab Tegal	1	0	4	0	1	1	0	6	1	
17	BPKSDKP Pantura Barat dan Pansel	0	1	4	2	3	1	0	5	6	
18	BPKSDKP Pantura Timur	0	0	4	1	5	0	0	6	4	
19	UPSDMKP	0	0	1	0	7	1	0	5	4	
	J U M L A H	16	13	116	24	131	40	0	230	110	

Sumber : DKP Jateng, 2016

2.2.3. PROFIL UPT DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Berikut ini adalah gambaran profil Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT) yang berada dibawah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

1. BALAI PENGUJIAN DAN PENERAPAN MUTU HASIL PERIKANAN KELAS A

UPT BP2MHP Kelas A merupakan perubahan numenklatur berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 105 Tahun 2016 yang sebelumnya adalah LPPMHP milik Dinas Kelautan Dan Perikanan Jawa Tengah. BP2MHP terdapat di 2 (dua) lokasi wilayah kerja, yaitu: Semarang dan Pekalongan dan telah terakreditasi. LPPMHP berdiri sebagai unit pelaksana teknis daerah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah No.Hukum.G.102/1973 pada tanggal 19 Mei 1973 dengan nama awal yaitu Lembaga Teknologi Perikanan. Kemudian pada tanggal 15 Juni 1977 dibentuk Unit Laboratorium Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) yang terletak di Semarang, Pekalongan dan Cilacap. Kemudian pada tahun 2008, diterbitkan peraturan baru yang merubah nama unit laboratorium tersebut menjadi Laboratorium Pengujian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP). Peraturan tersebut adalah Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 38 Tahun 2008 tanggal 20 Juni 2008 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Jenis layanan di BP2MHP, antara lain;

1. Sertifikasi mutu dan keamanan hasil perikanan untuk tujuan ekspor.
2. Pengujian mutu dan keamanan hasil perikanan secara laboratoris.
3. Pengawasan mutu dan keamanan hasil perikanan, khususnya terhadap Unit Pengolah Ikan yang melakukan ekspor.

a) BP2MHP Semarang

Jenis Kemampuan Pengujian yang ada di BP2MHP Semarang, antara lain;

(1) Mikrobiologi:

ALT (Angka Lempeng Total), *Escherichi coli*, *Salmonella*, *Vibrio cholerae*, *Staphylococcus aureus*.

(2) Kimia dan Fisika:

Kadar Air, Kadar Abu, Kadar Garam, Kadar TVB dan TMA, *Chloramphenicol*, Formalin, Logam Berat (Hg,Pb,Cd), dan *Tetracycline*.

(3) Organoleptik:

Uji Kesegaran dan Uji *Filth*.

Wilayah kerja BP2MHP Semarang, meliputi;

- | | | | | |
|------------------|------------|----------|------------|---------------|
| - Kota Semarang | - Magelang | - Jepara | - Rembang | - Sragen |
| - Kota Salatiga | - Semarang | - Kudus | - Grobogan | - Karanganyar |
| - Kota Surakarta | - Kendal | - Pati | - Boyolali | - Sukoharjo |
| - Kota Magelang | - Demak | - Blora | - Klaten | - Wonogiri |

b) BP2MHP Pekalongan

Jenis kemampuan pengujian di BP2MHP Pekalongan, antara lain;

(1) Mikrobiologi :

Angka Lempeng Total, *Coliform*, *Escherichia coli*, *Salmonella*, *Vibrio Cholerae*, *Staphylococcus aureus*.

(2) Kimia dan Fisika :

Suhu Pusat, Bobot Tuntas.

(3) Organoleptik :

Uji Kesegaran dan Uji *Filth*.

Wilayah kerja BP2MHP Pekalongan, meliputi:

- | | | |
|-------------------|-------------|----------------|
| - Kota Pekalongan | - Pemalang | - Banyumas |
| - Kota Tegal | - Brebes | - Banjarnegara |
| - Pekalongan | - Cilacap | - Purbalingga |
| - Tegal | - Kebumen | - Wonosobo |
| - Batang | - Purworejo | - Temanggung |

2. PELABUHAN PERIKANAN PANTAI (PPP) KELAS A

Pelabuhan Perikanan mempunyai fungsi mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran. Dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungannya, fungsi Perikanan Pantai Kelas A melaksanakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis operasional di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang operasional pelabuhan dan kesyahbandaran serta tata kelola dan pelayanan usaha;
- d. pengelolaan ketatausahaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya, seperti:
 - (1) Pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas perikanan;
 - (2) Pelayanan bongkar muat;
 - (3) Pelaksanaan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
 - (4) Pemasaran dan distribusi ikan;
 - (5) Pelaksanaan pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan;
 - (6) Pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat perikanan;
 - (7) Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
 - (8) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumberdaya ikan;
 - (9) Pelaksanaan kesyahbandaran;
 - (10) Pelaksanaan fungsi karantina ikan;
 - (11) Publikasi hasil riset kelautan dan perikanan;
 - (12) Pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari;
 - (13) Pengendalian lingkungan (kebersihan, keamanan, dan ketertiban (K3)), kebakaran, dan pencemaran.

UPT PPP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berjumlah 10 (Sepuluh) unit yang tersebar di pantai utara. Berikut ini adalah gambaran umum PPP yang ada di Provinsi Jawa Tengah :

1) PPP Tegalsari

PPP Tegalsari secara geografis terletak pada koordinat 06°51'-06°52' LS dan 109°09'-109°10' BT di Desa Tegalsari, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Tegalsari antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Breakwater, Revetment, training Jetty, Dermaga bongkar, Dermaga tambat labuh, Alur masuk pelabuhan, Kolam labuh, Kolam perbekalan, Jalan Penghubung).
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Fasilitas Pendaratan Ikan (Bangunan TPI dan Tempat Pengepakan), Fasilitas Navigasi (Pelayaran dan Komunikasi, Rambu Suar, Suar Penuntun, Telepon), Fasilitas Suplai Air dan BBM

(Reservoir, Sumur Artesis, Jaringan Air Bersih, SPBN (Dikelola KUD “Karya Mina”), Catu Daya Listrik, Gardu Induk Listrik dan Travo, Jalan dan Saluran, Gorong-gorong), Pabrik Es (Kap.8 ton/hari), Chilling Room/Gold Storage (Kap.30 ton), Drainase).

- Fasilitas Penunjang (meliputi: Kantor Administrasi (Kantor PPP Tegalsari, Kantor Syahbandar, dan Poskamladu), Bangunan Serbaguna dan lainnya (Balai Pelatihan Nelayan (SUPM), Mess Operator, Toilet Umum, Kios Pedagang (*Cofish*), Kios Pedagang Swadana, Kios Pedagang (APBD Jateng), Tempat Pengepakan Ikan (*Cofish*), Tempat Pengepakan Ikan (APBD Jateng), Tempat Pengepakan Ikan (Swadana), Gerbang Pelabuhan, Gedung Pabrik Tepung Ikan, Tempat Parkir, Ruko Swadana, Unit Pengolah Limbah (UPL), Tempat Fillet Ikan (Swadana), Pos Portal, Tempat Perbaikan Jaring, Kontainer Sampah, Excavator, Ponton / Tongkang)

2) PPP Asemdayong

PPP Asemdayong secara geografis terletak pada koordinat 8°53'30"-7°20'11" LS dan 109°17'30"-109°40'30" BT di Desa Asemdayong Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Asemdayong antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Alur, Dermaga bongkar muat, Saluran Drainase dan Turap/Revetment).
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Tanah, Gedung/Kantor TPI, Lantai TPI, Menara Air, SPDN, CBIP, Kios, Instalasi Listrik, Tempat Pengolahan, Tempat Penjemuran ikan).
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Kantor Pelabuhan Perikanan Pantai luas, Kantor Satker Pelabuhan luas, Kantor Pos Pengawasan Lanal TNI luas, Pondok Boro Nelayan, Mushola, MCK (kondisi sedang), Kantor Kesehatan Pelabuhan, Warung makan dan kios, Pertokoan, dan Tempat parkir motor).

3) PPP Wonokerto

PPP Wonokerto secara geografis terletak pada koordinat 6°54'16' LS dan 109°42' BT di Desa Tratebang Kecamatan Wonokerto Kabupaten Pekalongan. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Wonokerto antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Alur, Dermaga bongkar muat, Talud/Turap, Lahan PPI, Jalan Lingkungan, Menara Suar, Kolam Pelabuhan dan Breakwater).
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Tanah, Gedung/Kantor TPI, Lantai TPI, SPDN, Instalasi Listrik, Instalasi Air Bersih, dan Menara Suar).
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Areal Parkir, Tempat Penjemuran Ikan, Tempat Penjemuran Alat Tangkap, Kamar Mandi/WC, Kios/Los Pertokoan, Pondok Boro, dan Mushola).

4) PPP Klidang Lor

PPP Klidang Lor secara geografis terletak pada koordinat 6°53'11"LS-109°44'55"BT di Kelurahan Karangasem Utara Kecamatan Batang, Kabupaten Batang. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Klidang Lor antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: *Break water*, Alur Perairan, Dermaga (Tiang tambat labuh, penerangan, penangkis gelombang/talud)).
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Kantor PPP, Kantor Syahbandar, TPI, Lantai Lelang, Instalasi listrik, Sound System, SPDN, Instalasi air bersih, Menara suar).
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Areal parkir, Kamar mandi/WC, Areal pengepakan ikan, Kereta dorong, Kolam labuh, Koperasi, Klinik Kesehatan, Pompa air).

5) PPP Tawang

PPP Tawang secara geografis terletak pada koordinat 6°55'0,3"LS dan 110°02'49,7"BT di Desa Gempolsari, Kecamatan Rowosari, Kabupaten Kendal. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Tawang antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Break water, Alur Perairan, Dermaga (Tiang tambat labuh, penerangan, penangkis gelombang/talud)).
- Fasilitas Fungsional (meliputi : TPI/lantai lelang, Instalasi listrik, Air bersih (artesis dan PDAM), Kantor, SPDN, Pabrik es curah mini, (*Containerized Block Ice Plant*, Genset, Sound system, Menara suar, Rambu pengaman di muara))
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Areal parker, Kantor Kamladu, Kios ikan, Kamar mandi/WC, Mushola, Pos Jaga).

6) PPP Morodemak

PPP Morodemak secara geografis terletak pada koordinat 110°32'40"BT dan 6°49'30"LS di Dukuh Kongsu Desa Purworejo Kecamatan Bonang Kabupaten Demak.

Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Morodemak antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Alur Pelayaran, Dermaga Bongkar, Dermaga fender, Dermaga perbekalan, Breakwater barat, Breakwater timur, Talud sheet pile, Talud beton, Kapal perikanan, Groin, dan Jalan Kompleks)
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Gedung TPI, Kantor TPI, Air bersih, Pos satpolair, Kantor ppp, Kios, Tempat perbaikan jaring)
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Areal parkir, Mushola, MCK, Gapura pintu masuk, Jalan masuk (tanah), Jalan kawasan (tanah), Pagar keliling, Mushola, MCK, Gapura pintu masuk, Jalan masuk (tanah), Jalan kawasan (tanah), Pagar keliling).

7) PPP Karimunjawa

PPP Karimunjawa secara geografis terletak pada koordinat 5°51'50"LS dan 110°26'08" BT di Tanjung Benteng Desa/Pulau Karimunjawa, Kecamatan Karimunjawa, Kabupaten Jepara. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Karimunjawa antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Tanah, Dermaga/Turap, Kolam Pelabuhan, Break Water, Jalan komplek/ paving)
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Gedung Kantor, TPI, Gedung Pabrik Es, Bengkel, Resevoir Air Tawar, Genset, Radio SSB)
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Administrator, Mess Operator 3 kopel)/ Renovasi, Mess Operator).

8) PPP Bajomulyo

PPP Bajomulyo secara geografis terletak pada koordinat 111°8'30"BT dan 6°42'30" di Desa Bajomulyo, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Bajomulyo merupakan aset milik pemerintah daerah Kabupaten Pati antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Tanah, Dermaga/Turap, Kolam Pelabuhan, Break Water, Jalan komplek/ paving)
- Fasilitas Fungsional (meliputi: Gedung lelang, Reservoir, Tower, Listrik PLN, Genset, SPBB, SPDN, Sound Sistem).
- Fasilitas Penunjang, meliputi:
 - ✓ Unit I (Gedung Pertemuan, MCK umum, Gudang basket, Pos Jaga, Eks kantor UPBI, Cold storage, Musholla, Ruang genset, Area parkir, Pagar keliling)
 - ✓ Unit II (Gedung lelang, Pasar bangsal, Pengepakan ikan, Listrik PLN, Gedung Basket, MCK, Areal parkir depan tempat lelang, Lampu penerangan dermaga, Gedung pos jaga dan doorlup, Drainase induk, Kios perdagangan umum, Kantor Airud, SSB Pos Jaga, Gapura dan

Pagar, Pagar Bangunan Lelang, Kantor pengawasan).

9) PPP Tasik Agung

PPP Tasik Agung secara geografis terletak pada 111°000'-111°030' BT dan 6°30'-7°00' LS di Desa Tasik Agung Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Tasik Agung antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Tanah, Dermaga bongkar, Dermaga muat, Kolam Pelabuhan, Break Water, Jalan komplek/ paving, Drainase, Talud/Turap)
- Fasilitas Fungsional (meliputi: TPI (lantai lelang), Tempat Pengepakan, Kantor ADM, Bengkel, SPDN 30.000 liter, Tangki air, dan instalasi, Pabrik Es (CBIP), Timbangan, Basket, Kereta Pengangkut Ikan, Tempat perbaikan Jaring, Tempat Jemuran ikan, Listrik, Kantor Syahbandar, Kantor SSB, Telepon, Sound System, Waserda, Pagar keliling)
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Tempat Parkir, MCK (6x3m), Kantor Perhubungan, Gedung Pelayanan Terpadu, Kantor Polairud, Kantor HNSI, Kantor KUD Mina, Mushola).

10) PPP Logending

PPP Logending secara geografis terletak pada 111°000'-111°030' BT dan 6°30'-7°00' LS di Desa Pasir Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Fasilitas-fasilitas yang dimiliki PPP Logending antara lain;

- Fasilitas Pokok (meliputi: Tanah, Dermaga bongkar, Dermaga muat, Kolam Pelabuhan, Break Water, Jalan komplek/paving, Drainase, Talud/Turap)
- Fasilitas Fungsional (meliputi: TPI (lantai lelang), Tempat Pengepakan, Kantor ADM, Bengkel, SPDN, Tangki air, dan instalasi, Pabrik Es (CBIP), Timbangan, Basket, Kereta Pengangkut Ikan, Tempat perbaikan Jaring, Tempat Jemuran ikan, Listrik, Kantor Syahbandar, Kantor SSB, Telepon, Sound System, Waserda, Pagar keliling)
- Fasilitas Penunjang (meliputi: Tempat Parkir, MCK, Kantor Perhubungan, Gedung Pelayanan Terpadu, Kantor Polairud, Kantor HNSI, Kantor KUD Mina, Mushola).

PPP Logending mempunyai 2 (dua) sentra pendaratan ikan yaitu :

- a. Sentra Pendaratan Ikan Pasir Kabupaten Kebumen
Sentra Pendaratan Ikan Pasir terletak di Desa Pasir, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen. Adapun fasilitas yang di SPI Pasir antara lain: Rumah mesin, Tempat Parkir, Balai Pertemuan, dan Kantor SAR
- b. Sentra Pendaratan Ikan Sentolokawat Kabupaten Cilacap
Sentra Pendaratan Ikan Sentolokawat terletak di Jl. Veteran No. 2 Kabupaten Cilacap. SPI Sentolokawat memiliki fasilitas berupa Tempat Pendaratan Ikan, SPDN (Solar Package Dealer Nelayan), dan Tempat Penjemuran Ikan

3. Balai Budidaya Ikan Air Tawar

Balai Budidaya Ikan Air Tawar Muntilan terletak di Dukuh Semampir, Desa Muntilan, Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah. Terletak di ketinggian 350 m di atas permukaan air laut yang mempunyai topografi landai sampai datar dengan suhu udara berkisar antara 25°C – 33°C. Mempunyai luas lahan 2,93 ha dengan sumber air berasal dari Saluran irigasi Sungai Lamat. Debit air musim hujan 20-30 liter per detik, sedangkan pada musim kemarau 5-10 liter per detik.

Balai Budidaya Ikan Air Tawar membawahi 6 (enam) Loka Perbenihan Budidaya Ikan Air Tawar di Jawa Tengah, yaitu Loka PBIAT Ngrajek Kabupaten Magelang, Loka PBIAT Janti Kabupaten Klaten, Loka PBIAT Ambarawa Kabupaten Semarang, Loka PBIAT Tambaksogra dan Singosari di Kabupaten

Banyumas, dan Loka PBIAT Randudongkal Kabupaten Pemalang. Berikut gambaran 6 Loka PBIAT, meliputi:

a. Loka PBIAT Janti

Loka PBIAT Janti terletak di Desa Janti, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten. Dibangun pada tahun 1979 di atas lahan seluas 2,89 hektar. Luas kolam 1,7 hektar (60%), bangunan dan ruang terbuka 0,98 hektar (30%) dan saluran 0,21 hektar (10%), dengan ketinggian tempat 203 meter di atas permukaan air laut. Sumber air berasal dari Umbul Nilo dan Umbul Wunut melalui saluran irigasi teknis yang mengalir sepanjang tahun dengan debit berkisar 25-40 l/dt dan kualitas yang cukup baik sehingga ideal bagi kegiatan perbenihan ikan.

Satuan Kerja Perbenihan dan Budidaya Ikan Janti memiliki tugas sebagai Pusat Pengembangan Induk Ikan Nila Regional (PPIINR) yang ditetapkan berdasarkan SK. Dirjen Perikanan Budidaya NO. 6378/DPB -1/-PB. 110. D1/12/03 sebagai perpanjangan tangan terhadap Pusat Pengembangan Ikan Nila Nasional (PPIIN) yang berpusat di Sukabumi. Dengan tugas utama memperbaiki mutu genetik untuk induk dan benih ikan nila.

b. Loka PBIAT Ngrajek

Berawal dari nama Balai Benih Ikan Sentral (BBIS) Ngrajek, yang berlokasi di Desa Ngrajek, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, dengan ketinggian 340 meter di atas permukaan air laut. Dibangun pada tahun 1962 dan arealnya diperluas pada tahun 1964 menjadi 5,3 hektar. Sumber air berasal dari 2 mata air yaitu Mudal dan Combrang, dengan debit 54 l/dt pada daerah pangkal saluran dan 5 liter/dt pada daerah ujung saluran. Orientasi awal yang tetap menjadi andalan Loka PBIAT Ngrajek hingga saat ini adalah penyediaan benih dan calon induk ikan air tawar unggul seperti: Tawes, Karper Merah Cangkringan dan Majalaya, Lele (Dumbo, Sangkuriang, dan Phytan), Nila (Hitam dan Merah), Grasscarp, Patin, dan Nilem.

c. Loka PBIAT Ambarawa

Loka PBIAT Ambarawa terletak di Desa Pojok Sari, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Ambarawa. Dibangun di atas lahan seluas 1,6 hektar dengan luas tanah 9.510 m², luas bangunan 965 m² dan luas kolam 6.000 m². Sumber air berasal dari saluran irigasi dengan kualitas air kurang baik dan kurang mencukupi. Selain penyediaan benih ikan Nila dan Karper di sekitar Semarang, maka mulai tahun 2010 Loka PBIAT Ambarawa juga melakukan pengembangan ikan local spesifik yang diharapkan mampu meningkatkan pendapatan. Disamping itu juga mengembangkan berbagai jenis ikan hias seperti Koi, Komet, Plati, Black Moli dan Koki. Melalui APBN tahun 2010, Loka PBIAT Ambarawa menerima bantuan beberapa induk ikan Grasscarp, Karper dan Gabus.

d. Loka PBIAT Tambaksogra

Loka PBIAT Tambaksogra pada tahun 2014 tepatnya pada tanggal 26 Februari menjadi wilayah kerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar Muntitan Magelang). BBI Tambaksogra terletak di Desa Tambaksogra Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Memiliki luas tanah 20.000 m² dengan luas bangunan 783 m². Luas kolam 10.680 m² dengan jumlah kolam 26 petak.

e. Loka PBIAT Singosari

Loka PBIAT Singosari pada tahun 2014 tepatnya pada tanggal 26 Februari menjadi wilayah kerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar Muntitan Magelang). BBI Singosari terletak di Desa Singosari Kecamatan Karanglewas Kabupaten Banyumas. Memiliki luas tanah 2 Ha dengan luas bangunan 1.311 m². Luas kolam 6.131 m² dengan jumlah kolam 48 petak.

f. Loka PBIAT Randudongkal

Pada tahun 2014 BBI Randudongkal menjadi wilayah kerja dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (Balai Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar Muntilan Magelang). BBI Randudongkal terletak di Desa Banjaranyar Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang. Memiliki luas tanah ± 1 Ha dengan luas bangunan 160 m². Luas kolam 3.308 m² dengan jumlah kolam 17 petak.

4. Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut

Balai Budiaya Ikan Air Payau dan Laut Karanganyar terletak di Desa Tugu Kecamatan Tugu, Kota Semarang. BIAP Karanganyar memiliki luas tambak 3,4 Ha dan luas bangunan 5.000 m². Fasilitas di BIAP Karanganyar antara lain: Luas lahan produktif berupa 4 petak tambak untuk budidaya; 2 petak kecil tambak untuk pendederan (penampungan air), dengan luas total lahan ± 4 Ha. Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut membawahi 3 (tiga) Loka Budidaya Air Payau, meliputi: Loka Budidaya Ikan Air Payau Maribaya Tegal, Loka Perbenihan Ikan Air Payau Sluke Rembang dan Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Laut Karimunjawa Jepara.

a. Loka BIAP Maribaya Tegal

Loka Budidaya Ikan Air Payau Maribaya berada di Desa Maribaya Kecamatan Kramat Kabupaten Tegal. Luas tanah LBIAP Maribaya adalah 40.000 m² dengan luas bangunan sebesar 350 m², serta luasan tambak mencapai 26.390 m².

b. Loka PIAP Sluke Rembang

Loka Perbenihan Ikan Air Payau Sluke berada di Desa Jatisari Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang. Luas tanah PIAP Sluke adalah 5.751 m² dengan luas bangunan sebesar 384 m², sarana yang dimiliki antara lain 11 bak *indoor* dan 16 bak *outdoor*.

Fasilitas di LBIAP Sluke antara lain:

- 1 (satu) gedung kantor
- 1 (satu) labotarorium pakan alami
- 1 (satu) bak induk udang kapasitas 10 ton
- 2 (dua) bak induk bandeng kapasitas 200 ton
- 1 (satu) bak induk indoor kapasitas 40 ton
- 1 (satu) bak kultur massal plankton outdoor
- 10 (sepuluh) bak beton outdoor kapasitas 8 ton
- 2 (dua) reservoir air laut 100 ton

c. Loka PBIAL Karimunjawa Jepara

Loka Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Laut Karimunjawa Jepara terletak di Pulau Karimunjawa Kabupaten Jepara. Loka PBIAL Karimunjawa memiliki luas lahan sebesar 10.000 m² dan Luas Bangunan sebesar 150 m². Fasilitas di PBIAL Karimunjawa antara lain;

- Hatchery ukuran 5 x 2 m sebanyak 5 bak
- Bak ukuran 2,5 x 2,4 m sebanyak 12 unit
- Bak bulat volume 30 ton sebanyak 1 unit
- Bak bulat volume 15 ton sebanyak 2 unit
- Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 35 petak produksi
- Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 6 petak pembenihan
- Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 10 petak calon induk
- Keramba Jaring Apung (KJA) sebanyak 9 petak konsumsi

5. Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Semarang dan Tegal

Sebagai salah satu UPT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 105 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Balai ini terdiri atas BPKSKP Pantai Utara Timur yang berkedudukan di Kota Semarang, membawahi wilayah kerja: Kota Semarang, Kab. Kendal, Kab. Batang, Kota dan Kab. Pekalongan, Kab. Rembang, Kab. Pati, Kab. Jepara dan Kab. Demak. Sedangkan BPKSKP Pantai Utara Barat dan Pantai Selatan membawahi wilayah kerja: Kota dan Kab. Tegal, Kab. Brebes, Kab. Pemalang, Kab. Wonogiri, Kab. Purworejo, Kab. Kebumen dan Kab. Cilacap. Balai ini dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional pengawasan dan konservasi pada sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Jawa Tengah. Gambaran layanan UPT ini adalah: Pengawasan pemanfaatan bidang kelautan dan perikanan, pengawasan ruang laut, pembinaan kelompok masyarakat pengawas perikanan dan kelautan, pembinaan kelompok masyarakat konservasi, verifikasi dokumen perijinan bidang kelautan dan perikanan, pelaksanaan konservasi sumberdaya kelautan dan perikanan, identifikasi calon lokasi pencadangan kawasan konservasi dan calon lokasi pesisir yang perlu direhabilitasi.

6. Unit Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan Perikanan Magelang

Sebagai salah satu UPT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 105 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka melaksanakan pengembangan sumberdaya manusia bidang kelautan dan perikanan di Jawa Tengah. Dalam upaya mendukung program peningkatan sumberdaya manusia di bidang kelautan dan perikanan tersebut, gambaran layanan UPT UPSDMKP adalah melaksanakan berbagai macam pelatihan yang meliputi: penyusunan kurikulum, silabi, bimbingan dan pelatihan teknis Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan; serta menyiapkan peningkatan kemampuan teknis kelompok masyarakat kelautan dan perikanan

7. Pangkalan Pendaratan Ikan Larangan Kabupaten Tegal

Sebagai salah satu UPT yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah No. 105 Tahun 2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka melaksanakan tugas operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengelolaan pendaratan ikan dan kesyahbandaran.

2.3. KINERJA PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Indikator kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan selama 5 (lima) tahun terakhir mengacu pada sasaran strategis seperti yang ditentukan dalam Renstra sebelumnya. Terdapat 6 (enam) Sasaran Strategis meliputi:

1. Meningkatnya pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, meliputi: Pemberdayaan Petambak Garam, Wanita Pesisir, Taruna Pesisir;
2. Meningkatnya pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Kewirausahaan, meliputi: operasi pengawasan dan pembinaan POKWASMAS;
3. Berkembangnya sub-sektor Perikanan Tangkap, meliputi: Produksi Perikanan Tangkap, Sumberdaya manusia dan Pendapatan Nelayan;
4. Berkembangnya sub-sektor Perikanan Budidaya, meliputi: Produksi Perikanan Budidaya, Sumberdaya manusia dan Pendapatan Pembudidaya Ikan;
5. Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan, meliputi: Jumlah UPI yang dibina, Tingkat Konsumsi Makan Ikan, dan Volume Ekspor;
6. Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan di Jawa Tengah, meliputi: penanaman mangrove, terumbu karang buatan, transplantasi karang dan penebaran benih ikan.

Selain berdasarkan Sasaran Strategis, kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan juga mengacu pada indikator kinerja:

1. Tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor Kelautan dan Perikanan; dan
2. Identifikasi dan Optimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yaitu Laut Jawa (WPP 712) serta Potensi Lahan Perikanan Budidaya.

Formulasi pengukuran kinerja pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan berdasarkan perbandingan antara realisasi terhadap target kuantitatif sasaran strategis, yaitu terhadap Indikator Kinerja pencapaian sasaran strategis tersebut. *Review* Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3. Review Pencapaian Kinerja Pelayanan OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

No	Indikator Kinerja Sesuai TUPOKSI	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2013)	Target Renstra Tahun ke-			Realisasi Renstra Tahun ke-			Rasio Capaian (%) pada Tahun ke-		
						2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
I	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir													
1	Rata-rata pendapatan pemberdayaan wanita pesisir (Rp/Kap/Th)				2.742.951,61	2.849.926,73	2.961.073,87	3.076.555,75	5.528.000	5.704.000	6.008.400	193,97	192,63	195,30
2	Rata-rata Pendapatan taruna pesisir (Rp/Kap/Th)				4.133.005,79	4.300.805,83	4.475.418,54	4.657.120,53	4.800.000	5.085.000	5.343.750	111,61	113,62	114,74
3	Produksi Garam (ton				-	-	-	-	633.840,13	841.543,56	26.150,37	-	-	-
II	Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan													
4	Jumlah kelompok masyarakat Swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan yang aktif (kelompok)				10	20	20	20	20	20	20	100	100	100
III	Program Pengembangan Perikanan Tangkap													
5	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)	2,0%/th			243.694,50	296.663,00	306.866,21	317.424,48	270.158,30	359.468,00	327.624,00	91,07	117,14	103,21
6	Rata-rata pendapatan nelayan (Rp/Kap/Th)	7,60%/th			10.765.779,48	11.566.477,04	12.546.157,65	13.608.817,20	14.200.605,94	32.657.488,12	41.319.676,00	122,77	260,30	303,62
IV	Program Pengembangan Perikanan Budidaya													

No	Indikator Kinerja Sesuai TUPOKSI	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Kondisi Kinerja Pada Awal RPJMD (2013)	Target Renstra Tahun ke-			Realisasi Renstra Tahun ke-			Rasio Capaian (%) pada Tahun ke-		
						2014	2015	2016	2014	2015	2016	2014	2015	2016
7	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	35,25%/th			315.458,67	288.084,05	309.949,63	333.474,81	501.811,74	421.021,73	448.897,00	174,19	135,84	134,61
8	Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan (Rp/Kap/Th)	23,85%/th			23.160.988,43	16.339.722,52	17.298.864,23	18.314.307,57	32.191.966,26	35.322.004,47	39.790.969,00	197,02	204,19	217,27
V	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan													
9	Tingkat Konsumsi Ikan (kg/kap/th)	5,86%/th			17,82	18,69	19,59	20,55	20,92	23,64	26,71	111,93	120,67	129,98
10	Volume Ekspor Produk Perikanan (Ton)	5,10%/th			22.898,18	25.093,46	25.770,99	26.466,80	35.500,94	31.376,35	43.873,16	141,47	121,75	165,77
VI	Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan													
11	Luas penanaman mangrove (ha)				8,08	7,5	8,13	8,25	7,61	15,13	8,26	101,47	186,10	100,12
12	Luas terumbu karang buatan (ha)				17,28	4,68	5,13	5,58	5,40	5,40	7,99	115,38	105,26	143,19

2.3.1. Kinerja Pelayanan Sektor Kelautan dan Perikanan

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Target kinerja pelayanan pada Program Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir meliputi Rata-rata pendapatan pemberdayaan wanita pesisir, Rata-rata Pendapatan taruna pesisir dan Produksi Garam. Kondisi kinerja pada awal RPJMD (2013) untuk rata-rata pendapatan pemberdayaan wanita pesisir 2.742.951,61 kg/kap/tahun dan rata-rata pendapatan taruna pesisir 4.133.005,79 kg/kap/tahun, capaian kinerja pada kurun waktu 2014-2016 sebagai berikut :

- a. Rata-rata pendapatan taruna pesisir pada tahun 2014-2016 melebihi target yang ditentukan, yaitu sebesar 193,97% pada tahun 2014, 192,63% pada tahun 2015 dan 195,30% pada tahun 2016;
- b. Rata-rata pendapatan pemberdayaan wanita pesisir pada tahun 2014-2016 melebihi target yang ditentukan, yaitu sebesar 111,61% pada tahun 2014, 113,62% pada tahun 2015 dan 114,74% pada tahun 2016;
- c. Produksi garam mengalami peningkatan dari tahun 2014 dibandingkan pada tahun 2015. Produksi pada tahun 2014 sebesar 633.840,13 ton sedangkan pada tahun 2015 sebesar 841.543,56 ton. Pada tahun 2016 produksi garam tercapai sebesar 26.150,37 ton.

Capaian target kinerja Rata-rata pendapatan taruna pesisir dan Rata-rata pendapatan pemberdayaan wanita pesisir dicapai melalui dukungan Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dalam bentuk pelatihan kepada taruna dan wanita pesisir serta pemberian bantuan sarana dan prasarana. Capaian produksi garam pada sangat dipengaruhi pada faktor cuaca. Pada tahun 2016 produksi garam mengalami penurunan dibandingkan produksi tahun 2014 dan 2015. Penurunan produksi garam disebabkan terjadinya musim penghujan yang cukup panjang pada tahun 2016.

Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Target kinerja pelayanan Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan meliputi Operasi Pengawasan dan Jumlah kelompok masyarakat Swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan yang aktif. Kondisi kinerja pada awal RPJMD (2013) jumlah kelompok masyarakat pengawas yang aktif 10 kelompok, capaian kinerja pelayanan pada program ini sesuai dengan target yang ditetapkan yaitu mencapai 100%. Target pelaksanaan operasi pengawasan sebanyak 10 kali per tahun dan jumlah kelompok masyarakat pengawas dengan target 20 kelompok per tahun tercapai sesuai target. Target tersebut dicapai melalui dukungan pelaksanaan kegiatan pengawasan, pengendalian dan pemulihan sumberdaya perikanan dan kelautan.

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Target kinerja pelayanan Program Pengembangan Perikanan Tangkap meliputi Jumlah Produksi Perikanan Tangkap dan Rata-rata pendapatan nelayan. Kondisi kinerja pada awal RPJMD (2013) produksi perikanan tangkap sebesar 243.694,50 ton sedangkan rata-rata pendapatan nelayan sebesar

10.765.779,48 (Rp/Kap/Tahun), capaian kinerja pelayanan pada program ini pada tahun 2014-2016 sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja jumlah Produksi Perikanan Tangkap pada pada tahun 2014 sebesar 270.158,30 ton dari target 296.663,00 ton atau mencapai 91,07%, pada tahun 2015 dari target 306.866,21 ton tercapai 359.468,00 atau mencapai 117,14%, sedangkan pada tahun 2016 mencapai 327.624,00 ton dari target 317.424,48 ton atau mencapai 103,21%;
- b. Capaian kinerja Rata-rata pendapatan nelayan pada pada tahun 2014 Rp.14.200.605,94 dari target Rp.11.566.477,04 atau mencapai 122,77%, pada tahun 2015 dari target Rp.12.546.157,65 tercapai Rp.32.657.488,12 atau mencapai 260,30%, sedangkan pada tahun 2016 mencapai Rp.41.319.676,00 dari target Rp. 13.608.817,20 atau mencapai 303,62%.

Seluruh target kinerja pada Program Pengembangan Perikanan Tangkap tercapai kecuali target jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2014. Capaian kinerja jumlah produksi perikanan tangkap pada tahun 2014 tidak sesuai dengan target disebabkan oleh terjadinya *Illegal Unreported Unregulated Fishing* yaitu kegiatan penangkapan ikan yang ilegal, melanggar aturan penggunaan alat tangkap (ukuran mata jaring kecil, panjang jaring, alat bantu penangkapan dan melanggar jalur penangkapan); pengetahuan dan kesadaran nelayan mengenai pentingnya menjaga kualitas hasil tangkapan masih rendah; pendangkalan/sedimentasi alur pelayaran di Pelabuhan Perikanan Pantai sehingga mengganggu keluar masuk kapal ke Tempat Pelelangan Ikan; ketergantungan nelayan terhadap BBM yang harganya relatif tinggi dan kurangnya modal untuk operasional penangkapan ikan.

Kegiatan yang mendukung capaian kinerja pelayanan pada Program Pengembangan Perikanan Tangkap antara lain Kegiatan Optimalisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan; Kegiatan Peningkatan Kualitas Hasil Tangkapan; Kegiatan Pengembangan Sistem Kerja Pelabuhan Perikanan Pantai Jawa Tengah; Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan; Kegiatan Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap; Kegiatan Revitalisasi Perikanan Tangkap dan Statistik Perikanan Tangkap dan Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana 9 Pelabuhan Perikanan Pantai di Jawa Tengah.

Program Pengembangan Perikanan Budidaya

Target kinerja pelayanan Program Pengembangan Perikanan Budidaya meliputi Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan. Kondisi kinerja pada awal RPJMD (2013) produksi perikanan budidaya sebesar 315.458,67 ton sedangkan rata-rata pendapatan pembudidaya ikan sebesar 23.160.988,43 (Rp/Kap/Tahun), capaian kinerja pelayanan pada program ini pada tahun 2014-2016 sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja jumlah Produksi Perikanan Budidaya pada pada tahun 2014 sebesar 501.811,74 ton dari target 288.084,05 ton atau mencapai 174,19%, pada tahun 2015 dari target 309.949,63 ton tercapai 421.021,73 ton atau mencapai 135,84%, sedangkan pada tahun 2016 mencapai 448.897,00 ton dari target 333.474,81 ton atau mencapai 134,61%;

- b. Capaian kinerja Rata-rata pendapatan pembudidaya ikan pada tahun 2014 Rp. 32.191.966,26 dari target Rp. 16.339.722,52 atau mencapai 197,02%, pada tahun 2015 dari target Rp. 17.298.864,23 tercapai Rp.35.322.004,47 atau mencapai 204,19%, sedangkan pada tahun 2016 mencapai Rp. 39.790.969,00 dari target Rp.18.314.307,57 atau mencapai 217,27%.

Seluruh target kinerja pelayanan pada Program Pengembangan Perikanan Budidaya tercapai. Upaya yang dilakukan antara lain melalui penggunaan induk dan benih unggul dalam proses produksi pembudidayaan ikan, pengendalian hama penyakit ikan, pelaksanaan sertifikasi penerapan Cara Budidaya Ikan yang baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) serta berkembangnya teknologi perikanan budidaya antara lain teknologi Bioflock.

Kegiatan yang mendukung capaian kinerja pelayanan pada Program Pengembangan Perikanan Tangkap antara lain Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Budidaya Ikan; Kegiatan Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Ikan; Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Perbenihan Ikan; Kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya Air Tawar; Kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya Air Payau serta Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana pada 3 Balai.

Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Target kinerja pelayanan Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan meliputi Tingkat Konsumsi Ikan dan Volume Ekspor Produk Perikanan. Kondisi kinerja pada awal RPJMD (2013) tingkat konsumsi ikan sebesar 17,82 Kg/Kap/Tahun sedangkan volume ekspor produk perikanan sebesar 22.898,18 ton, capaian kinerja pelayanan pada program ini pada tahun 2014-2016 sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja Tingkat Konsumsi Ikan pada tahun 2014 sebesar 20,92 Kg/Kapita/Tahun dari target 18,69 Kg/Kapita/Tahun atau mencapai 111,93%, pada tahun 2015 dari target 19,59 Kg/Kapita/Tahun tercapai 23,64 atau mencapai 120,67%, sedangkan pada tahun 2016 mencapai 20,55 Kg/Kapita/Tahun dari target 26,71 Kg/Kapita/Tahun atau mencapai 129,98%;
- b. Capaian kinerja Volume Ekspor Produk Perikanan pada tahun 2014 sebesar 25.093,46 ton dari target 35.500,94 ton atau mencapai 141,47%, pada tahun 2015 dari target 25.770,99 ton tercapai 31.376,35 ton atau mencapai 121,75%, sedangkan pada tahun 2016 mencapai 43.873,16 ton dari target 26.466,80 ton atau mencapai 165,77%.

Kegiatan yang mendukung capaian kinerja pelayanan pada Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan antara lain Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan; Kegiatan Peningkatan Pelayanan Mutu Usaha Perikanan; Kegiatan Pengembangan Kawasan Perikanan; Kegiatan Peningkatan Perluasan Usaha dan Koordinasi Kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan serta Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan 3 LPPMHP. Upaya-upaya yang dilakukan dalam mendukung capaian kinerja antara lain melalui pembinaan pra SKP untuk penerapan GMP dan SSOP pada UPI, pembinaan penerapan sanitasi dan higienis pada UMKM pengolahan hasil perikanan; kampanye Gemarikan dan FORIKAN.

Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Target kinerja pelayanan Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan meliputi Luas Penanaman Mangrove dan Luas Terumbu Karang Buatan. Kondisi kinerja pada awal RPJMD (2013) luas penanaman mangrove 8,08 Ha dan luas penanaman terumbu karang buatan 17,28 Ha, capaian kinerja pelayanan pada program ini pada tahun 2014-2016 sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja Luas Penanaman Mangrove pada tahun 2014 sebesar 7,61 Ha dari target 7,5 Ha atau mencapai 101,47%, pada tahun 2015 dari target 8,13 Ha tercapai 15,13 Ha atau mencapai 186,10 Ha, sedangkan pada tahun 2016 mencapai 8,26 Ha dari target 8,25 Ha atau mencapai 100,12%;
- b. Capaian kinerja Luas Terumbu Karang Buatan pada tahun 2014 Rp. 5,40 Ha dari target 4,68 Ha atau mencapai 115,38%, pada tahun 2015 dari target 5,13 Ha tercapai 5,40 Ha atau mencapai 105,26%, sedangkan pada tahun 2016 mencapai 7,99 Ha dari target 5,58 Ha atau mencapai 143,19%.

Seluruh target kinerja pelayanan pada Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan tercapai. Upaya yang dilakukan antara lain melalui penanaman mangrove dan penenggelaman terumbu karang buatan melalui Kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan.

2. Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan OPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Uraian **)	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	2013	2014	2015	2016	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pendapatan	4.153.650.000	4.600.000.000	5.520.000.000	6.300.000.000	3.779.219.854	5.536.794.346	6.286.473.483	5.087.994.464	90,99	120,37	113,89	80,76	536.587.500,00	327.193.652,50
BTL	27.183.467.000	39.825.230.000	48.531.545.000	50.407.195.000	24.142.098.508	35.598.702.352	44.761.562.112	45.550.057.488	86,75	89,39	92,23	90,36	5.805.932.000,00	5.351.989.745,00
BL	59.338.200.000	48.880.580.000	58.042.032.000	49.163.836.000	45.813.492.532	47.858.760.901	53.828.843.237	45.422.320.792	77,21	97,91	92,74	92,39	(2.543.591.000,00)	(97.792.935,00)

3.

4. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah bersumber dari Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang meliputi Penerimaan Penjualan Produksi Balai Benih dan Penerimaan Penjualan Produksi Es Batu; Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah berupa Sewa Alat Berat, Sewa Workshop/Bengkel, Sewa Rumah Dinas, Sewa Gedung/Ruang/Aula/Asrama, Sewa Laboratorium, Sewa Lahan, Pas Masuk dan Sewa Tambah Labuh; serta Retribusi Pemberian Izin usaha Perikanan.

Capaian PAD untuk sektor kelautan dan perikanan dari tahun 2014-2015 melebihi target yang ditetapkan masing-masing sebesar 120,37% pada tahun 2014 dan 113,89% pada tahun 2015. Pada tahun 2013 dan tahun 2016 capaian PAD tidak memenuhi target yang ditetapkan dengan capaian 90,99% pada tahun 2013 dan 80,76% pada tahun 2016. Capaian PAD pada tahun 2013 tidak mencapai target disebabkan adanya perubahan Peraturan Menteri tentang Usaha Perikanan Tangkap, sehingga nelayan banyak yang terlambat melakukan cek fisik kapal yang merupakan syarat dalam pengajuan ijin usaha. Sedangkan capaian PAD pada tahun 2016 yang tidak memenuhi target disebabkan oleh adanya peralihan kewenangan sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, penerbitan Sertifikat Kesehatan yang merupakan salah satu sumber PAD Dinas Kelautan dan Perikanan, ditarik kembali menjadi urusan Pemerintah Pusat.

5. Belanja Daerah

Belanja daerah pada Dinas Kelautan dan Perikanan meliputi Belanja Tidak Langsung yang digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan dan Belanja Tambahan Penghasilan PNS. Sedangkan Belanja Langsung digunakan untuk membiayai seluruh program dan kegiatan operasional serta pembangunan bidang kelautan dan perikanan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Rasio Belanja Tidak Langsung tahun 2013-2016 berturut-turut sebesar 86,75%, 89,39%; 92,23% dan 90,36%. Adanya pegawai yang memasuki masa purna tugas menyebabkan rasio Belanja Tidak Langsung tidak terserap 100%. Sedangkan rasio Belanja Langsung tahun 2013-2016 berturut-turut sebesar 77,21%, 97,91%, 92,74% dan 92,39%. Rendahnya rasio Belanja Langsung pada tahun 2013 disebabkan adanya proses gagal lelang pada Kegiatan Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap berupa pengadaan kapal penangkapan ikan > 30 GT.

5.4. PELUANG DAN TANTANGAN PENGEMBANGAN PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

2.4.1. Peluang

Peluang (*opportunity*) adalah kondisi eksternal yang mendukung dan dapat dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Apabila dikelompokkan, maka peluang (*opportunity*) terdiri dari peluang sumberdaya alam dan kondisi geografis, peluang ekonomi dan pasar, peluang dukungan pemerintah.

Peluang Sumberdaya Alam dan Kondisi Geografis:

- (1) Belum termanfaatkannya seluruh potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Jawa Tengah;

Peluang Ekonomi, Pasar dan Industri:

- (2) Tingginya permintaan ikan baik untuk memenuhi pasar dalam negeri maupun untuk ekspor serta pertumbuhan usaha perikanan rakyat ke usaha perikanan maju seiring dengan naiknya pamor perikanan sebagai sumberdaya pangan unggulan;
- (3) Adanya kebijakan pengembangan usaha Perikanan secara lebih sistemik serta memberdayakan usaha-usaha perikanan skala kecil;
- (4) Peran pelaku usaha perikanan yang semakin meningkat dan proaktif, serta iklim dunia usaha yang semakin kondusif (termasuk aspek finansial, perbankan dan investasi);
- (5) Pengembangan klaster usaha pengolahan hasil perikanan dalam bentuk UKM (Usaha Kecil dan Menengah) yang berbasis pada produk bernilai tambah dan memenuhi selera pasar;
- (6) Peluang investasi pada bidang usaha pengolahan dan pemasaran dengan keunggulan jenis dan kualitas produk
- (7) Adanya peluang investasi di pulau-pulau kecil yang dapat memacu penyediaan fasilitas yang memadai;
- (8) Penyajian data dan informasi sumberdaya, sarana dan prasarana serta jaringan usaha di bidang kelautan dan perikanan Jawa Tengah;
- (9) Maraknya bantuan dari lembaga-lembaga donor luar negeri untuk membantu peningkatan mutu produksi hasil perikanan sehingga kondisi pemasaran (ekspor) menjadi lebih kondusif;
- (10) Globalisasi / diberlakukannya pasar bebas membuka peluang pengembangan pemasaran hasil perikanan;

Peluang Dukungan Pemerintah:

- (11) Komitmen pemerintah dan payung hukum dalam membangun bidang Kelautan dan Perikanan termasuk penyempurnaan otonomi dan Peraturan Daerah;
- (12) Adanya lembaga pemerintahan yang menangani sampai tingkat Kabupaten/Kota yang didukung *stakeholders*, termasuk di dalamnya kekayaan/Aset Barang Daerah dalam lingkup Kelautan dan Perikanan seperti: pelabuhan perikanan, sentra budidaya, pusat informasi dan jejaring usaha serta pariwisata; dan
- (13) Efektifitas dan efisiensi pemakaian anggaran APBD.

2.4.2. Tantangan

Tantangan (*threat*) adalah kondisi eksternal yang dapat mengganggu dan menghambat penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Apabila dikelompokkan, maka ancaman (*threat*) terdiri dari tantangan alam; tantangan Ekonomi, Pasar dan Industri; tantangan globalisasi; serta tantangan koordinasi dan penanganan lintas sektor.

Tantangan Alam:

- (1) Menurunnya kualitas dan kuantitas sumberdaya alam, khususnya sektor kelautan dan perikanan, terutama terjadinya tekanan pada sumberdaya perikanan tangkap;

Tantangan Ekonomi, Pasar dan Industri:

- (2) Belum meratanya pembangunan ekonomi wilayah pesisir, terutama antara pesisir Utara dan Selatan Jawa Tengah;
- (3) Penyaluran KUR menurut sektor ekonomi masih belum optimal (hanya sekitar 17,08%);
- (4) Masalah permodalan yang masih kurang dalam menunjang usaha pengolahan hasil perikanan yang bersifat modern dan terstandar;
- (5) Tingginya harga pakan ikan dan Kurang lancarnya pasokan dan kuota BBM bagi nelayan;

Tantangan Globalisasi:

- (6) Menurunnya permintaan pasar (terutama luar negeri) akibat teknologi pengolahan yang kurang memadai;
- (7) Globalisasi (*free trade*) mengancam eksistensi industri Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah;

Tantangan Koordinasi dan Penanganan Lintas Sektor:

- (8) Lemahnya penegakan hukum dan rawannya konflik antar kepentingan, sehingga perlu dilakukan revitalisasi dan pembinaan/ sosialisasi peraturan perundang-undangan Perikanan;
- (9) Terkonsentrasinya domisili nelayan Jawa Tengah di Pantai Utara Jawa Tengah, mengakibatkan terjadinya tekanan berlebih pada sumberdaya perikanan, dan
- (10) Fluktuasi biaya kegiatan berkaitan dengan fluktuasi komponen biaya BBM. Penyesuaian anggaran diusulkan dalam perubahan anggaran



BAB III

ISU-ISU STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS

DAN FUNGSI

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah sesuai Perda No 3 Tahun 2017
- 3.4. Telaahan RTRW dan KLHS
- 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah merupakan *entry point* dalam merumuskan isu-isu strategis. Isu-isu strategis yang valid tersebut akan sangat membantu dalam merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan 5 (lima) tahun ke depan. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif pun akan lebih *reliable* dengan berdasar pada identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah.

Proses identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, didasarkan pula pada evaluasi terhadap capaian/kondisi saat ini, standar yang digunakan, faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi, sehingga akan muncul permasalahan pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah selama 5 (lima) tahun ke belakang. Proses identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel 3.1. berikut:

Tabel 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DI LUAR KEWENANGAN SKPD)	
KEPMEN Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 45 Tahun 2011 tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Republik Indonesia dinyatakan bahwa Laut Jawa (WPP 712) dalam kondisi <i>over exploited</i> untuk ikan pelagis kecil, udang, kakap merah dan kerapu dan PERMEN Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 71 Tahun 2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia		Menurunnya daya dukung perairan di Laut Jawa (WPP 712) disebabkan meningkatnya penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan peraturan		Masih kecilnya perbandingan tingkat kerusakan kawasan dan kegiatan revitalisasi sumberdaya ikan, seperti: 1. Pembuatan apartemen ikan; 2. Penebaran ikan (kerapu dan kakap) di sekitar apartemen ikan; 3. Alih alat tangkap.
a. Pendapatan nelayan di Jawa Tengah Rp. 10 juta/kapita/th masih rendah dibandingkan dengan Kebutuhan Hidup Layak Penduduk Jawa Tengah Rp. 940.375/bulan (2012);		Rendahnya pendapatan nelayan di Jawa Tengah yang disebabkan: 1. Belum optimalnya hasil tangkapan nelayan kecil; 2. Rendahnya kualitas hasil tangkapan; 3. Masih belum adanya alternatif usaha bagi	Rendahnya pendapatan nelayan di Jawa Tengah yang disebabkan Tingginya harga BBM/Solar bersubsidi sampai di tangan nelayan;	1. Masih tingginya beban biaya produksi dibanding pendapatan nelayan, seperti: • Penerbitan Kartu (BBM) Nelayan; • Pemberian alat bantu penangkapan ikan

Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DI LUAR KEWENANGAN SKPD)	
b. Belum cukupnya ketersediaan dan kurang lancarnya pasokan dan kuota BBM/Solar bersubsidi bagi nelayan; c. Jumlah SPBB/SPBN/SPBU/ SPDN bagi nelayan di seluruh Jawa Tengah hanya berjumlah 32 buah. Sedangkan sentra-sentra nelayan (Tempat Pelelangan Ikan / Pangkalan Pendaratan Ikan / Pelabuhan Perikanan Pantai) di Jawa Tengah berjumlah 77 buah; d. Jumlah pabrik es bagi nelayan yang tersebar di Jawa tengah sebesar 23 buah		nelayan/wanita nelayan pada saat musim paceklik.		bagi nelayan kecil : GPS dan <i>Fish Finder</i> . • Diversifikasi usaha nelayan/ wanita nelayan 2. Belum sinkronnya kebijakan program instansi terkait dengan kebutuhan nelayan (PERTAMINA, Dinas ESDM, BPP Migas, Dirjen KP3K KKP RI);
a. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Jawa Tengah berjumlah 10 buah dimana 4 di antaranya telah mempunyai dokumen Wilayah Kerja dan Operasional Perikanan Perikanan (WKOPP);		1. Terbatasnya sarana dan prasarana PPP; 2. Belum optimalnya pungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD) karena belum adanya Perda Retribusi PPP; 3. Tidak semua PPP memiliki syahbandar perikanan.		1. Pengembangan sarana dan prasarana PPP belum sebanding dengan perkembangan armada dan produksi perikanan; 2. Pembuatan dokumen pembentukan Wilayah Kerja dan Operasional

Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DI LUAR KEWENANGAN SKPD)	
b. Fungsi PPP selama ini adalah mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan, pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran;				Perikanan Perikanan (WKOPP) di 5 PPP terkendala status lahan dan aset; 3. Kebijakan Penambahan petugas syahbandar perikanan di lintas Kementerian.
a. Belum adanya petugas Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perikanan b. Jumlah kapal patroli perikanan : 2 buah 1. Kapal Barakuda 2. Kapal Napoleon		1. Masih dijumpainya pelanggaran penangkapan ikan (jalur penangkapan ikan, perijinan/dokumen, ukuran kapal, dan alat tangkap); 2. Masih terjadinya konflik nelayan (baik dalam provinsi atau antar provinsi).		1. Terbatasnya intensitas kegiatan operasi pengawasan di laut; 2. Peraturan perundang-undangan bidang perikanan & pengawasan terus berkembang; 3. Terbatasnya jumlah petugas PPNS Perikanan; 4. Semakin kompleksnya permasalahan bidang PSDKP shg perlu koordinasi dengan instansi penegak hukum di laut (POLRI, TNI-AL), dan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP RI

Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DI LUAR KEWENANGAN SKPD)	
a. Kebutuhan kuantitatif benih di Jawa Tengah baru terpenuhi 94,35% dari kebutuhan; b. Kebutuhan benih dan induk yang berkualitas unggul dari Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) baru terpenuhi 0,23% dari kebutuhan;		a. Belum optimalnya ketersediaan kualitas dan kuantitas benih dan induk unggul bagi pembudidaya ikan; b. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung perikanan budidaya serta rendahnya penerapan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) yang disebabkan kurangnya penguasaan teknis		1. Kapasitas produksi benih berkualitas unggul belum sebanding dg kebutuhan; 2. Pengembangan sarana dan Prasarana Balai Budidaya Ikan Air Tawar (BBIAT) dan Balai Budidaya Ikan Air Payau dan Laut (BBIAPL) masih terbatas; 3. Distribusi induk unggul hasil <i>broodstock</i> dan produksi benih dari BBIAT belum teruji di seluruh 35 kab/kota.
Provinsi Jawa Tengah mempunyai potensi lahan yang luas untuk usaha budidaya, dimana : a. Budidaya tambak (air payau) diperkirakan mencapai 40 ribu ha dan dimanfaatkan sekitar 98,10 %; b. Budidaya kolam diperkirakan mencapai 50 ribu ha dan baru dimanfaatkan sekitar 8,52%;		a. Belum optimalnya peningkatan produksi perikanan budidaya dibandingkan dengan potensi yang ada; b. Belum optimalnya penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) oleh para pembudidaya ikan; c. Masih adanya serangan penyakit di sentra budidaya ikan; d. Terbatasnya ketersediaan prasarana pendukung, a.l : saluran tambak dan		Produksi perikanan budidaya terkait : 1. Kompetensi teknis pembudidaya ikan, terutama penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) masih terbatas; 2. Produksi budidaya : <i>demfarm</i> udang vanamei, penerapan teknologi <i>biofloc</i> belum berkembang; 3. Pengembangan Minapadi dan UGADI

Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DI LUAR KEWENANGAN SKPD)	
c. Budidaya di perairan umum diperkirakan seluas 9 ribu Ha dan baru dimanfaatkan sekitar 0,51%; d. Budidaya sawah berpengairan teknis seluas ± 190 ribu ha, baru dimanfaatkan sekitar 2,76%.		jaringan listrik disebabkan belum optimalnya dukungan terhadap Program Minapolitan oleh Kementerian terkait.		(Udang Galah dengan Padi belum merata di seluruh wilayah; 4. Kurangnya kesadaran pembudidaya untuk sertifikasi CBIB; 5. Belum adanya dokumen perencanaan (masterplan dan DED) minapolitan budidaya ikan di Kab/Kota.
Harga pakan ikan pabrikaan yang terus meningkat yang menyebabkan menurunnya margin keuntungan pembudidaya ikan akibat tingginya harga pakan ikan pabrikaan			Bahan baku pakan ikan pabrikaan (terutama tepung ikan) masih tergantung pada impor	1. Pengembangan pakan ikan mandiri berbahan baku lokal masih terkendala bahan baku; 2. Bintek pembuatan pakan ikan mandiri berbahan baku lokal masih terbatas pelaksanaannya;
Tingkat konsumsi ikan di Jawa Tengah yaitu berkisar 17,5 kg/kap/th (2012).	standar konsumsi ikan nasional (2015) : 41,11 kg/kap/th	Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di Jawa Tengah yang disebabkan belum optimalnya sosialisasi makan ikan berikut diversitas produksi		1. Kualitas mutu dan keamanan pangan produk perikanan belum sesuai SNI; 2. Akses pasar domestik, seperti : Safari Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN), Gelar Produksi Perikanan, Pembinaan pasar ikan

Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DI LUAR KEWENANGAN SKPD)	
				tradisional dan Pembinaan UMKM belum menjangkau ke seluruh pelaku usaha; 3. Diversifikasi jenis ikan budidaya dan olahan masih belum bervariasi.
a. Banyaknya pelaku usaha pengolahan hasil perikanan yang masih bersifat tradisional (dengan mutu produk, syarat teknis, sanitasi dan higienis yang rendah); b. Pola pemasaran hasil perikanan yang masih bersifat tradisional, belum menerapkan sistem rantai dingin pada penanganan hasil produk perikanan, sehingga menyebabkan menurunnya kualitas bahan baku olahan perikanan; c. Masih adanya penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.		a. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi pengolahan hasil perikanan; b. Belum diterapkannya sistem jaminan mutu dan keamanan pangan secara konsisten pada Unit Pengolahan Ikan (UPI) tradisional, <i>supplier</i> dan pasar tradisional; c. Rendahnya kesadaran, pengetahuan serta keterbatasan sarana dan prasarana proses pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.		1. Peningkatan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan terkendala perilaku produsen yg belum menerapkan GMP; 2. Terbatasnya sarpras pengujian BP2MHP, penyesuaian kompetensi SDM UPI maupun penguji.
a. Daya dukung ekosistem perairan terhadap		a. Adanya kerusakan habitat vital di laut/ pesisir yang		a. Belum seimbang upaya rehabilitasi

Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DI LUAR KEWENANGAN SKPD)	
peningkatan produksi perikanan tangkap di Jawa Tengah semakin menurun. Hal ini dilihat dari kerusakan terumbu karang pada tahun 2012 yang mencapai 58% dari total luasan terumbu karang di Jawa Tengah sebesar 987,64 Ha. Sedangkan hutan mangrove di Jawa Tengah jumlahnya sangat terbatas. Pada tahun 2012 luas hutan mangrove hanya sebesar 41.897,49 Ha dan 3.483,38 Ha (8,31%) dalam kondisi rusak; b. Lingkungan di habitat Perairan Umum juga mengalami kerusakan dengan ditandainya penurunan populasi ikan di perairan tersebut.		disebabkan pencemaran, kerusakan oleh manusia, faktor bencana alam, akibat rendahnya pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian ekosistem/ lingkungan; b. Terjadinya degradasi di habitat perairan umum baik akibat pencemaran maupun akibat aktivitas manusia.		mangrove dan terumbu karang dengan tingkat kerusakan kawasan pesisir Jawa Tengah; b. Terdegradasinya populasi dan ekosistem perairan umum; c. Belum adanya dokumen Rencana Pengelolaan Wilayah Laut, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil kewenangan provinsi;
a. Potensi Lahan tambak garam di Jawa Tengah seluas 2.294,72 Ha dengan luasan lahan		a. Kurangnya ketersediaan stok dan kualitas bahan baku yang memadai untuk kontinuitas produksi garam;		a. Belum adanya Gudang penyimpanan garam kelompok, dan peralatan kerja

Capaian/Kondisi Saat ini	Standar yang Digunakan	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		INTERNAL (KEWENANGAN SKPD)	EKSTERNAL (DI LUAR KEWENANGAN SKPD)	
tambak seluas 2.106,32 Ha (2012); b. Jumlah petambak garam : 4.213 petambak (2012); c. Kelompok Usaha Garam Rakyat (KUGAR) berjumlah 422 kelompok (2012); d. Produksi total garam di Jawa Tengah sebanyak 240.955,46 ton e. dengan harga jual hanya berkisar Rp. 250,00 - Rp. 290,00 (2012). f. Data penduduk di 17 kabupaten/kota berpesisir Provinsi Jawa Tengah sebanyak 5.313,316 jiwa. Kurang lebih sekitar 15,34 % dari penduduk provinsi jawa tengah yang didominasi oleh masyarakat pesisir dan tergolong dalam kategori miskin.		b. Peralatan produksi dan teknologi yang digunakan masih sederhana dan kuantitas produksi yang kurang optimal; c. Perubahan iklim mempengaruhi keberlangsungan usaha petambak garam dan nelayan dalam mencari ikan di laut.		pembuat garam yang terstandarisasi.; b. Masih terbatasnya fasilitasi usaha wanita pesisir dan taruna pesisir melalui instansi pemerintah dengan memberi bantuan peralatan kerja

3.2. TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH DI JATENG

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu menetapkan Visi dan Misi Pembangunan Daerah 2013 – 2018 sebagai penjabaran Visi Misi Gubernur Terpilih dan mengacu pada agenda dan prioritas pembangunan nasional, juga merupakan Komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.

Sebagaimana tertuang pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018, Visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018 adalah :

MENUJU JAWA TENGAH SEJAHTERA DAN BERDIKARI

“Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”

Makna yang terkandung dalam Visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

Sejahtera

Jawa Tengah Sejahtera merupakan suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar rakyat Jawa Tengah yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian dan *tepo seliro*; serta tersedia prasarana dan sarana publik terkait dengan supra dan infrastruktur pelayanan publik, transportasi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Berdikari

Berdikari merupakan tindakan yang didasarkan pada kekuatan sendiri atau berposisi berdiri di atas kaki sendiri. Artinya membangun Jawa Tengah berdasarkan kekuatan yang ada di Jawa Tengah dan mengeksplorasi seluruh potensi yang dapat digunakan, baik di Jawa Tengah, Nasional, maupun Internasional. Untuk laku kerjanya, berdaulat dalam kemitraan dengan para pihak, menjadi sendi gerak kerja bersama yang saling menghormati.

Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari *“Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”* merupakan instrumen untuk menciptakan nilai-nilai kesejahteraan yang setara (*equal*) bagi segenap komponen masyarakat Jawa Tengah dan mewujudkan kondisi Jawa Tengah yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian secara sosial budaya, yang dapat dimanifestasikan dalam bentuk sikap maupun perbuatan, dengan tindakan dan perilaku *“Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”*.

Sesuai dengan harapan “Jawa Tengah Yang Sejahtera dan Berdikari”, maka ditetapkan **“Misi Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2013-2018”** sebagai upaya dalam mewujudkan visi, sebagai berikut:

1. Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno – Berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan;
2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran;
3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan, “mboten korupsi, mboten ngapusi”;
4. Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan;
5. Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak;
6. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat;
7. Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 -2018 disusun dengan berpedoman pada Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 sehingga diperlukan sinergitas dan keterkaitan antara Visi-Misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dengan Visi-Misi Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah (sebagaimana tertuang pada tabel 3.2.).

Tabel 3.2 Sinergitas dan Keterkaitan RPJMD Provinsi Jawa Tengah dengan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

MISI	SINERGITAS					KET
RPJMD	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2014-2018	ANGGARAN (Rp.000)	KEGIATAN UTAMA	
▪ Membangun Jawa Tengah berbasis Trisakti Bung Karno – Berdaulat dibidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian di bidang kebudayaan	PROGRAM OPTIMALI SASI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	▪ Jumlah UPI yang dibina ▪ Tingkat Konsumsi Makan Ikan ▪ Volume Ekspor ▪ Nilai Ekspor ▪ Produk olahan hasil perikanan	30 UPI/Th*) 4,86 %/Th 2,70 %/Th 3,00 %/Th 1,00 %/Th	30.861.400	▪ Kegiatan Pengembangan & Pembinaan Teknologi Pengolahan & Pemasaran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan ▪ Kegiatan Pelayanan Mutu Usaha Perikanan ▪ Kegiatan Peningkatan Perluasan Usaha dan Koordinasi Kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan ▪ Kegiatan Pengembangan Kawasan Perikanan ▪ Kegiatan Peningkatan & Pengembangan BP2MHP Semarang ▪ Kegiatan Peningkatan & Pengembangan BP2MHP Pekalongan ▪ Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan UPSDMKP	*)Target s.d 2018
▪ Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan, menanggulangi kemiskinan dan pengangguran	PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	▪ Rata-Rata Pendapatan Pemberdayaan Petambak Garam ▪ Rata-Rata Pendapatan Pemberdayaan Wanita Pesisir	13,9 %/Th 3,9 %/Th	11.266.855	Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	

MISI	SINERGITAS					KET
RPJMD	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2014-2018	ANGGARAN (Rp.000)	KEGIATAN UTAMA	
		▪ Rata-Rata Pendapatan Pemberdayaan Taruna Pesisir ▪ Produksi Garam	4,06 %/Th 5 %/Th			
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	▪ Produksi Perikanan tangkap ▪ Pendapatan Nelayan	3,44 %/Th 8,47 %/Th	27.178.030	▪ Kegiatan Optimalisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan ▪ Kegiatan Peningkatan Kualitas Hasil Tangkapan ▪ Kegiatan Revitalisasi Perikanan Tangkap dan Statistik Perikanan Tangkap ▪ Kegiatan Pengembangan Sistem Kerja Pelabuhan Perikanan Pantai Jawa Tengah ▪ Kegiatan Pemberdayaan masyarakat nelayan ▪ Kegiatan Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap ▪ Kegiatan Pengendalian Penangkapan Ikan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA	▪ Produksi Perikanan Budidaya ▪ Pendapatan Pembudidaya ▪ Jumlah Pelaksanaan sertifikasi CBIB dan Surveillance ▪ Jumlah UPR/HSRT yang bersertifikat CPIB ▪ Jumlah BBI yang bersertifikat CPIB	7,59 %/Th 5,87 %/Th 220 unit *) 50 unit *) 25 unit *)	27.272.078	▪ Kegiatan peningkatan dan Pengembangan Teknologi Budidaya Ikan ▪ Kegiatan Pengelolaan Lingkungan dan Statistik Perikanan Budidaya ▪ Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Perbenihan Ikan ▪ Kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya Air Tawar	*) Target s.d 2018

MISI	SINERGITAS					KET
RPJMD	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2014-2018	ANGGARAN (Rp.000)	KEGIATAN UTAMA	
					▪ Kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya Air Payau	
	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL & INFORMAL	Jumlah nelayan, pembudidaya ikan, pengolah /pemasar ikan, penyuluh perikanan dan masyarakat pesisir	26.260 orang	25.900.000	Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan	*) Target s.d 2018
Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Jawa Tengah yang bersih, jujur dan transparan, “mboten korupsi, mboten ngapusi	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	▪ Jumlah penyediaan jasa perkantoran	12 bulan	78.243.744	▪ Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dinas dan UPT ▪ Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas dan UPT ▪ Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah ▪ Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor ▪ Kegiatan Penyediaan Barang Cetak & penggan daan ▪ Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor ▪ Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga ▪ Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan ▪ Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman ▪ Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah ▪ Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran ▪ Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi & Dokumentasi	

MISI		SINERGITAS				KET
RPJMD	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2014-2018	ANGGARAN (Rp.000)	KEGIATAN UTAMA	
					▪ Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	▪ Jumlah pemeliharaan rutin sarana dan prasarana aparatur	12 bulan	77.330.456	▪ Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas, Gedung Kantor, Kendaraan Dinas/ Operasional, Perlengkapan Gedung Kantor, Meubelair, Peralatan Kantor dan Rumah Tangga, Alat Besar dan Berat ▪ Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor ▪ Kegiatan Rehab Gedung Kantor ▪ Kegiatan Peningkatan kapasitas sumber pendapatan UPT	
	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	▪ Peningkatan disiplin aparatur	100 %	3.699.366	Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	▪ Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal	5 bidang	4.898.856	Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	
Memperkuat kelembagaan sosial masyarakat untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGAWASAN & PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN & PERIKANAN	▪ Operasi Pengawasan ▪ Jumlah kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan yang aktif	50 Kali*) 20 klpk/th*)	4.265.162	▪ Kegiatan Pengawasan, Pengendalian & Pemulihan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan ▪ Kegiatan Peningkatan Pengembangan Balai Pengawasan dan Konservasi Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Pantura Barat dan Pansela ▪ Kegiatan Peningkatan Pengembangan Balai	*) Target s.d 2018

MISI	SINERGITAS					KET
RPJMD	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2014-2018	ANGGARAN (Rp.000)	KEGIATAN UTAMA	
					Pengawasan dan Konservasi Dinas Kelautan dan Perikanan Wilayah Pantura Timur	
Memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan proses pembangunan yang menyangkut hajat hidup orang banyak	PROGRAM OPTIMALISASI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	Dokumen perencanaan, meliputi Renja, Lakip, Laptah, RKA, Renstra	5 Dokumen	5.618.000	Kegiatan Pengembangan Perencanaan & Monitoring Evaluasi Program Kegiatan Kelautan & Perikanan	
▪ Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat ▪ Meningkatkan infrastruktur untuk mempercepat pembangunan Jawa Tengah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Pengelolaan dan Pengembangan sarana & prasarana Pelabuhan	10 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) 1 Pangkalan Pendara-tan Ikan	46.900.000	▪ Kegiatan Pengelolaan & Pengembangan Sarana & Prasarana PPP Tasik Agung ▪ Kegiatan Pengelolaan & Pengembangan Sarana & Prasarana PPP Bajomulyo ▪ Kegiatan Pengelolaan & Pengembangan Sarana & Prasarana PPP Karimunjawa ▪ Kegiatan Pengelolaan & Pengembangan Sarana & Prasarana PPP Morodemak ▪ Kegiatan Pengelolaan & Pengembangan Sarana & Prasarana PPP Tawang ▪ Kegiatan Pengelolaan & Pengembangan Sarana & Prasarana PPP Klidanglor ▪ Kegiatan Pengelolaan & Pengembangan Sarana & Prasarana PPP Wonokerto ▪ Kegiatan Pengelolaan & Pengembangan Sarana & Prasarana PPP Asemdayong	

MISI	SINERGITAS					KET
RPJMD	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET 2014-2018	ANGGARAN (Rp.000)	KEGIATAN UTAMA	
					▪ Kegiatan Pengelolaan & Pengembangan Sarana & Prasarana PPP Tegalsari ▪ Kegiatan Pengelolaan & Pengembangan Sarana & Prasarana PPP Logending ▪ Kegiatan Pengelolaan & Pengembangan Sarana & Prasarana PPI Larangan	
	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pengembangan sarana & prasarana UPTD Bidang Perikanan Budidaya	▪ 6 Loka BBIAT ▪ 3 Loka BBIAPL	22.712.661	▪ Kegiatan Optimalisasi dan Pengembangan Karantina dan Kesehatan Ikan ▪ Kegiatan Pengembangan Sarana & Prasarana Perbenihan & Budidaya Air Tawar ▪ Kegiatan Pengembangan Sarana & Prasarana Perbenihan & Budidaya Air Payau Laut	
	PROGRAM REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	▪ Peningkatan Luas Mangrove di Kawasan Perikanan (Ha) ▪ Peningkatan Luas Terumbu Karang Buatan di Kawasan Perikanan (Ha) ▪ Ketersediaan dokumen penataan ruang wilayah pesisir dan laut sesuai UU pengelolaan wilayah Pesisir dan laut (%)	40,76 ha 27,9 ha 100%	13.328.610	▪ Kegiatan Rehabilitasi Habitat Vital ▪ Kegiatan Rehabilitasi & Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan ▪ Kegiatan Penyusunan Revisi Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Povinsi Jawa Tengah	

3.3. TELAHAHAN RENSTRA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Pembangunan kelautan dan perikanan yang telah dilaksanakan selama ini telah membawa hasil yang cukup menggembirakan. Perubahan tatanan global serta nasional yang berkembang dinamis menuntut percepatan pembangunan kelautan dan perikanan nasional secara nyata untuk mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak cepat tersebut.

Munculnya paradigma untuk menjadikan pembangunan berbasis sumberdaya kelautan dan perikanan sebagai motor penggerak pembangunan nasional, tercermin dalam keputusan politik nasional, sebagaimana terimplementasi dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang salah satu misinya menyatakan: Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.

Untuk itu perlu pelaksanaan konsep *blue economy* dalam pemanfaatan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan melalui pengembangan berbagai inovasi yang berorientasi pada pelestarian sumber daya untuk memberikan manfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan. Pengembangan *blue economy* tersebut diharapkan dapat menciptakan daya saing yang lebih tinggi melalui inovasi dan efisiensi yang berkelanjutan, melakukan pembangunan tanpa merusak lingkungan, menciptakan berbagai industri baru di bidang kelautan dan perikanan, serta menciptakan lapangan kerja. Upaya pengembangan *blue economy* perlu pula diiringi upaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang berwawasan kelautan dan perikanan melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta disertai upaya untuk mengelola wilayah laut nasional secara terintegrasi.

Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 telah mengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk (1) meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil, (2) meningkatkan penerimaan dan devisa negara, (3) mendorong perluasan kesempatan kerja, (4) meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, (5) mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, (6) meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing, (7) meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan, (8) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan dan, (9) menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014; tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah (1) melindungi, mengobservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan, (2) menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, (3)

memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan, dan, (4) meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis dalam pelaksanaan pembangunan nasional dan pembangunan kelautan dan perikanan, KKP mengembangkan industrialisasi kelautan dan perikanan yang akan dimulai sejak tahun 2012, dengan tujuan untuk meningkatkan kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui industrialisasi, para pelaku usaha perikanan mulai dari nelayan, pembudidaya ikan, serta pengolah dan pemasar hasil perikanan diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, nilai tambah dan daya saing, sekaligus membangun sistem produksi yang modern dan terintegrasi dari hulu sampai ke hilir. Dengan demikian, industrialisasi perikanan diharapkan mampu mengokohkan struktur usaha perikanan nasional, yang membawa *multiplier effect* sebagai *prime mover* perekonomian nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut, visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan sebelumnya dilakukan penyesuaian dan ditetapkan melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI nomor PER.45/PERMEN-KP/2015, sebagai berikut:

Visi

Visi pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional.

Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka misi yang diemban adalah:

1. **Kedaulatan (*Sovereignty*)**, yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. **Keberlanjutan (*Sustainability*)**, yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.
3. **Kesejahteraan (*Prosperity*)**, yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

Tujuan

Tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah :

Kedaulatan (*Sovereignty*), yakni :

1. Meningkatkan pengawasan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan
2. Mengembangkan sistem perkarantina ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan

Keberlanjutan (*Sustainability*), yakni :

3. Mengoptimalkan pengelolaan ruang laut, konservasi dan keanekaragaman hayati laut
4. Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
5. Meningkatkan daya saing dan sistem logistik hasil kelautan dan perikanan

Kesejahteraan (*Prosperity*), yakni :

6. Mengembangkan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
7. Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan

Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh KKP sebagai suatu *outcome/ impact* dari beberapa program yang dilaksanakan. Dalam penyusunannya, KKP menjabarkan 3 misi yakni **“Kedaulatan”**, **“Keberlanjutan”**, dan **“Kesejahteraan”** dan menggunakan pendekatan metoda *Balanced Scorecard (BSC)* yang dibagi dalam empat perspektif, yakni *stakeholders perspective*, *customer perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth perspective*, sebagai berikut:

1. **Stakeholders Prespective**

Menjabarkan misi “Kesejahteraan”, maka sasaran strategis pertama (SS-1) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP”, dengan Indikator Kinerja :

- a. Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dari 40,5 pada tahun 2015 menjadi 51 pada tahun 2019.
- b. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Perikanan dari 7% pada tahun 2015 menjadi 12% pada tahun 2019.

2. **Customer Perspective**

Menjabarkan misi “Kedaulatan”, maka sasaran strategis kedua (SS-2) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan SDKP”, dengan Indikator Kinerja :

- a. Persentase Kepatuhan (*Compliance*) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku, dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019.
- b. Jumlah pulau-pulau kecil yang mandiri dari 5 pulau pada tahun 2015 menjadi 31 pulau pada tahun 2019.

Selanjutnya, menjabarkan misi “Keberlanjutan”, maka sasaran strategis ketiga (SS-3) yang akan dicapai adalah “Terwujudnya pengelolaan SDKP

yang partisipatif, bertanggung jawab dan berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja :

- a. Nilai Pengelolaan Wilayah Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan dari 0,20 pada tahun 2015 menjadi 0,65 pada tahun 2019.
- b. Nilai Peningkatan Ekonomi Kelautan dan Perikanan, dari 0,59 pada tahun 2015 menjadi 1,0 pada tahun 2019.
- c. Produksi perikanan, dari 24,12 juta ton pada tahun 2015 menjadi 39,97 juta ton pada tahun 2019.
- d. Produksi garam rakyat, dari 3,3 juta ton pada tahun 2015 menjadi 4,5 juta ton pada tahun 2019.
- e. Nilai ekspor hasil perikanan, dari USD 5,86 miliar pada tahun 2015 menjadi USD 9,54 miliar pada tahun 2019.
- f. Konsumsi ikan, dari 40,9 kg/kapita/thn pada tahun 2015 menjadi 54,49 kg/kapita/thn pada tahun 2019.
- g. Persentase peningkatan PNBPD dari sektor KP dari 5% pada tahun 2015 menjadi 15% pada tahun 2019.

3. **Internal Process Perspective**

Sasaran strategis pada perspektif ini adalah merupakan proses yang harus dilakukan oleh KKP, yakni :

- a. Sasaran strategis keempat (SS-4) yang akan dicapai adalah “Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif”, dengan Indikator Kinerja Indeks efektivitas kebijakan pemerintah, dari 6 pada tahun 2015 menjadi 8 pada tahun 2019.
- b. Sasaran strategis kelima (SS-5) yang akan dicapai adalah Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan”, dengan Indikator Kinerja Efektivitas Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan, dari 70% pada tahun 2015 menjadi 95% pada tahun 2019.
- c. Sasaran strategis keenam (SS-6) yang akan dicapai adalah Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif”, dengan Indikator Kinerja:
 - Persentase penyelesaian tindak pidana KP secara akuntabel dan tepat waktu dari 56,6% pada tahun 2015 menjadi 83,36% pada tahun 2019.
 - Tingkat Keberhasilan Pengawasan di Wilayah Perbatasan dari 70% pada tahun 2015 menjadi 87% pada tahun 2019.

4. **Learning and Growth Perspective (input)**

Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya proses untuk menghasilkan *output* dan *outcome* KKP. Terdapat 4 sasaran strategis yang akan dicapai yakni :

- a. Sasaran strategis ketujuh (SS-7) yakni “Terwujudnya Aparatur Sipil Negara (ASN) KKP yang Kompeten, Profesional, dan Berkepribadian”, dengan Indikator Kinerja Indeks Kompetensi dan Integritas dari 65 pada tahun 2015 menjadi 85 pada tahun 2019.
- b. Sasaran strategis kedelapan (SS-8) yakni “Tersedianya Manajemen Pengetahuan yang Handal, dan Mudah Diakses”, dengan Indikator

Kinerja Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dari 40% pada tahun 2015 menjadi 100% pada tahun 2019.

- c. Sasaran strategis kesembilan (SS-9) yakni “Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima”, dengan Indikator Kinerja Utama nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP dari BB pada tahun 2015 menjadi AA pada tahun 2019.
- d. Sasaran strategis kesepuluh (SS-10) yakni “Terkelolanya Anggaran Pembangunan secara Efisien dan Akuntabel”, dengan Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran KKP dari Baik pada tahun 2015 menjadi Sangat Baik pada tahun 2019 dan Opini BPK-RI atas Laporan Keuangan KKP Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

1.4. TELAAHAN RTRW DAN KLHS

1.4.1. Telaahan RTRW

Kebijakan pembangunan kewilayahan di Jawa Tengah tidak terlepas dari kebijakan kewilayahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah. Kebijakan kewilayahan tersebut merupakan hasil telaah terhadap struktur ruang wilayah yang telah disepakati bersama oleh seluruh *stakeholders* terkait pembangunan sektor Kelautan dan Perikanan di Jawa Tengah. Hal tersebut sekaligus sebagai upaya menjaring isu-isu lingkungan hidup strategis sebagai bahan penyusunan program kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Jawa Tengah.

RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Penyusunan revisi perda RZWP-3-K harus diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi. Rencana Tata Ruang Wilayah dalam UU Nomor 26 Tahun 2007 termasuk dalam Rencana Umum Tata Ruang yang secara hirarki terdiri dari RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kab/Kota.

Secara garis besar, telaah terhadap RTRW mengacu pada 2 (dua) kelompok besar, yaitu: (1) Rencana Sistem Pusat Kegiatan, dan (2) Rencana Sistem Jaringan. Tiap-tiap kelompok tersebut akan diuraikan menjadi rencana struktur-struktur ruang dan akan ditelaah mengenai kondisi struktur ruang saat ini, indikasi program pemanfaatan ruang pada periode perencanaan berkenaan, pengaruh rencana struktur ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Jawa Tengah, serta arahan lokasi pengembangan pelayanannya dalam struktur kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Jawa Tengah. Telaah terhadap Struktur Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah terkait RTRW diuraikan pada tabel 3.3.

Tabel 3.3. Hasil Telaahan Struktur Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Jateng	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Jateng
1	Rencana Sistem Pusat Kegiatan	Sistem pusat-pusat kegiatan dan pertumbuhan wilayah pusat kegiatan Perikanan dan Kelautan di kabupaten dan kota pesisir	1. Perkotaan Semarang-Kendal-Demak dan Perkotaan Cilacap sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) 2. Kebumen, Kota Pekalongan, Kota Tegal sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) 3. Kebumen, Kota Pekalongan, Kota Tegal sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) 4. Purworejo, Wonogiri, Rembang, Pati, Juwana, Tayu, Jepara, Demak, Kendal, Batang, Wiradesa, Comal, Pemalang, Brebes Sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	1. Pengembangan Kawasan Perikanan Budidaya dan Tangkap 2. Pengembangan Kawasan Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan 3. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 4. Pengembangan Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Program Kelautan dan Perikanan 5. Peningkatan Perluasan Usaha dan koordinasi Kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan	Seksi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan Dan Kenelayanan Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan, Kapal Perikanan Dan Alat Penangkapan Ikan Seksi Kepelabuhan Perikanan Seksi Produksi Perikanan Budidaya Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya Seksi Bina Mutu dan Diversifikasi Produk Seksi Pengembangan Usaha dan Logistik

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Jateng	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Jateng
		Pusat-pusat kegiatan perikanan dan kelautan di tiap tiap pelabuhan perikanan yang menjadi potensi wilayah, sebagai embrio perkembangan wilayah pesisir pada masing-masing Kabupaten/Kota Pesisir di Jawa Tengah.	1. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) sebanyak 1 buah yaitu PPS Cilacap di Kabupaten Cilacap. 2. Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) sebanyak 1 buah yaitu PPN Pekalongan di Kota Pekalongan. 3. Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) sebanyak 10 buah yaitu meliputi & 1 PPI : a. PPP Tegalsari (Kota Tegal) b. PPP Asemboyong (Kab. Pemalang) c. PPP Wonokerto (Kab. Pekalongan) d. PPP Klidang Lor (Kab. Batang) e. PPP Tawang (Kab. Kendal) f. PPP Morodemak (Kab. Demak) g. PPP Karimunjawa (Kab. Jepara) h. PPP Bajomulyo (Kab. Pati)	1. Peningkatan Kualitas Hasil Tangkapan 2. Pengembangan Sistem Kerja Pelabuhan Perikanan Pantai Jawa Tengah 3. Pengembangan dan Pengelolaan PPP Jawa Tengah 4. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan 5. Optimalisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan 6. Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap 7. Revitalisasi Perikanan Tangkap dan Statistik Perikanan Tangkap	Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan Dan Kenelayanan Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan, Kapal Perikanan Dan Alat Penangkapan Ikan Seksi Kepelabuhan Perikanan

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Jateng	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Jateng
			i. PPP Tasik Agung (Kab. Rembang). j. PPP Logending (Kab. Kebumen) k. PPI Larangan (Kab. Tegal)		
2	Rencana Sistem Jaringan	Rencana Pengembangan Jaringan Jalan Raya dan Kereta api untuk mengakomodasikan kegiatan di wilayah pesisir	1. jalan arteri primer meliputi : Perbatasan Jawa Barat - Tegal - Pekalongan - Semarang - Kudus- Pati - Perbatasan Jawa Timur, Perbatasan Jawa Barat-Cilacap - Kebumen - Perbatasan Yogyakarta, Jalan lingkaran Tegal, Pekalongan, Brebes, Pemalang - Pekalongan, dan Ruas Baru metropolitan Bregasmalang 2. jalan Strategis Nasional terdiri atas : Jalan di sisi pantai selatan dari Cilacap (Slarang - Ayah), Kebumen - Purworejo - Perbatasan Yogyakarta.	1. Pengembangan Kawasan Perikanan 2. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 3. Pengembangan Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Program Kelautan dan Perikanan 4. Peningkatan Perluasan Usaha dan koordinasi Kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan	Seksi Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Jateng	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Jateng
			3. Rencana Jaringan Jalan Kereta Api : Kebijakan pengembangan Rel ganda, meliputi jalur Semarang - Pekalongan - Tegal – Cirebon.		
		Rencana Pengembangan Alur Laut dan Migrasi Biota	1. peningkatan pengawasan pemanfaatan ruang Alur Laut untuk jalur pelayaran di seluruh pesisir pantai utara dan selatan Jawa Tengah;	1. Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan 2. Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan 3. Rehabilitasi Habitat Vital	Seksi Konservasi, Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Seksi Pengelolaan Ruang Laut Seksi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
			2. Kecamatan Pesisir di pantura dan pansela sebagai pemasangan dan pemanfaatan pipa/kabel bawah laut		
			3. Untuk migrasi biota secara khusus, seluruh pesisir pantai selatan dan utara sebagai inventarisasi dan pemanfaatan migrasi biota laut		

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Jateng	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Jateng
		Rencana Pengembangan Prasarana Transportasi Laut	1. Optimasi dan pengembangan Pelabuhan utama Tanjung Emas di Kota Semarang dan Tanjung Intan di Kabupaten Cilacap.	1. Peningkatan Kualitas Hasil Tangkapan 2. Pengembangan Sistem Kerja Pelabuhan Perikanan Pantai Jawa Tengah 3. Pengembangan dan Pengelolaan PPP Jawa Tengah	Seksi Pengelolaan Sumber Daya Ikan Dan Kenelayanan Seksi Pengendalian Penangkapan Ikan, Kapal Perikanan Dan Alat Penangkapan Ikan Seksi Kepelabuhan Perikanan
			2. Optimasi dan pengembangan Pelabuhan pengumpul Juwana di Kabupaten Pati, pelabuhan Batang di Kabupaten Batang dan Pelabuhan Tegal di Kota Tegal.	4. Pemberdayaan Masyarakat Nelayan 5. Optimalisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan 6. Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap 7. Revitalisasi Perikanan Tangkap dan Statistik Perikanan Tangkap	
			3. Optimasi dan pengembangan Pelabuhan pengumpan meliputi Pelabuhan Lasem di Kabupaten Rembang, Pelabuhan Rembang di Kabupaten Rembang, Pelabuhan Jepara di Kabupaten Jepara, Pelabuhan Karimunjawa di Pulau Karimunjawa, Pelabuhan Pekalongan di Kota Pekalongan,		

No	Rencana Struktur Ruang	Struktur Ruang Saat Ini	Indikasi Program Pemanfaatan Ruang pada Periode Perencanaan Berkenaan	Pengaruh Rencana Struktur Ruang terhadap Kebutuhan Pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Jateng	Arahan Lokasi Pengembangan Pelayanan Dinas Kelautan Dan Perikanan Jateng
			Pelabuhan Wonokerto di Kabupaten Pekalongan, Pelabuhan Pemalang di Kabupaten Pemalang dan Pelabuhan Brebes di Kabupaten Brebes.		

1.4.2. Telaahan KLHS

Analisis/telaah KLHS dilakukan untuk menganalisis pengaruh dan mitigasi dampak indikasi program prioritas renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 2013-2018. Analisis/telaahan KLHS ini secara rinci disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4. Deskripsi Kajian Pengaruh dan Mitigasi Dampak Indikasi Program Prioritas Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah 2013-2018

No	Indikasi Program	Dampak	Rumusan		Rekomendasi
			Mitigasi	Alternatif	
1	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	(-)Menimbulkan kerusakan lingkungan jika alat penangkapan ikan yang digunakan tidak ramah lingkungan, (-)Pada keg. Pelabuhan perikanan berpotensi menimbulkan abrasi akibat perubahan arus laut. (-)Pencemaran lingkungan timbul akibat penggunaan bahan yang tidak ramah lingkungan. (-)Pada keg. Pelabuhan perikanan, di dermaga berpotensi menimbulkan pencemaran air yang disebabkan oleh limbah domestik hasil olahan ikan.	1. Penggunaan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan antara lain memiliki kriteria sebagai berikut: a. Memiliki selektifitas yang tinggi b. Hasil tangkapan sampingan yang rendah c. Tidak bersifat destruktif/ merusak lingkungan d. Mempertahankan keanekaragaman hayati (<i>biodiversity</i>) 2. Fasilitasi pembangunan IPAL 3. Kawasan pelabuhan perikanan terpadu dengan industri pengolahan ikan 4. Penegakan hukum melalui pengawasan melekat oleh instansi terkait dan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) 5. Penempatan/pemasangan pemecah ombak	1. Penentuan zona penangkapan ikan	■ Program Pengembangan Perikanan Tangkap dilakukan dengan penggunaan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan di zona yang telah ditetapkan. ■ Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang laut
2	Program Pengembangan	(-)Peningkatan kerusakan lingkungan karena	1. Pengoperasian IPAL terhadap buangan kegiatan budidaya ikan sebelum dibuang	1. Menetapkan kawasan budidaya perikanan	● Program Pengembangan Perikanan Budidaya

No	Indikasi Program	Dampak	Rumusan		Rekomendasi
			Mitigasi	Alternatif	
	Perikanan Budidaya	kegiatan alih fungsi lahan. (-) Pencemaran lingkungan akibat buangan yang dihasilkan dari kegiatan budidaya.	ke badan air (lingkungan). 2. Implementasi <i>good aquaculture practices</i> (cara budidaya ikan yang baik dan benar) 3. Peningkatan teknologi budidaya ikan	2. Menetapkan zonasi budidaya	memperhatikan cara pembudidayaan ikan yang baik dengan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang sinergis dengan lingkungannya • Memelihara kualitas dan fungsi lingkungan hidup, serta meningkatkan perbaikan pengelolaan sumber daya alam, dan penataan ruang • Monitoring kualitas lingkungan
3	Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan	(-) Pencemaran dari limbah hasil pengolahan ikan (-) penggunaan bahan kimia berbahaya (formalin, boraks, H ₂ O ₂ dan lain-lain)	1. Pembangunan dan pengawasan instalasi pengolahan limbah 2. Program pembinaan Unit Pengolahan Ikan (UPI) tradisional 3. Penerapan <i>Hazard Analysis Critical Control Points</i> (HACCP)		Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan proses dari produksi distribusi dan pemasarannya melalui Penerapan <i>Hazard Analysis Critical Control Points</i> (HACCP)

Analisis/telaah KLHS tidak hanya dilakukan pada indikasi program prioritas saja, akan tetapi dilakukan juga pada seluruh indikasi program dan kegiatan yang terkait dengan isu-isu pembangunan berkelanjutan di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Secara rinci mengenai telaahan ini akan disajikan pada Lampiran 1.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Berdasarkan identifikasi permasalahan berdasarkan tupoksi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah; telaah visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Tengah; telaah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan telaah RTRW dan KLHS Jawa Tengah, maka berikut ini adalah isu-isu strategis yang telah ditetapkan :

1. Kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi perikanan (tangkap dan budidaya), sistem distribusi dan jaminan keamanan pangan;
2. Peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar ikan);
3. Tingkat konsumsi ikan di Jawa Tengah masih dibawah rata-rata nasional;
4. Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan tangkap dan budidaya;
5. Daya dukung ekosistem perairan yang berimbas pada penurunan produksi perikanan;
6. Pengelolaan tata ruang laut dan sumberdaya ikan di Jawa Tengah.

Kuantifikasi, pembobotan atau skoring terhadap isu-isu strategis diperlukan untuk menentukan prioritas penanganan terhadap isu tersebut. Kegiatan kuantifikasi dimulai dengan penentuan skor kriteria penentuan isu-isu strategis, kemudian dilakukan skoring terhadap masing-masing isu strategis, dan terakhir adalah penentuan nilai rata-rata untuk masing-masing isu strategis. Uraian kegiatan kuantifikasi sbb:

Tabel 3.5. Skor Kriteria Penentuan Isu-isu Strategis

No	Kriteria*)	Bobot
1	Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran Renstra KKP atau Renstra provinsi/kabupaten/kota	20
2	Merupakan tugas dan tanggung jawab Dinas Kelautan Dan Perikanan Jawa Tengah	10
3	Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik	20
4	Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah	10
5	Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani	15
6	Prioritas janji politik yang perlu diwujudkan	25
	Total	100

Tabel 3.6. Nilai Skala Kriteria

No	Isu Strategis	Nilai Skala Kriteria ke-						Total Skor
		1	2	3	4	5	6	
1	Kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi perikanan (tangkap dan budidaya), sistem distribusi dan jaminan keamanan pangan	20	10	20	10	10	20	90
2	Peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar ikan)	20	10	20	10	10	15	85
3	Tingkat konsumsi ikan di Jawa Tengah masih dibawah rata-rata nasional	20	10	20	10	10	10	80
4	Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan tangkap dan budidaya	20	10	20	10	10	15	85
5	Daya dukung ekosistem perairan yang berimbas pada penurunan produksi perikanan	20	10	20	10	5	10	75
6	Pengelolaan tata ruang laut dan sumberdaya ikan di Jawa Tengah	15	10	20	5	5	15	70

Tabel 3.7. Rata-Rata Skor Isu-Isu Strategis

No.	Isu-Isu Strategis	Total Skor	Rata-Rata skor
1	Kedaulatan pangan melalui peningkatan produksi perikanan (tangkap dan budidaya), sistem distribusi dan jaminan keamanan pangan	90	11,25
2	Peningkatan pendapatan pelaku usaha perikanan (nelayan, pembudidaya, pengolah, dan pemasar ikan)	85	10,63
3	Ketersediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan perikanan tangkap dan budidaya	85	10,63
4	Tingkat konsumsi ikan di Jawa Tengah masih dibawah rata-rata nasional	80	10,00
5	Daya dukung ekosistem perairan yang berimbas pada penurunan produksi perikanan	75	9,38
6	Pengelolaan tata ruang laut dan sumberdaya ikan di Jawa Tengah	70	8,75



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
- 4.2. Strategi dan Kebijakan

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

Penjabaran tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah pada tahun 2013-2018 disajikan pada tabel 4.2 dan 4.3.

Tabel 4.1. Tujuan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2013-2018

Tujuan	Unit Penanggung Jawab
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan	BPT, BPB, BKPP
Meningkatkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan	Sekretariat
Meningkatkan perencanaan pengembangan sektor kelautan dan perikanan	Sekretariat
Meningkatkan kualitas database sektor kelautan dan perikanan	Sekretariat, BPT, BPB, BPUKP, BKPP
Meningkatkan jumlah produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	BPT, BPB, PPP, BBIAT, BBIAPL
Meningkatkan ketersediaan protein hewani yang berasal dari sumberdaya ikan	BPT, BPB, BPUKP
Meningkatkan hasil perikanan yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan produk hasil perikanan	BPUKP, BP2MHP
Meningkatkan jumlah dan ragam produk olahan serta ekspor produk perikanan	BPUKP, BP2MHP, BPKSDKP
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia penyuluh perikanan	BPUKP, UPSDMKP
Meningkatkan keterampilan dan keahlian nelayan pembudidaya dan pengolah/pemasar ikan	BPUKP, UPSDMKP
Meningkatkan sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	PPP, BBIAT, BBIAPL, BP2MHP, BPKSDKP, UPSDMKP

Tujuan	Unit Penanggung Jawab
Menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	BKPP
Mencegah kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	BKPP
Meningkatkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	BKPP
Meningkatkan identifikasi potensi dan pendayagunaan pulau-pulau kecil	BKPP
Meningkatkan peran masyarakat pengawas dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	BPT, PPP, BKPP, BPKSDKP
Meningkatkan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta penegakkan peraturan kelautan dan perikanan	BPT, PPP, BPKSDKP

Keterangan :

- 1 BPT : Bidang Perikanan Tangkap
- 2 BPB : Bidang Perikanan Budidaya
- 3 BKPP : Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan
- 4 BPUKP : Bidang Usaha Kelautan dan Perikanan
- 5 PPP : Pelabuhan Perikanan Pantai
- 6 BBIAT : Balai Perbenihan dan Budidaya Air Tawar
- 7 BBIAPL : Balai Perbenihan dan Budidaya Air Payau dan Laut
- 8 BP2MHP : Badan Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan
- 9 BPKSDKP : Balai Pengawasan dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- 10 UPSDMKP : Unit Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan
- 11 SEKRETARIAT : Sekretariat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Tabel 4.2. Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2013-2018

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Th.2013	Target Capaian Sasaran					Unit Penanggung Jawab
					Tahun-2014	Tahun-2015	Tahun-2016	Tahun-2017	Tahun-2018	
1	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan	Meningkatnya pendapatan nelayan	Pendapatan nelayan meningkat sebesar 8,47%/Tahun (sat : Rp/Kap/Th)	10,765,779.48	11.566.477,04	12.546.157,65	13.608.817,2	11,718,192.54	12,710,723.45	BPT
		Meningkatnya pendapatan pembudidaya ikan	Pendapatan pembudidaya ikan meningkat sebesar 5,87 %/Tahun (sat : Rp/Kap/Th)	23,160,988.43	16,339,722.52	17,298,864.23	18,314,307.57	32,587,070.28	35,845,777.31	BPB
		Meningkatnya Produksi garam	Produksi Garam (ton)					694,575	729,304	
		Meningkatnya pendapatan taruna pesisir	Pendapatan taruna pesisir meningkat sebesar 4,06%/Tahun (sat : Rp/Kap/Th)	4.133.005,79	4.300.805,82	4.475.418,54	4.657.120,53	9,000,000	10,000,000	BKPP
		Meningkatnya pendapatan wanita pesisir	Pendapatan wanita pesisir meningkat sebesar 3,9 %/Tahun	2.742.951,61	2.849.926,73	2.961.073,87	3.076.555,75	6,800,000	7,600,000	BKPP
	Meningkatkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang kelautan dan perikanan	Meningkatnya pengelolaan, dan penyelenggaraan di bidang keuangan, umum kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas	Tercapainya pengelolaan dan, penyelenggaraan di bidang keuangan, umum kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas	Pengelolaan keuangan, adminisrasi kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tata laksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan : 12 bulan	12	12	12	12	12	SEKRETARIAT

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Th.2013	Target Capaian Sasaran					Unit Penanggung Jawab
					Tahun-2014	Tahun-2015	Tahun-2016	Tahun-2017	Tahun-2018	
	Meningkatkan perencanaan pengembangan sektor kelautan dan perikanan	Meningkatnya kualitas perencanaan program/kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan	Tersedianya dokumen perencanaan, meliputi Renja, Lakip, Laptah, RKA, Renstra masing-masing sebanyak 1 dokumen.	a. RENJA : 1 dok	1	1	1	1	1	SEKRETARIAT
				b. LAKIP : 1 dok	1	1	1	1	1	SEKRETARIAT
				c. LAPTAH : 1 dok	1	1	1	1	1	SEKRETARIAT
				d. RKA : 1 dok	1	1	1	1	1	SEKRETARIAT
				e. RENSTRA : 1 dok	1	1	1	1	1	SEKRETARIAT
	Meningkatkan kualitas database sektor kelautan dan perikanan	Tersedianya data dan informasi di sektor kelautan dan perikanan yang berkualitas	Tercapainya ketersediaan buku statistik perikanan tangkap, perikanan budidaya, P2HP, dan KP3K, masing-masing sebanyak 75 buah.	a. Statistik Perikanan Tangkap : 75 buah	75	75	75	75	75	SEKRETARIAT
				b. Statistik Perikanan Budidaya : 75 buah	75	75	75	75	75	SEKRETARIAT
				c. Statistik P2HP : 75 buah	75	75	75	75	75	SEKRETARIAT
				d. Statistik KP3K : 75 buah	75	75	75	75	75	SEKRETARIAT
2	Meningkatkan jumlah produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Tercapainya peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 3,44%/tahun	Produksi Perikanan Tangkap : 286.797,18 ton;	296.663,00	306.868,21	317.424,48	283,714.75	293,474.54	BPT
		Terlaksananya modernisasi nelayan kecil	Terpenuhinya sarana penangkapan ikan yang modern bagi nelayan kecil	a. Jml GPS : 15 unit;	15	25	35	45	55	BPT
				b. Jml Fish Finder : 15 unit;	15	25	35	45	55	BPT
				c. Jml Cool Box : 6 paket;	10	15	25	35	45	BPT
				d. Jml Mesin : 11 unit	10	25	35	45	55	BPT
				e. Jml Solar cell: 20 unit	20	30	40	50	60	BPT
				f. Jml Lampu celup dalam air: 20 unit	20	30	40	50	60	BPT
				g. Jml Alat Tangkap Ramah Lingkungan: 6 paket	9	25	35	45	55	BPT
		Meningkatnya produksi	Tercapainya peningkatan produksi	a. Produksi Perikanan Budidaya :	288,084.05	309,949.63	333,474.81	463,123.90	509,436.29	BPB
				315,458.67 Ton;						

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Th.2013	Target Capaian Sasaran					Unit Penanggung Jawab
					Tahun-2014	Tahun-2015	Tahun-2016	Tahun-2017	Tahun-2018	
		perikanan budidaya	perikanan budidaya sebesar 7,59%/tahun	b. Produksi Udang vanamei : 3.695 Ton;	292.609,21	317.457,43	342.305,65	367.153,87	392.002,09	BPB
				c. Produksi Minapadi : 2.229 Ton;	2.435,85	2.642,70	2.849,55	3.056,40	3.263,26	BPB
		Terlaksananya sertifikasi CBIB.	Tercapainya sertifikasi CBIB	a. Jml bersertifikasi CBIB : 200 unit;	200	200	200	200	200	BPB
		Terlaksananya upaya untuk mendorong Kab/Kota memiliki dokumen perencanaan (materplan dan DED) minapolitan budidaya ikan.	Tercapainya pertemuan koordinasi pelaksanaan minapolitan di Jawa tengah	a. Pertemuan koordinasi pelaksanaan minapolitan di Jawa Tengah : 1 kali.	2	2	2	2	2	BPB
		Meningkatnya produk benih berkualitas unggul melalui pengembangan broodstock center Nila, Lele, Mas dan Gurami di Balai Budidaya Ikan Air Tawar (BBIAT) dan Balai Budidaya Ikan Air Payau - Laut (BBIAPL)	Tercapainya peningkatan produk benih berkualitas unggul melalui pengembangan broodstock center Nila, Lele, Mas dan Gurami di Balai Budidaya Ikan Air Tawar (BBIAT)	Produksi Benih Unggul di BPBIAT Muntilan :	4.445.552	4.823.066	5.200.580	5.578.094	5.955.608	BPB-BBIAT
				a. Nila Merah :						
				b. Lele : 446.513 ekor;	487.949	529.386	570.822	612.259	653.695	BPB-BBIAT
				c. Gurami : 120.628 ekor;	131.822	143.017	154.211	165.405	176.599	BPB-BBIAT
				d. Mas : 550.148 ekor;	601.202	652.255	703.309	754.363	805.417	BPB-BBIAT
			Tercapainya peningkatan produk benih berkualitas unggul melalui pengembangan broodstock center udang vannamei dan windu di Balai Budidaya Ikan Air Payau - Laut (BBIAPL)	Produksi Benih Unggul di BBIAPL :	756.000.000	831.600.000	914.760.000	1.006.236.000	1.217.545.560	BPB-BBIAPL
				a. Udang Vannamae : ekor ;						
				b. Udang Windu: 554.989.750 ekor	610.488.725	671.537.598	738.691.357	812.560.493	893.816.542	BPB-BBIAPL
		Meningkatnya produksi	Terlaksananya monitoring, pemantauan	Kunjungan sebanyak 12 kali	12	12	12	12	12	BPB

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Th.2013	Target Capaian Sasaran					Unit Penanggung Jawab
					Tahun-2014	Tahun-2015	Tahun-2016	Tahun-2017	Tahun-2018	
	perikanan budidaya	perikanan budidaya	hama dan penyakit ikan di Jawa Tengah (35 Kab/kota)							
			Terlaksananya CBF (<i>Culture Base Fisheries</i>) dan Penebaran Benih Ikan di Jawa Tengah	Pelaksanaan CBF dan Penebaran sebanyak 2 kali	2	2	2	2	2	BPB
			Terlaksananya kegiatan pemantauan uji kualitas air di perairan Budidaya	Pelaksanaan kegiatan sebanyak 1 kali	1	1	1	1	1	BPB
			Terlaksananya kegiatan validasi statistik perikanan budidaya dalam bentuk data data yg valid	Pelaksanaan kegiatan sebanyak 3 kali	3	3	3	3	3	BPB
			Terlaksananya kegiatan jaringan informasi kesehatan ikan dan lingkungan	Pelaksanaan kegiatan sebanyak 3 kali	3	3	3	3	3	BPB
			Peningkatan distribusi calon induk unggul hasil <i>Broodstock Center</i> dan produksi benih unggul BBIAT Muntinan;	Tercapainya distribusi Induk Unggul hasil <i>Broodstock Center</i> BPBIAT Muntinan :						
	Pelaksanaan Sertifikasi CPIB.	Peningkatan distribusi calon induk unggul hasil <i>Broodstock Center</i> dan produksi benih unggul BBIAT Muntinan;	a. Nila : 100 paket;		100	100	100	100	100	BPB-BBIAT
			b. Lele : 200 paket;		200	200	200	200	200	BPB-BBIAT
			c. Gurami : 30 paket;		30	30	30	30	30	BPB-BBIAT
			d. Karper : 30 paket		-	30	30	30	30	BPB-BBIAT
			a. Jml UPR/HSRT bersertifikat CPIB : 10 unit;		10	10	10	10	10	BPB-BBIAT- BBIAPL
		Pelaksanaan Sertifikasi CPIB.	b. Jml BBI yang sudah bersertifikat CPIB : 5 unit.		5	5	5	5	5	BPB-BBIAT- BBIAPL

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Th.2013	Target Capaian Sasaran					Unit Penanggung Jawab
					Tahun-2014	Tahun-2015	Tahun-2016	Tahun-2017	Tahun-2018	
	Meningkatkan ketersediaan protein hewani yang berasal dari sumberdaya ikan	Meningkatnya konsumsi makan ikan di Jawa Tengah	Tercapainya peningkatan konsumsi makan ikan di Jawa Tengah sebesar 4,86%/tahun yaitu peningkatan sebesar 0,93 kg/kap/th.	Tk.Konsumsi makan ikan Th.2013 ; 17,82 kg/kapita/th	18.69	19.59	20.55	21.55	22.59	BPUKP
		Meningkatnya akses pasar domestik melalui : Safari Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN), Gelar Produk Perikanan	Terselenggaranya Safari Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN) dan Gelar Produk Perikanan	a. Safari Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN) : 4 kali;	4	4	4	4	4	BPUKP
				b. Gelar Produk Perikanan : 10 kali;	10	10	10	10	10	BPUKP
	Meningkatkan mutu dan keamanan produk hasil perikanan	Terlaksananya Pembinaan Pasar Ikan Tradisional dan UMKM	Tercapainya Pembinaan pasar ikan tradisional dan UMKM dan Apresiasi Pembinaan Mutu Daerah	a. Pembinaan pasar ikan tradisional dan UMKM : 37 kali.	37	37	37	37	37	BPUKP
				b. Apresiasi Pembinaan Mutu Daerah : 1 kali	1	1	1	1	1	BPUKP
	3	Meningkatkan jumlah dan ragam produk olahan yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta ekspor produk perikanan	Meningkatnya produk dan nilai ekspor produk hasil perikanan	Tercapainya peningkatan produk dan nilai ekspor produk hasil perikanan	a. Ekspor produk hasil kelautan dan perikanan : 22,898.18 ton;	25,093.46	25,770.99	26,466.80	27,181.41	27,915.31
b. Nilai ekspor produk hasil kelautan dan perikanan : US\$ 84.241.831,73					86.769.087	89.372.159	92.053.324	94.814.924	97.659.371	BPUKP
c. Penerbitan sertifikat HC: 1.694 sertifikat					1.744	1.794	1.844	1.894	1.944	BPUKP
Meningkatnya jumlah UMKM pengolah, dan pemasar produk hasil perikanan			Tercapainya peningkatan jumlah UMKM pengolah, dan pemasar produk hasil perikanan	a. Jml UMKM pengolahan ikan : 8.880 unit;	8.915	8.950	8.985	9.020	9.055	BPUKP
				b. Jml UMKM pemasaran : 55.468 unit;	54.503	55.538	55.573	55.608	55.643	BPUKP

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Th.2013	Target Capaian Sasaran					Unit Penanggung Jawab
					Tahun-2014	Tahun-2015	Tahun-2016	Tahun-2017	Tahun-2018	
		Terlaksananya pembinaan UMKM pengolah dan pemasar produk hasil perikanan	Terselenggaranya pembinaan UMKM pengolah dan pemasar produk hasil perikanan	Jml UMKM yang dibina 50 unit	150	150	150	150	150	BPUKP
		Meningkatnya jumlah produk olahan hasil perikanan	Tercapainya peningkatan jumlah produk olahan hasil perikanan	Jml produk olahan hasil perikanan : 180.449,63 ton/th.	182.254,13	184.076,67	185.917,43	187.776,61	189.654,37	BPUKP
	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia penyuluh perikanan	Terpenuhinya penyuluh perikanan bersertifikat	Diusulkannya penyuluh perikanan untuk memperoleh sertifikat penyuluh	Jml penyuluh perikanan yang diusulkan untuk memperoleh sertifikat penyuluh : 59 org	50	50	50	50	50	BPUKP
	Meningkatkan keterampilan dan keahlian nelayan, pembudidaya dan pengolah/pemasar ikan	Terlaksananya kegiatan pelatihan bagi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan	Terselenggaranya kegiatan pelatihan bagi nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar ikan	a. Jml kegiatan pelatihan bagi nelayan : 5 kegiatan	5	5	5	5	5	BPUKP
				b. Jml kegiatan pelatihan bagi pembudidaya ikan : 5 kegiatan	5	5	5	5	5	BPUKP
				c. Jml kegiatan pelatihan bagi pengolah dan pemasar ikan : 5 kegiatan	5	5	5	5	5	BPUKP
	Meningkatkan sarana dan prasarana Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Terlaksananya Pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)	Tercapainya Pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan Pangkalan Pendaratan Ikan	PPP : 1.PPP Tasikagung 2.PPP Bajomulyo 3.PPP Morodemak 4.PPP Karimunjawa 5.PPP Tawang 6.PPP Klidang Lor 7.PPP Wonokerto 8.PPP Asemboyong 9.PPP Tegalsari 10. PPP Logending 11. PPI Larangan	9	9	9	11	11	BPT, 10 PPP, 1 PPI

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Th.2013	Target Capaian Sasaran					Unit Penanggung Jawab
					Tahun-2014	Tahun-2015	Tahun-2016	Tahun-2017	Tahun-2018	
		Terlaksananya pelayanan kepelabuhanan perikanan	Tercapainya penyediaan data dan informasi di Pusat Informasi Pelabuhan Perikanan (PIPP) / Surat Persetujuan Berlayar (SPB)/Surat Keterangan Pendaratan Ikan (SKPi)/Surat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI)/cek fisik kapal	PPP : 1.PPP Tasikagung 2.PPP Bajomulyo 3.PPP Morodemak 4.PPP Karimunjawa 5.PPP Tawang 6.PPP Klidang Lor 7.PPP Wonokerto 8.PPP Asemdayong 9.PPP Tegalsari 10. PPP Logending 11. PPI Larangan	9	9	9	11	11	BPT, 10 PPP, 1 PPI
		Terlaksananya pengusulan SPDN baru	Tercapainya usulan SPDN baru kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan RI	Jml <i>Solar Packed Dealer</i> Nelayan (SPDN) yang diusulkan 5 unit.	10	10	10	10	10	BPT
		Terlaksananya pengadaan server untuk kartu BBM nelayan	Tercapainya pengadaan server untuk kartu BBM nelayan	Jml server untuk kartu BBM Nelayan	1	0	0	0	0	BPT
		Terlaksananya pengadaan dan pencetakan Kartu (BBM) nelayan	Terselenggaranya pengadaan dan pencetakan Kartu (BBM) nelayan	Pengadaan dan pencetakan Kartu (BBM) Nelayan : 0 buah	10.000	10.000	10.000	0	0	BPT
		Terlaksananya Pengembangan sarana dan prasarana UPTD Bidang Perikanan Budidaya	Tercapainya Pengembangan sarana dan prasarana UPTD Bidang Perikanan Budidaya	Balai Budidaya Ikan Air Tawar (BBIAT) dan Balai Budidaya Ikan Air Payau Laut (BBIAPL)	3	3	3	11	11	BBIAT, BBIAPL

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Th.2013	Target Capaian Sasaran					Unit Penanggung Jawab
					Tahun-2014	Tahun-2015	Tahun-2016	Tahun-2017	Tahun-2018	
		Terlaksananya kegiatan pengujian mutu, pengawasan pengolahan hasil perikanan dan sertifikasi mutu yang sudah terakreditasi SNI, ISO/IEC 17025.2008 dan memiliki analis pengujian dan inspektur mutu yang memiliki standar kompetensi	Tercapainya Pengembangan sarana dan prasarana Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (BP2MHP)	2 (dua) Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (BP2MHP); Semarang dan Pekalongan	3	3	3	2	2	BP2MHP Semarang, Pekalongan
4	Menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Terlaksananya pelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Tercapainya ketersediaan apartemen ikan, reservat perairan umum serta terlaksananya penebaran benih ikan di perairan umum dan laut serta bantuan alat tangkap ramah lingkungan	a. Jml apartemen ikan: 1 unit	1	2	3	3	3	BPT
				b. Jml reservat perairan umum 36 unit	8	8	8	11	11	BKPP
				c. Penebaran benih ikan perairan laut 10.000 ekor	6.000	6.000	8.000	12.000	12.000	BKPP, BPKSDKP
				d. Penebaran benih ikan di perairan umum 121.500 ekor	30.000	30.000	30.000	45.000	45.000	BKPP
	Mencegah kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Terlaksananya pencegahan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Tercapainya pencegahan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	a. Luas penanaman mangrove 8,08 Ha	7,61	15,13	8,26	8,38	8,5	BKPP, BPKSDKP
				b. Luas Terumbu Karang Buatan 17,28 Ha	5,4	5,4	7,99	6,03	6,48	BKPP, BPKSDKP
	Meningkatkan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Terlaksananya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Tercapainya rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Ketersediaan dokumen penataan ruang dan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sesuai UU Pengelolaan WP3K 100 %	50	75	100	100	100	BKPP, BPKSDKP
	Meningkatkan identifikasi	Terlaksananya identifikasi dan	Tercapainya identifikasi dan	Jumlah identifikasi pendayagunaan	2	2	2	2	2	BKPP, BPKSDKP

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal Th.2013	Target Capaian Sasaran					Unit Penanggung Jawab
					Tahun-2014	Tahun-2015	Tahun-2016	Tahun-2017	Tahun-2018	
	potensi dan pendayagunaan pulau-pulau kecil	pendayagunaan pulau-pulau kecil	pendayagunaan pulau-pulau kecil	pulau-pulau kecil : 3 Pulau						
	Meningkatkan peran masyarakat pengawas dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Terlaksananya pembinaan masyarakat pengawas dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Tercapainya pembinaan masyarakat pengawas dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	a. Jumlah POKMASWAS yang dibina 1 klp/th	20	20	20	20	20	BPT, BPKSDKP, BKPP
				b. Sosialisasi peraturan perundang-undangan : 5 kali;	10	10	10	10	10	BPT, BPKSDKP, BKPP
	Meningkatkan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta penegakkan peraturan kelautan dan perikanan	Terlaksananya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta penegakkan peraturan kelautan dan perikanan	Tercapainya pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta penegakkan peraturan kelautan dan perikanan	a. Jumlah operasi pengawasan : 5 kali	10	10	10	10	10	BPT, BPKSDKP, BKPP
				b. Jml penambahan PPNS Perikanan : 0 orang	3	3	3	3	3	BPT, BPKSDKP, BKPP

4.2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN JATENG

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, maka diperlukan suatu strategi dan kebijakan yang tepat. Berikut ini adalah beberapa strategi dan kebijakan yang ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah dalam Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah :

Tabel 4.3. Strategi dan Kebijakan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan

Strategi	Kebijakan
1. Pengembangan usaha perikanan budidaya sesuai komoditas unggulan yang diminati pasar dengan meningkatnya mutu ikan melalui penerapan Cara Budidaya Ikan yang Baik	1. Pembangunan perikanan budidaya, melalui: a. pengembangan kawasan perikanan yang sudah ada b. penetapan/pencanangan kawasan perikanan baru dengan mendorong Kab./Kota memiliki dokumen perencanaan (masterplan dan DED) kawasan budidaya ikan
	2. Pengembangan produk benih dan induk berkualitas unggul melalui: a. pengembangan <i>Broodstock Center</i> di BBIAT (Balai Budidaya Ikan Air Tawar) b. pemenuhan jaminan mutu dan keamanan benih dan induk ikan
	3. Peningkatan produksi perikanan budidaya, melalui: a. optimasi dukungan sarana dan prasarana pendukung yang diperlukan b. peningkatan kemampuan teknis pembudidaya ikan, terutama penerapan Cara Perbenihan Ikan yang Baik (CPIB) dan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) c. peningkatan produktivitas budidaya : <i>demfarm</i> udang vanamei, penerapan teknologi <i>biofloc</i> d. pengembangan Minapadi dan UGADI (Udang Galah dengan Padi) e. pengembangan pakan ikan mandiri berbahan baku lokal

2. Pengembangan dan pemasyarakatan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan, mendekatkan kepada daerah penangkapan ikan dengan pembuatan rumah/apartemen ikan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap	1. Peningkatan produksi perikanan tangkap, melalui: - peningkatan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan - pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap - pemberdayaan usaha perikanan tangkap skala kecil, antara lain melalui: pemberian alat bantu penangkapan ikan bagi nelayan kecil (GPS, <i>Fish Finder</i>, dan <i>solar cell</i>), pembuatan rumah /apartemen ikan, bantuan mesin tempel, bantuan alat tangkap ramah lingkungan, peralatan perbengkelan, dan cool box - pengembangan sarana dan prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) 2. Penerbitan Kartu (BBM) Nelayan dan peningkatan koordinasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dengan instansi terkait (Dinas ESDM, BPH Migas, Ditjen KP3K KKP RI, PERTAMINA, P.T Aneka Kimia Raya, dan HNSI) 3. Fasilitasi pembangunan SPDN (<i>Solar Packed Dealer Nelayan</i>) di pusat-pusat aktivitas nelayan 4. Meningkatkan kerjasama antar provinsi dan lintas sektoral dalam pengaturan nelayan andon
3. Pengembangan usaha pengolahan dan pemasaran yang masih tradisional dalam hal mutu produk sesuai dengan sistem jaminan mutu keamanan pangan guna pemenuhan kebutuhan dalam dan luar negeri, dengan tetap membina usaha pengolahan dan pemasaran modern	Optimalisasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, yang bertujuan untuk : (i) peningkatan produk yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan, teknologi, sanitasi dan higien agar memenuhi mutu ekspor; (ii) pemenuhan kebutuhan dalam negeri; (iii) peningkatan konsumsi ikan.
4. Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi habitat vital di laut/pesisir, peningkatan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat pesisir dalam menjaga kelestarian ekosistem/lingkungan melalui pembinaan, pelatihan dan sosialisasi peraturan perundangan yang berlaku	Rehabilitasi dan konservasi eksosistem vital di laut/pesisir baik dengan penanganan fisik maupun vegetasi serta meningkatnya pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat dalam menjaga kelestarian eksosistem /lingkungan

5. Pencegahan konflik antar nelayan dan meningkatnya peran Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) dalam pengawasan dan pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan, menumbuhkan kelompok-kelompok baru serta membantu sarana kelengkapan operasionalnya, dengan tetap melakukan pembinaan dan operasi pengawasan bersama aparat terkait	Pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan dengan memperbesar peran serta kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS)
6. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pelayanan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jawa Tengah	a. Kebijakan penyediaan data dan informasi sektor kelautan dan perikanan yang berkualitas
	b. Kebijakan peningkatan kualitas perencanaan program Dinas Kelautan dan Perikanan
	c. Kebijakan sertifikasi penyuluh perikanan



BAB V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif dalam rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 - 2018. Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan selama tahun 2013 – 2018 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah adalah sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
 - Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
2. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
 - Kegiatan Pengawasan, Pengendalian dan Pemulihan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
 - Kegiatan Peningkatan Pengembangan Balai Pengawasan dan Konservasi Wilayah Pantubar dan Pansela
 - Kegiatan Peningkatan Pengembangan Balai Pengawasan dan Konservasi Wilayah Pantutim
3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
 - Kegiatan Optimalisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan
 - Kegiatan Peningkatan Kualitas Hasil Tangkapan
 - Kegiatan Revitalisasi Perikanan Tangkap dan Statistik Perikanan Tangkap
 - Kegiatan Pengembangan Sistem Kerja Pelabuhan Perikanan Pantai Jawa Tengah
 - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana PPP Tasik Agung
 - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana PPP Bojomulyo
 - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana PPP Karimunjawa
 - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana PPP Morodemak
 - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana PPP Tawang
 - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana PPP Klidanglor
 - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana PPP Wonokerto
 - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana PPP Asemdayong
 - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana PPP Tegalsari
 - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana PPI Larangan
 - Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sarana Prasarana PPP Logending
 - Kegiatan Pengelola Sumber Daya Ikan dan Kenelayanan
 - Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan
 - Kegiatan Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap

4. Program Pengembangan Perikanan Budidaya

- Kegiatan Optimalisasi dan Pengembangan Karantina dan Kesehatan Ikan
- Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Tawar
- Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Perbenihan dan Budidaya Ikan Air Payau dan Laut
- Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Budidaya Ikan
- Kegiatan Pengelolaan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Ikan
- Kegiatan Pengelolaan Lingkungan dan Statistik Perikanan Budidaya
- Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Perbenihan Ikan
- Kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya Air Tawar
- Kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya Air Payau

5. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan

- Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan
- Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (BP2MHP) Pekalongan
- Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (LPPMHP) Cilacap
- Kegiatan Peningkatan Pelayanan Mutu Usaha Perikanan
- Kegiatan Peningkatan Perluasan Usaha dan Koordinasi Kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan
- Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Balai Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan (BP2MHP) Semarang
- Kegiatan Pengembangan Kawasan Perikanan
- Kegiatan Pengembangan Perencanaan dan Monitoring Evaluasi Program Kegiatan Kelautan dan Perikanan
- Kegiatan Peningkatan Pengembangan Unit Pengembangan Sumberdaya Manusia Kelautan Perikanan (UPSDM KP)

6. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

- Kegiatan Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- Kegiatan Rehabilitasi Habitat Vital
- Kegiatan Penyusunan Revisi Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Tengah

Tabel 5.1. Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Th.2013	Target Capaian Sasaran										KONDISI AKHIR		UNIT PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018					
						Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)		
Meningkatkan kesejahteraan nelayan	Meningkatkan pendapatan nelayan	Peningkatan pendapatan nelayan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP	Pendapatan nelayan meningkat sebesar 8,47%/th (Rp/ Kap/th)	10.765.779,48	11.566.477,04	11.125.000	12.546.157,65	11.703.000	13.608.817,20	13.786.540	11.718.192,54	17.258.175	12.710.723,45	20.205.315	12.710.723,45	74.078.0320	BPT	JATENG
Meningkatkan jumlah produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Meningkatkan produksi perikanan tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap		Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 3,44%/th (Ton)	243.694,50	296.663,00		306.868,21		317.424,48		283.714,75		293.474,54		293.474,54		BPT	JATENG
			Kegiatan Optimalisasi Alat Tangkap Ramah Lingkungan	Jumlah alat tangkap ramah lingkungan (paket)	6	9	250.000	25	350.000	35	450.000	45	833.175	55	1.500.000	169	3.383.175	BPT	JATENG
			Kegiatan Peningkatan Kualitas Hasil Tangkapan	Jml Cool Box (paket)	6	10	250.000	15	303.000	25	450.000	35	825.000	45	1.500.000	130	3.328.000	BPT	JATENG
			Kegiatan Revitalisasi Perikanan Tangkap dan Statistik Perikanan Tangkap	Jml GPS (unit)	15	15	1.100.000	25	1.350.000	35	2.500.000	45	3.250.000	55	3.555.315	175	11.755.315	BPT	JATENG
				Jml Fish Finder (unit)	15	15		25		35		45		55		175		BPT	JATENG
				Jml Mesin (unit)	11	10		25		35		45		55		169		BPT	JATENG
				Jml Solar Cell (unit)	20	20		20		30		40		50		150		BPT	JATENG
				Jml Lampu Celup dalam Air (unit)	20	20		30		40		50		60		200		BPT	JATENG
				Statistik Perikanan Tangkap (Buku)	75	75		75		75		75		75		375		BPT	JATENG
				Jumah Server untuk kartu BBM Nelayan (unit)	0	1		0		0		0		0		1		BPT	JATENG
				Pengadaan dan percetakan Kartu (BBM) Nelayan (buah)	0	10.000		10.000		10.000		0		0		30.000		BPT	JATENG

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Th.2013	Target Capaian Sasaran										KONDISI AKHIR		UNIT PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018					
						Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)		
				Pelaksanaan Kegiatan Validasi Statistik Perikanan Tangkap (kali)	1	1		1		1		1		1		5		BPT	JATENG
			Kegiatan Pengembangan Sistem Kerja Pelabuhan Perikanan Pantai Jawa Tengah	Pembinaan & Koordinasi Pengemb. PIPP (keg)	0	2	500.000	2	550.000	2	550.000	2	750.000	2	900.000	2	3.250.000	BPT	JATENG
				Forum Koordinasi PPP (keg)	4	3		3		3		3		3		3		BPT	JATENG
				Penyusunan WKOPP (keg)	2	1		1		1		1		1		5		BPT	JATENG
				Pembinaan & koordinasi dlm rangka Peningkatan Kesyahbandaran (keg)	1	2		2		2		2		2		2		BPT	JATENG
				Monitoraing dan Evaluasi PPP (keg)	0	1		1		1		1		1		1		BPT	JATENG
				Kegiatan Pemberdayaan masyarakat nelayan	0	40	250.000	50	275.000	50	350.000	50	750.000	50	1.000.000	240	2.625.000	BPT	JATENG
			Kegiatan Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Produksi Perikanan Tangkap	Jml apartemen ikan (paket)	1	1	250.000	2	350.000	3	486.540	3	750.000	3	1.000.000	12	2.836.540	BPT	JATENG
			Kegiatan Pengendalian Penangkapan Ikan, Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan	Jml Kegiatan								1	750	1	1.000.000			BPT	JATENG
Meningkatkan sarana & prasarana UPTD Dinas	Terlaksananya Pengembangan sarana	Pengembangan sarana dan prasarana	Kegiatan Pengelolaan & Pengembangan sarana &	Pengelolaan dan Pengembangan sarana &	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.050.000	1	1.100.000	1	1.150.000	1	5.300.000	PPP	PPP Tasik Agung

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Th.2013	Target Capaian Sasaran										KONDISI AKHIR		UNIT PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018					
						Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)		
Kelautan & Perikanan Provinsi Jawa Tengah	na dan prasarana Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)	Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP)	Sarana & Prasarana PPP Tasik Agung	prasarana Pelabuhan															
			Kegiatan Pengelolaan & Pengembangan Sarana & Prasarana PPP Bajomulyo	Pengelolaan dan Pengembangan sarana & prasarana Pelabuhan	1	1	900.000	1	900.000	1	950.000	1	1.000.000	1	1.050.000	1	4.800.000	PPP	PPP Bajomulyo
			Kegiatan Pengelolaan & Pengembangan Sarana & Prasarana PPP Karimun Jawa	Pengelolaan dan Pengembangan sarana & prasarana Pelabuhan	1	1	1.025.000	1	1.025.000	1	1.075.000	1	1.350.000	1	1.400.000	1	5.875.000	PPP	PPP Karimunjawa
			Kegiatan Pengelolaan & Pengembangan Sarana & Prasarana PPP Morodemak	Pengelolaan dan Pengembangan sarana & prasarana Pelabuhan	1	1	1.100.000	1	1.100.000	1	1.150.000	1	1.150.000	1	1.200.000	1	5.700.000	PPP	PPP Morodemak
			Kegiatan Pengelolaan & Pengembangan Sarana & Prasarana PPP Tawang	Pengelolaan dan Pengembangan sarana & prasarana Pelabuhan	1	1	900.000	1	900.000	1	950.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	4.800.000	PPP	PPP Tawang
			Kegiatan Pengelolaan & Pengembangan Sarana & Prasarana PPP Klidanglor	Pengelolaan dan Pengembangan sarana & prasarana Pelabuhan	1	1	900.000	1	900.000	1	950.000	1	1.000.000	1	1.050.000	1	4.800.000	PPP	PPP Klidanglor

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Th.2013	Target Capaian Sasaran										KONDISI AKHIR		UNIT PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018					
						Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)		
			Kegiatan Pengelolaan & Pengembangan Sarana & Prasarana PPP Wono kerto	Pengelolaan dan pengembangan sarana & prasarana Pelabuhan	1	1	800.000	1	800.000	1	850.000	1	1.000.000	1	1.050.000	1	4.500.000	PPP	PPP Wono kerto
			Kegiatan Pengelolaan & Pengembangan Sarana & Prasarana PPP Asem doyong	Pengelolaan dan Pengembangan sarana & prasarana Pelabuhan	1	1	800.000	1	800.000	1	850.000	1	1.000.000	1	1.050.000	1	4.500.000	PPP	PPP Asem doyong
			Kegiatan Pengelolaan & Pengembangan Sarana & Prasarana PPP Tegal sari	Pengelolaan dan Pengembangan sarana & prasarana Pelabuhan	1	1	1.100.000	1	1.100.000	1	1.175.000	1	1.500.000	1	1.750.000	1	6.625.000	PPP	PPP Tegal sari
			Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPP Logending	Pengelolaan dan Pengembangan sarana & prasarana Pelabuhan							1	600	1	1.000	1	1.600	PPP	PPP Logending	
			Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sarana prasarana PPI Larangan	Pengelolaan dan Pengembangan sarana & prasarana Pelabuhan							1	500	1	750	1	1.250	PPI	PPI Larangan	
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan	Meningkatkan pendapatan masyarakat pem budidaya ikan	Peningkatan Pendapatan pem budidaya ikan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA	Pendapatan pembudidayaan ikan meningkat sebesar 5,87 %/th (Rp/Kap/Th)	23.160.988,43	16.339.722,52	7.420.000	17.298.864,23	7.917.600	18.314.307,57	9.319.768	32.587.070,28	11.654.710	35.845.777,31	13.672.661	35.845.777,31	49.984.739	BPB	JATENG

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Th.2013	Target Capaian Sasaran										KONDISI AKHIR		UNIT PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018					
						Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)		
Meningkatka n jumlah produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Meningka tnya pro duksi perikanan budidaya	Peningka tan pro duksi perikanan budidaya		Peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 7,59%/th (ton)	315.45 8,67	288.08 4,05		309.94 9,63		333.4 74,81		463.1 23,90		509.43 6,29		509.4 36,29		BPB	JATENG
			Kegiatan peningkatan dan Pengem bangan Tek nologi Budi daya Ikan	Pelaksanaan sertifikasi CBIB (keg)	1	1	875.000	1	932.600	1	1.100.000	1	1.200.000	1	1.500.000	1	5.607.600	BPB	JATENG
				Percontohan budidaya Minapadi (keg)	5	1		1		1		1		1		1		BPB	JATENG
				Percontohan budidaya UGADI (keg)	0	1		1		1		1		1		1		BPB	JATENG
				Percontohan Nila salin (keg)	1	1		1		1		1		1		1		BPB	JATENG
				Percontohan Lele Bioflok (keg)	3	1		1		1		1		1		1		BPB	JATENG
			Kegiatan Pengelolaan Lingkungan dan Statistik Perikanan Budidaya	Validasi statistik perikanan budidaya(keg)	1	1	645.000	1	690.000	1	954.768	1	1.204.710	1	1.500.000	1	4.994.478	BPB	JATENG
				Penyediaan buku statistik perikanan budidaya (buku)	75	75		75		75		75		75		75		BPB	JATENG
				Pemantauan uji kualitas air di perairan budidaya (keg)	1	1		1		1		1		1		1		BPB	JATENG
				Pelaksanaan CBF (keg)	1	1		1		1		1		1		1		BPB	JATENG
				Pelaksanaan jaringan infor masi keseha tan ikan dan lingkungan (keg)	1	1		1		1		1		1		1		BPB	JATENG
				Kegiatan Peningkatan dan Pengem	Pengadaan benih ikan (keg)	1	1	700.000	1	745.000	1	915.000	1	1.000.000	1	1.300.000	1	4.660.000	BPB

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Th.2013	Target Capaian Sasaran										KONDISI AKHIR		UNIT PENANG GUNG JAWAB	LOKASI		
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018							
						Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)				
			bangsan Perbenihan Ikan	Pencapaian UPR/HSRT dan BBI yang bersertifikat (keg)	1	1		1		1		1		1		1		BPB	JATENG		
			Kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya Air Tawar	Temu lapang pakan ikan berbahan baku lokal (keg)	4	4	800.000	4	855.000	4	1.100.000	4	1.500.000	4	1.750.000	4	6.005.000	BPB	JATENG		
				Pembinaan dalam rangka penilaian kinerja kelom pok dan kelem bagaan perikanaan budidaya (keg)	1	1		1		1		1		1		1		BPB	JATENG		
				Pengembangan kawasan minapolitan (keg)	1	1		1		1		1		1		1		BPB	JATENG		
			Kegiatan Revitalisasi Perikanan Budidaya Air Payau	Penilaian kinerja kelom pok dan kelem bagaan perikanaan budidaya (keg)	1	1	800.000	1	855.000	1	1.100.000	1	1.500.000	1	1.750.000	1	6.005.000	BPB	JATENG		
				Pengembangan budidaya di kawasan industrialisasi (keg)	1	1		1		1		1		1		1		BPB	JATENG		
				Revitalisasi tambak dlm rangka pengembangan budidaya air payau (keg)	1	1		1		1		1		1		1		BPB	JATENG		
				Peningkatan sarpras budi daya air payau (keg)	1	1		1		1		1		1		1		BPB	JATENG		
			Meningkatkan sarana & prasarana UPTD Dinas Kelautan &	Terlaksananya Pengembangan sarana & prasarana	Pengembangan sarana & prasarana	Kegiatan Optimalisasi dan Pengembangan Karantina dan	Pengembangan sarana & prasarana Laboratorium Pengujian	1	1	750.000	1	800.000	1	900.000	-	-	-	-	1.450.000	Laboratorium Pengujian Kesehatan	Laboratorium Pengujian Kesehatan Ikan dan

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Th.2013	Target Capaian Sasaran										KONDISI AKHIR		UNIT PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018					
						Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)		
Perikanan Provinsi Jawa Tengah	prasarana UPTD Bidang Perikanan Budidaya	UPTD Bidang Perikanan Budidaya	Keseha tan Ikan	Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya (ex-BKKI)													n Ikan dan Lingkung an Budidaya (ex-BKKI)	Lingkungan Budidaya (ex-BKKI)	
				Pemantauan hama dan pe nyakit ikan di Jawa Tengah (Kab/ Kota)	35	35		35		35		-		-		35			
			Kegiatan Pengembanga n Sarana & Prasarana Perbenihan & Budidaya Air Tawar	Pengemba ngan sarana & prasarana UPTD BBIAT	1	1	1.55 0.000	1	1.65 0.000	1	1.75 0.00 0	1	2.250 .000	1	2.500. 000		9.700.00 0	BBIAT	BBIAT
				Produksi Benih unggul :															
				Nila (ekor)	4.068.0 38	4.445. 552		4.823. 066		5.200. 580		5.578. 094		5.955.6 08		26.00 2.900		BBIAT	BBIAT
				Lele (ekor)	446.51 3	487.94 9		529.38 6		570.82 2		612.25 9		653.69 5		2.854. 111		BBIAT	BBIAT
				Gurame (ekor)	120.62 8	131.82 2		143.01 7		154.21 1		165.40 5		176.59 9		771.0 54		BBIAT	BBIAT
				Mas (ekor)	550.14 8	601.20 2		652.25 5		703.30 9		754.36 3		805.41 7		3.516. 546		BBIAT	BBIAT
				Distribusi induk unggul hasil <i>Brood Stock Center</i> BBIAT :															
				Nila (paket)	30	100		100		100		100		100		500		BBIAT	BBIAT
				Lele (paket)	200	200		200		200		200		200		1.000		BBIAT	BBIAT
				Gurame(paket)	30	30		30		30		30		30		150		BBIAT	BBIAT
				Karper (paket)	100	-		30		30		30		30		150		BBIAT	BBIAT
			Kegiatan Pengemba ngan Sarana & Prasarana Perbenihan & Budidaya Air Payau Laut	Pengembangan sarana & prasa rana UPTD BBIAPL	1	1	1.30 0.000	1	1.39 0.000	1	1.50 0.00 0	1	2.000 .000	1	2.250. 000		8.440.00 0	BBIAPL	BBIAPL
				Produksi Benih unggul :															
				Vannamae (ekor)	6.500.0 00	7.560. 000		8.316. 000		9.147. 600		10.062 .360.		12.175 .456		37.19 9.056		BBIAPL	BBIAPL
				Windu (ekor)	8.500.0 00	10.000 .000		11.000 .000		12.100 .000		13.310 .000		14.641 .000		61.05 1.000		BBIAPL	BBIAPL

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Th.2013	Target Capaian Sasaran										KONDISI AKHIR		UNIT PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018					
						Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)		
Meningkatkan ketersediaan protein hewani yang berasal dari sumberdaya ikan	Meningkatnya konsumsi makan ikan di Jawa Tengah	Peningkatan konsumsi makan ikan di Jawa Tengah)	PROGRAM OPTIMALISASI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN PRODUKSI PERIKANAN	Tingkat Konsumsi Ikan meningkat sebesar 4,86 %/Th (Kg/kap/th)	17,82	18,69	5.584.000	19,59	5.863.200	20,55	6.742.680	21,55	8.428.350	22,59	9.861.170	22,59	36.479.400	BPUKP	JATENG
Meningkatkan hasil perikanan yang memenuhi jaminan mutu & keamanan produk hasil perikanan	Meningkatnya produk olahan hasil perikanan	Peningkatan produk olahan hasil perikanan (sat : ton/th)		Produk olahan hasil perikanan meningkat sebesar 1,00%/Th (ton)	180.449,63	182.254,13		184.076,67		185.917,43		187.776,61		189.654,37		189.654,37		BPUKP	JATENG
Meningkatkan jumlah dan ragam produk olahan serta ekspor produk perikanan	Meningkatnya volume ekspor produk dan nilai ekspor produk hasil perikanan	Peningkatan volume ekspor (sat: ton) dan nilai ekspor produk perikanan (sat : US\$)		Peningkatan volume ekspor produk hasil perikanan sbsr 2,7%/th (ton)	22.898,18	25.093,46		25.770,99		26.466,80		27.181,41		27.915,31		27.915,31		BPUKP	JATENG
				Peningkatan nilai ekspor produk hasil perikanan sbsr 3,0%/th (US\$)	84.241.831,73	86.769.087		89.372.159		92.053.324		94.814.924		97.659.371		97.659.371		BPUKP	JATENG
			Jml UPI yg dibina	30	30		30		30		30		30		30		BPUKP	JATENG	
			Kegiatan Pengembangan & Pembinaan Teknologi Pengolahan & Pemasaran Produk Hasil Perikanan dan Kelautan	Safari Gemar Makan Ikan (GEMARIKAN) (kali)	4	4	800.000	4	924.000	4	1.192.680	4	1.500.000	4	2.061.170	20	6.557.850	BPUKP	JATENG
			Gelar Produk Perikanan (kali)	10	10		10		10		10		10		50		BPUKP	JATENG	
			Kegiatan Pelayanan Mutu Usaha Perikanan	Sosialisasi peraturan perizinan perikanan (kali)	9	7	350.000	7	367.500	7	450.000	7	750.000	7	900.000	35	2.817.500	BPUKP	JATENG
				Pelatihan petugas perizinan (kali)	1	1		1		1		1		1		1		BPUKP	JATENG

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Th.2013	Target Capaian Sasaran										KONDISI AKHIR		UNIT PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018					
						Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)		
				Temu koordinasi instansi terkait (FGD) (kali)	1	1		1		1		1		1		1		BPUKP	JATENG
				Monev pelayanan perizinan usaha perikanan (buku)	0	10		10		10		10		10		10		BPUKP	JATENG
			Kegiatan Peningkatan Perluasan Usaha dan Koordinasi Kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan	Lomba masak ikan tingkat provinsi (kali)	1	1	590.000	1	619.500	1	750.000	1	900.000	1	1.000.000	5	3.859.500	BPUKP	JATENG
				Lomba masak ikan tingkat nasional (kali)	1	1		1		1		1		1		5		BPUKP	JATENG
				Rakor fasilitator kelautan dan perikanan (kali)	1	1		1		1		1		1		5		BPUKP	JATENG
				Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan kelautan (kali)	5	5		5		5		5		5		25		BPUKP	JATENG
				PEDA Petani nelayan/KTNA (kali)	1	1		1		1		1		1		5		BPUKP	JATENG
				PENAS Petani Nelayan/KTNA (kali)	1	1		1		1		1		1		5		BPUKP	JATENG
			Kegiatan Pengembangan Kawasan Perikanan	FPESD (keg)	1	1	350.000	1	367.500	1	500.000	1	778.350	1	1.000.000	1	2.995.850	BPUKP	JATENG
				Minapolitan (keg)	1	1		1		1		1		1		1		BPUKP	JATENG
				Kawasan Rawapening (keg)	1	1		1		1		1		1		1		BPUKP	JATENG
			Kegiatan pengelolaan Unit Pengembangan SDM KP	Jml Kegiatan								1	-	1	5.000.000	2		BPUKP / UPSDMKP	JATENG
	Terlaksananya pengu- jian mutu,	Peningkata n penerbitan	Kegiatan Pe ningkatan & Pengembangan	Penerbitan HC (Sertifikat) di tiga LPPMHP	1.694	1.744	1.03 0.000	1.794	1.08 1.500	1.844	1.15 0.00 0	1.894	1.350 .000	1.944	1.350. 000	1.944	6.111.50 0	BP2MHP Semarang	BP2MHP Semarang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Th.2013	Target Capaian Sasaran										KONDISI AKHIR		UNIT PENANGUNG JAWAB	LOKASI
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018					
						Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)		
	pengawasan pengolahan hasil perikanan & sertifikasi mutu yang sudah terakreditasi SNI, ISO/ IEC 17025. 2008 dan memiliki analisis pengujian & inspektur mutu yang memiliki standar kompetensi	HC (sertifikasi)	BP2MHP Semarang	Pengembangan sarana & pra sarana Lab	1	1		1		1		1		1		1			BP2MHP Semarang
			Kegiatan Peningkatan & Pengembangan BP2MHP Pekalongan	Penerbitan HC (Sertifikat) di tiga LPPMHP	1.694	1.744	800.000	1.794	840.000	1.844	900.000	-	-	-	-	1.944	4.640.000	BP2MHP Pekalongan	BP2MHP Pekalongan
				Pengembangan sarana & pra sarana Lab	1	1		1		1		1		1		1			
			Kegiatan Peningkatan & Pengembangan LPPMHP Cilacap	Penerbitan HC (Sertifikat) di tiga LPPMHP	1.694	1.744	624.000	1.794	655.200	1.844	700.000	-	-	-	-	1.944	3.879.200	LPPMHP Cilacap	LPPMHP Cilacap
				Pengembangan sarana & pra sarana Lab	1	1		1		1		-		-		1			LPPMHP Cilacap
Meningkatkan perencanaan pengembangan sektor kelautan dan perikanan	Tersedianya perencanaan program/ kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan	Prosesntase Penyediaan Dokumen perencanaan (RENJA, LAKIP, LAPTAH, RKA, RENSTRA)	Kegiatan Pengembangan Perencanaan & Monitoring Evaluasi Program Kegiatan Kelautan & Perikanan	Dokumen perencanaan, meliputi Renja, Lakip, Laptah, RKA, Renstra	RENJA : 1 dok	1	960.000	1	1.008.000	1	1.100.000	1	1.250.000	1	1.300.000	5	5.618.000	SEK	JATENG
					LAKIP : 1 dok	1		1		1		1		5		SEK	JATENG		
					LAPTAH : 1 dok	1		1		1		1		5		SEK	JATENG		
					RKA : 1 dok	1		1		1		1		5		SEK	JATENG		
					RENSTRA : 1 dok	0		0		0		1		1		SEK	JATENG		
Meningkatkan kesejahteraan petambak garam, taruna pesisir dan wanita pesisir	Meningkatnya pendapatan petambak garam	Peningkatan Pendapatan petambak garam	PROGRAM PEMBER DAYAAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR	Produksi Garam (ton/tahun)						694.575		729.304		729.304			BKPP	JATENG	
	Meningkatnya pendapatan taruna pesisir	Peningkatan Pendapatan taruna pesisir		Pendapatan taruna pesisir meningkat sebesar 4,06%/th (Rp/Kap/Th)	4.133.005,79	4.300.805,83		4.475.418,54		4.657.120,53		9.000.000		10.000.000		10.000.000	BKPP	JATENG	
	Meningkatnya pendapatan wanita pesisir	Peningkatan Pendapatan wanita pesisir		Pendapatan wanita pesisir meningkat sebesar 3,9	2.742.951,61	2.849.926,73		2.961.073,87		3.076.555,75		6.800.000		7.600.000		7.600.000	BKPP	JATENG	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Th.2013	Target Capaian Sasaran										KONDISI AKHIR		UNIT PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018					
						Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)		
				%/th (Rp/Kap/Th)															
			Kegiatan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Pemberdayaan Usaha Petambak Garam (org)	125	125	1.600.000	125	1.900.000	125	2.190.000	125	2.599.700	125	2.977.155	625	11.266.855	BKPP	JATENG
		Pemberdayaan Usaha Wanita Pesisir (org)		125	125		125		125		125		125		625		BKPP	JATENG	
		Pelatihan usaha taruna pesisir (org)		125	125		125		125		125		125		625		BKPP	JATENG	
		Fasilitasi akses permodalan masyarakat pesisir (paket)		5	5		5		5		5		5		25		BKPP	JATENG	
		Fasilitasi pengusaha SPDN masyarakat pesisir (paket)		1	1		1		1		1		1		1		BKPP	JATENG	
		Fasilitasi kemitraan jasa kepariwisataan (paket)		1	1		1		1		1		1		1		BKPP	JATENG	
		Fasilitasi kelembagaan masyarakat pesisir (paket)		1	1		1		1		1		1		1		BKPP	JATENG	
		Monev distribusi dan quota BBM (paket)		1	1		1		1		1		1		1		BKPP	JATENG	
Meningkatkan peran masyarakat pengawas dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Terlaksananya pembinaan masyarakat dlm kegiatan pengawas dalam kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan & perikanan	Pembinaan masyarakat pengawas dlm kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan & perikanan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DLM PENGAWASAN & PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN & PERIKANAN	Jumlah kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan yang aktif (Klp/th)	10	20	700.000	20	735.000	20	823.200	20	946.680	20	1.060.282	20	4.265.162	BKPP, BPT, BPKSDKP	JATENG

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Th.2013	Target Capaian Sasaran										KONDISI AKHIR		UNIT PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018					
						Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)		
Meningkatkan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta penegakan peraturan kelautan dan perikanan	Terlaksananya pengawasan sumberdaya kelautan & perikanan serta penegakan peraturan kelautan & perikanan	Pengawasan sumberdaya kelautan & perikanan serta penegakan peraturan kelautan & perikanan		Operasi Pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan serta penegakkan peraturan kelautan dan perikanan (kali)	5	10		10		10		10		10		50		BKPP, BPT, BPKSDKP	JATENG
			Kegiatan Pengawasan, Pengendalian & Pemulihan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Pembinaan POKMASWAS (klp/th)	10	20	700.000	20	735.000	20	823.200	20	946.680	20	1.060.282	20		BKPP, BPT, BPKSDKP	JATENG
				Sosialisasi peraturan per UU (kali)	5	6		6		6		6		6		30		BKPP, BPT, BPKSDKP	JATENG
				Operasi Pengawasan (kali)	5	10		10		10		10		10		50		BKPP, BPT, BPKSDKP	JATENG
				Penambahan PPNS Perikanan (org)	0	3		3		3		3		3		15		BKPP, BPT, BPKSDKP	JATENG
			Kegiatan pengelolaan Balai Pengawasan dan Konservasi Wilayah Pantura Barat dan Pansela	Jml kegiatan							1	750.000	1	1.000.000	1	1.750.000	BPKSDKP Pantubar Pansela	JATENG	
			Kegiatan pengelolaan Balai Pengawasan dan Konservasi Wilayah Pantura Timur	Jml kegiatan							1	750.000	1	1.000.000	1	1.750.000	BPKSDKP Pantutim	JATENG	
Menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Terlaksananya pelestarian sumberdaya kelautan & perikanan melalui :	Pelestarian sumberdaya kelautan & perikanan melalui :	PROGRAM REHABILITASI DAN KONSERVASI SUMER DAYA KELAUTAN	Peningkatan Luas Mangrove di Kawasan Perikanan (Ha)	8,08	7,50	2.082.000	8,13	2.186.100	8,25	2.514.015	8,38	3.016.818	8,50	3.529.677	40,75	13.328.610	BKPP	JATENG

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Th.2013	Target Capaian Sasaran										KONDISI AKHIR		UNIT PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018					
						Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)		
	tan dan perikanan	reservat di perairan umum, penebaran benih di laut dan perairan umum	DAN PERIKANAN	Peningkatan Luas Terumbu Karang Buatan di Kawasan Perikanan (Ha)	17,28	4,68		5,13		5,58		6,03		6,48		27,90		BKPP	JATENG
			Kegiatan Rehabilitasi Habitat Vital	Jml reservat perairan umum (unit)	36	3	502.000	3	568.000	3	789.015	3	1.016.818	3	1.279.677	15	4.155.510	BKPP	JATENG
				Penebaran benih ikan perairan laut (ekor)	10.000	6.000		6.000		8.000		12.000		12.000		42.000	BKPP	JATENG	
				Penebaran benih ikan di perairan umum (ekor)	121.500	300.000		300.000		300.000		300.000		300.000		1.500.000	BKPP	JATENG	
Mencegah kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Terlaksana nya pence gahan keru sakan wila yah pesisir dan pulau-pulau kecil	Pencegahan kerusakan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Kegiatan Rehabilitasi & Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Jml penanaman mangrove (batang)	304.250	300.000	1.580.000	325.200	1.618.100	330.000	1.725.000	335.200	2.000.000	340.000	2.250.000	9.173.100		BKPP, BPKSDKP	JATENG
				Jml transplan tasi karang (unit)	60	60		60		60		30		30				BKPP, BPKSDKP	JATENG
				Jml TKB (unit)	64	52		57		62		67		72				BKPP, BPKSDKP	JATENG
Meningkatkan keterampilan dan keahlian nelayan, pembudidaya, pengolah/pemasar ikan dan penyuluh perikanan	Terlaksana nya kegia tan pelati han bagi nela yan, pembudi daya ikan, pengolah/p emasar ikan & penyuluh perikanan	Pelaksanaa n kegiatan pelatihan bagi nela yan, pembu didaya ikan, pengolah/p emasar ikan & penyuluh perikanan	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL & INFORMAL	Jml nelayan, pembudidaya ikan, pengolah /pemasar ikan, penyuluh perikanan dan masyarakat pesisir yang di latih	4.930	4.460	4.000.000	4.500	4.100.000	4.800	4.800.000	6.000	6.000.000	6.500	7.000.000	26.260	25.900.000	BPUKP, UPSDMKP	JATENG
			Kegiatan Pendidikan Kemasyara katan	Jml nelayan, pembudidaya ikan, pengolah /pemasar ikan, penyuluh perikanan dan masyarakat pesisir yang di latih	4.930	4.460	4.000.000	4.500	4.100.000	4.800	4.800.000	6.000	6.000.000	6.500	7.000.000	26.260	25.900.000	BPUKP, UPSDMKP	JATENG

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Th.2013	Target Capaian Sasaran										KONDISI AKHIR		UNIT PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018					
						Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)		
Meningkatkan pelaksanaan urusan peme rintahan daerah bidang kelautan dan perikanan	Meningkat nya pengelo laan, dan penyelengg aaraan di bi dang keua ngan,umu m kepegawai an, hukum, humas, organisasi dan tata laksana, ketatausah aan, rumah tangga dan perlengka pan di ling kungan Dinas	Pengelolaan dan, penye lenggaraan di bidang keuangan, umum kepegawai an, hukum, humas, organisasi dan tata laksana, ketatausah aan, rumah tangga dan perlengka pan di ling kungan Dinas	PROGRAM PELAYANAN ADMINIS TRASI PERKANTOR AN	Jumlah penyediaan jasa perkantoran (bulan)	12	12	6.97 9.70 6	12	7.67 7.68 5	12	8.44 5.41 8	12	9.289 .945	12	10.218 .971	12	42.611.7 25	DINAS	JATENG
			Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sekretariat Dinas Kelautan Dan Perikanan	Jumlah penyediaan jasa Surat Menyurat Dinas (bulan)	12	12	59.6 38	12	65.6 00	12	72.1 60	12	79.37 5	12	87.31 5	12	364.088	SEK	Semarang
			Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari	Jumlah penyediaan jasa Surat Menyurat PPP Tegalsari (bulan)	12	12	750	12	825	12	905	12	995	12	1.098	12	4.573	PPP Tegalsari	PPP Tegalsari
			Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo	Jumlah penyediaan jasa Surat Menyurat PPP Bajomulyo (bulan)	12	12	750	12	825	12	905	12	995	12	1.098	12	4.573	PPP Bajo mulyo	PPP Bajomulyo
			Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	Jumlah penyediaan jasa Surat Menyurat PPP Morodemak (bulan)	12	12	750	12	825	12	905	12	995	12	1.098	12	4.573	PPP Moro demak	PPP Morodemak
			Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	Jumlah penyediaan jasa Surat Menyurat PPP Wonokerto (bulan)	12	12	750	12	825	12	905	12	995	12	1.098	12	4.573	PPP Wono kerto	PPP Wonokerto

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Th.2013	Target Capaian Sasaran										KONDISI AKHIR		UNIT PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018					
						Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong	Jumlah penyediaan jasa Surat Menyurat PPP Asemdayong (bulan)	12	12	750	12	825	12	905	12	995	12	1.098	12	4.573	PPP Asem dayong	PPP Asem dayong
			Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	Jumlah penyediaan jasa Surat Menyurat PPP Klidanglor (bulan)	12	12	750	12	825	12	905	12	995	12	1.098	12	4.573	PPP Klidang lor	PPP Klidanglor
			Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung	Jumlah penyediaan jasa Surat Menyurat PPP Tasikagung (bulan)	12	12	750	12	825	12	905	12	995	12	1.098	12	4.573	PPP Tasik agung	PPP Tasikagung
			Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	Jumlah penyediaan jasa Surat Menyurat PPP Tawang (bulan)	12	12	750	12	825	12	905	12	995	12	1.098	12	4.573	PPP Tawang	PPP Tawang
			Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	Jumlah penyediaan jasa Surat Menyurat PPP Karimunjawa (bulan)	12	12	750	12	825	12	905	12	995	12	1.098	12	4.573	PPP Karimun jawa	PPP Karimun jawa
			Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat BP2MHP Semarang	Jumlah penyediaan jasa Surat Menyurat BP2MHP Semarang (bulan)	12	12	1.000	12	1.100	12	1.210	12	1.331	12	1.464	12	6.105	BP2MHP Semarang	BP2MHP Semarang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Th.2013	Target Capaian Sasaran										KONDISI AKHIR		UNIT PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018					
						Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat BP2MHP Pekalongan	Jumlah penyediaan jasa Surat Menyurat BP2MHP Pekalongan (bulan)	12	12	1.000	12	1.100	12	1.210	12	1.331	12	1.464	12	6.105	BP2MHP Pekalongan	BP2MHP Pekalongan
			Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat LPPMHP Cilacap	Jumlah penyediaan jasa Surat Menyurat LPPMHP Cilacap (bulan)	12	12	1.000	12	1.100	12	1.210	-	-	-	-	12	6.105	LPPMHP Cilacap	LPPMHP Cilacap
			Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Perbenihan Dan Budidaya Ikan Air Tawar	Jumlah penyediaan jasa Surat Menyurat Balai Perbenihan Dan Budidaya Ikan Air Tawar (bulan)	12	12	2.000	12	2.200	12	2.420	12	2.662	12	2.928	12	12.210	Balai Perbenihan Dan Budidaya Ikan Air Tawar	Balai Perbenihan Dan Budidaya Ikan Air Tawar
			Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Perbenihan Dan Budidaya Ikan Air Payau Dan Laut	Jumlah penyediaan jasa Surat Menyurat Balai Perbenihan Dan Budidaya Ikan Air Payau Dan Laut (bulan)	12	12	2.000	12	2.200	12	2.420	12	2.662	12	2.928	12	12.210	Balai Perbenihan Dan Budidaya Ikan Air Payau Dan Laut	Balai Perbenihan Dan Budidaya Ikan Air Payau Dan Laut
			Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Karantina Dan Kesehatan Ikan	Jumlah penyediaan jasa Surat Menyurat Balai Karantina Dan Kesehatan Ikan (bulan)	12	12	2.000	12	2.200	12	2.420	-	-	-	-	12	12.210	BKKI	BKKI
			Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat UPSDM KP	Jumlah penyediaan jasa Surat Menyurat UPSDM KP										12	500				
			Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengawasan	Jumlah penyediaan jasa Surat Menyurat Balai Pengawasan										12	500				

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Th.2013	Target Capaian Sasaran										KONDISI AKHIR		UNIT PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018					
						Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)		
			dan Konservasi SDKP Pantura Timur	dan Konservasi SDKP Pantura Timur															
			Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Pengawasan dan Konservasi SDKP Pantura Barat dan Pansela	Jumlah penyediaan jasa Surat Menyurat Balai Pengawasan dan Konservasi SDKP Pantura Barat dan Pansela									12	500					
			Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	Jumlah penyediaan jasa Surat Menyurat Pelabuhan Perikanan Pantai Logending										12	500				
			Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Pangkalan Pendaratan Ikan Larangan	Jumlah penyediaan jasa Surat Menyurat Pangkalan Pendaratan Ikan Larangan										12	500				
			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas Kelautan Dan Perikanan	Jumlah penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Dinas (bulan)	12	12	730.400	12	803.440	12	883.784	12	972.162	12	1.069.378	12	4.459.164	Semarang	Semarang
			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari	Jumlah penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelabuhan Perikanan Pantai Tegalsari (bulan)	12	12	427.200	12	469.920	12	516.912	12	568.603	12	625.463	12	2.608.098	PPP Tegal sari	PPP Tegalsari

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Th.2013	Target Capaian Sasaran										KONDISI AKHIR		UNIT PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018					
						Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)		
			Kegiatan penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo	Jumlah penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelabuhan Perikanan Pantai Bajomulyo (bulan)	12	12	18.000	12	19.800	12	21.780	12	23.958	12	26.353	12	109.891	PPP Bajo mulyo	PPP Bajo mulyo
			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak	Jumlah penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak (bulan)	12	12	22.200	12	24.420	12	26.862	12	29.548	12	32.503	12	135.533	PPP Moro demak	PPP Moro demak
			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto	Jumlah penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelabuhan Perikanan Pantai Wonokerto (bulan)	12	12	18.600	12	20.460	12	22.506	12	24.756	12	27.232	12	113.554	PPP Wono kerto	PPP Wono kerto
			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong	Jumlah penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelabuhan Perikanan Pantai Asemdayong (bulan)	12	12	16.800	12	18.480	12	20.328	12	22.360	12	24.596	12	102.564	PPP Asem dayong	PPP Asem dayong

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Th.2013	Target Capaian Sasaran										KONDISI AKHIR		UNIT PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018					
						Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor	Jumlah penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelabuhan Perikanan Pantai Klidanglor (bulan)	12	12	16.800	12	18.480	12	20.328	12	22.360	12	24.596	12	102.564	PPP Klidanglor	PPP Klidanglor
			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung	Jumlah penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelabuhan Perikanan Pantai Tasikagung (bulan)	12	12	31.800	12	34.980	12	38.478	12	42.325	12	46.558	12	194.141	PPP Tasikagung	PPP Tasikagung
			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang	Jumlah penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelabuhan Perikanan Pantai Tawang (bulan)	12	12	16.800	12	18.480	12	20.328	12	22.360	12	24.596	12	102.564	PPP Tawang	PPP Tawang
			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa	Jumlah penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelabuhan Perikanan Pantai Karimunjawa (bulan)	12	12	23.400	12	24.740	12	28.314	12	31.145	12	34.259	12	142.858	PPP Karimun jawa	PPP Karimun jawa

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Th.2013	Target Capaian Sasaran										KONDISI AKHIR		UNIT PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018					
						Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	Jumlah penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Perikanan Pantai Logending (bulan)							12	31.145	12	34.259	12	65.404	PPP Logending	PPP Logending	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pangkalan Pendaratan Ikan Larangan, Tegal	Jumlah penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pangkalan Pendaratan Ikan Larangan, Tegal (bulan)							12	31.145	12	34.259	12	65.404	PPI Larangan, Tegal	PPI Larangan	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BP2MHP Semarang	Jumlah penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BP2MHP Semarang (bulan)	12	12	73.800	12	81.180	12	89.298	12	98.227	12	108.050	12	450.555	LPPMHP Smg	BP2MHP Semarang
			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BP2MHP Pekalongan	Jumlah penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BP2MHP Pekalongan (bulan)	12	12	49.200	12	54.120	12	59.532	12	65.485	12	72.033	12	300.370	LPPMHP Pkl	BP2MHP Pkl
			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik LPPMHP Cilacap	Jumlah penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik LPPMHP Cilacap (bulan)	12	12	43.800	12	48.180	12	52.998	-	-	-	-	12	267.402	LPPMHP Cil	LPPMHP Cilacap

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Th.2013	Target Capaian Sasaran										KONDISI AKHIR		UNIT PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018					
						Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)		
			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Perbenihan Dan Budidaya Ikan Air Tawar	Jumlah penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Perbenihan Dan Budidaya Ikan Air Tawar (bulan)	12	12	89.700	12	98.670	12	108.537	12	119.390	12	131.329	12	547.626	BBIAT	BBIAT
			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Perbenihan Dan Budidaya Ikan Air Payau Dan Laut	Jumlah penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Perbenihan Dan Budidaya Ikan Air Payau Dan Laut (bulan)	12	12	83.100	12	91.410	12	100.551	12	110.606	12	121.666	12	507.333	BBIAPL	BBIAPL
			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Karantina Dan Kesehatan Ikan	Jumlah penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Karantina Dan Kesehatan Ikan (bulan)	12	12	38.400	12	42.240	12	46.464	-	-	-	-	12	234.435	BKKI Smg	BKKI Semarang
			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPSDM KP	Jumlah penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik UPSDM KP									12	35.000				Semarang	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengawasan	Jumlah penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengawasan									12	35.000				Semarang	

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Th.2013	Target Capaian Sasaran										KONDISI AKHIR		UNIT PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018					
						Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satua n)	Rp. (000)		
			dan Konservasi SDKP Pantura Timur	dan Konservasi SDKP Pantura Timur															
			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengawasan dan Konservasi SDKP Pantura Barat dan Pansela	Jumlah penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Balai Pengawasan dan Konservasi SDKP Pantura Barat dan Pansela									12	35.000				Semarang	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelabuhan Perikanan Pantai Logending	Jumlah penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pelabuhan Perikanan Pantai Logending										12	35.000				Semarang
			Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pangkalan Pendaratan Ikan Larangan	Jumlah penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pangkalan Pendaratan Ikan Larangan										12	35.000				Semarang
			Kegiatan Jaminan Barang Milik Daerah	Jumlah penyediaan jasa Jaminan Barang Milik Daerah (tahun)	1	1	27.500	1	30.250	1	33.275	1	36.602	1	40.262	1	167.889	SEK	Semarang
			Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah penyediaan Alat Tulis Kantor (bulan)	12	12	250.000	12	275.000	12	302.500	12	332.750	12	366.025	12	1.526.275	SEK	Semarang
			Kegiatan Penyediaan	Jumlah penyediaan	12	12	221.356	12	243.500	12	267.840	12	294.624	12	324.087	12	1.351.407	SEK	Semarang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Th.2013	Target Capaian Sasaran										KONDISI AKHIR		UNIT PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018					
						Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)		
			Barang Cetak & penggan daan	dan penggandaan (bulan)															
			Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Jumlah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor (bulan)	12	12	176.000	12	193.600	12	212.960	12	234.256	12	257.681	12	1.074.497	SEK	Semarang
			Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga (bulan)	12	12	184.850	12	203.335	12	223.668	12	246.035	12	270.638	12	1.128.526	SEK	Semarang
			Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan (bulan)	12	12	71.500	12	78.650	12	86.515	12	95.166	12	104.683	12	436.514	SEK	Semarang
			Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah Penyediaan Makanan dan Minuman (bulan)	12	12	180.500	12	198.550	12	218.405	12	240.245	12	264.270	12	1.101.970	SEK	Semarang
			Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah	Jumlah Penyediaan Biaya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah (bulan)	12	12	1.608.000	12	1.768.800	12	1.945.680	12	2.140.248	12	2.354.272	12	9.817.000	SEK	Semarang
			Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran (bulan)	12	12	2.400.300	12	2.640.330	12	2.904.363	12	3.194.799	12	3.514.279	12	14.654.071	SEK	Semarang
			Kegiatan Penyediaan Biaya Publikasi & Dokumentasi	Jumlah Penyediaan Biaya Publikasi dan Dokumentasi (bulan)	12	12	84.312	12	92.745	12	102.017	12	112.219	12	123.441	12	514.734	SEK	Semarang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Th.2013	Target Capaian Sasaran										KONDISI AKHIR		UNIT PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018					
						Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)		
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur (bulan)	12	12	6.334.074	12	7.928.580	12	8.517.929	12	9.168.421	12	9.883.261	12	41.832.265	SEK	Semarang
			Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah mobil Dinas/Operasi onal (unit)	1	2	514.000	5	1.226.500	5	1.230.000	5	1.235.000	5	1.240.000	22	5.445.500	SEK	Semarang
			Jumlah Kendaraan Dinas/Operasi onal	Jumlah Kendaraan roda 2 Dinas/Operasi onal (unit)	0	3		4		4		4		4		19			
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas (unit)	4	4	143.000	4	157.300	4	173.030	4	190.333	4	209.366	16	873.029	SEK	Semarang
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (unit)	13	19	501.950	25	852.145	25	853.000	25	855.000	25	857.000	25	3.919.095	SEK	Semarang
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasi onal (bulan)	12	12	1.045.000	12	1.149.500	12	1.264.450	12	1.390.895	12	1.529.984	12	6.379.829	SEK	Semarang
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (bulan)	12	12	132.000	12	145.200	12	159.720	12	175.692	12	193.261	12	805.873	SEK	Semarang
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair (bulan)	12	12	62.725	12	68.997	12	75.897	12	83.486	12	91.835	12	382.940	SEK	Semarang
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga	Jumlah sarana kinerja aparatur yang terawatnya (bulan)	12	12	227.500	12	250.250	12	275.275	12	302.802	12	333.082	12	1.388.909	SEK	Semarang
			Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala	Jumlah Pemeliharaan Rutin/Berkala	12	12	273.400	12	300.740	12	330.814	12	363.895	12	400.284	12	1.669.133	SEK	Semarang

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Th.2013	Target Capaian Sasaran										KONDISI AKHIR		UNIT PENANG GUNG JAWAB	LOKASI
						Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018					
						Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)		
			Alat Besar dan Berat	Alat Besar dan Berat (bulan)															
			Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	Jumlah Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor (paket)	4	7	800.000	7	880.000	7	968.000	7	1.064.800	7	1.171.280	28	4.884.080	SEK	Semarang
			Kegiatan Rehab Gedung Kantor	Jumlah Rehab Gedung Kantor (unit)	8	4	819.499	4	901.448	4	991.593	4	1.090.753	4	1.199.828	16	5.003.121	SEK	Semarang
			Kegaitan Peningkatan kapasitas sumber pendapatan UPT	Jumlah Pengerukan Kolam, Penyediaan Pakan, Bahan Obat-obatan, Benih/Induk lkan (paket)	4	4	1.815	4	1.996.500	4	2.196.150	4	2.415.765	4	2.657.341	4	11.080.756	SEK	Semarang
			PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR	Peningkatan disiplin aparatur (persen)	100	100	330.000	100	363.000	100	399.300	100	439.230	100	483.153	100	2.014.683	SEK	Semarang
			Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapan nya	Jumlah Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya (unit)	383	447	330.000	450	363.000	455	399.300	460	439.230	465	483.153	2.277	2.014.683	SEK	Semarang
			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal (bidang)	5	5	437.000	5	480.700	5	528.770	5	581.647	5	639.811	5	2.667.928	SEK	Semarang
			Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah Pendidikan dan Pelatihan Formal (bidang)	2	5	437.000	5	480.700	5	528.770	5	581.647	5	639.811	5	2.667.928	SEK	Semarang



BAB VI

INDIKATOR KINERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI JAWA TENGAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja merupakan suatu acuan yang dapat digunakan sebagai dasar penilaian kinerja. Indikator kinerja haruslah terukur sehingga dapat dilakukan evaluasi secara kuantitatif dan dapat digunakan sebagai pengukur keberhasilan suatu rencana program. Berdasarkan pada tujuan dan sasaran renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah tahun 2013-2018, berikut ini adalah indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menurut rencana program :

1. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir, indikator kinerjanya adalah :
 - a. Rata-Rata Pendapatan Pemberdayaan Wanita Pesisir (satuan : Rp/kapita/tahun)
 - b. Rata-Rata Pendapatan Pemberdayaan Taruna Pesisir (satuan : Rp/kapita/tahun)
 - c. Volume Produksi Garam (satuan : ton/tahun)
2. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, indikator kinerjanya adalah :
 - a. Jumlah Operasi Pengawasan (satuan : kali)
 - b. Jumlah Pembinaan kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan dan perikanan (satuan : kelompok)
3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap, indikator kinerjanya adalah :
 - a. Volume Produksi Perikanan Tangkap (satuan : ton/tahun)
 - b. Pendapatan Nelayan (satuan : Rp/kapita/tahun)
4. Program Pengembangan Perikanan Budidaya, indikator kinerjanya adalah :
 - a. Volume Produksi Perikanan Budidaya (satuan : ton/tahun)
 - b. Pendapatan Pembudidaya (satuan : Rp/kapita/tahun)
5. Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan, indikator kinerjanya adalah :
 - a. Jumlah UPI yang dibina (satuan : UPI/tahun)
 - b. Tingkat Konsumsi Makan Ikan (satuan : kg/kapita/tahun)
 - c. Volume Ekspor (satuan : ton/tahun)
6. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan, indikator kinerjanya adalah :
 - a. Peningkatan Luas Mangrove di Kawasan Perikanan (satuan : Ha)
 - b. Peningkatan Luas Terumbu Karang Buatan di Kawasan Perikanan (satuan : Ha)
 - c. Ketersediaan dokumen penataan ruang wilayah pesisir dan laut sesuai UU pengelolaan wilayah Pesisir dan laut (satuan : %)

Indikator kinerja tersebut diatas merupakan indikator kinerja yang dapat digunakan sebagai bahan acuan evaluasi dari rencana program telah dilaksanakan. Dengan indikator kinerja tersebut dapat diketahui tingkat keberhasilan suatu program. Untuk mengetahui target-target capaian sesuai indikator kinerja tersebut, berikut ini pada tabel 6.1 akan disajikan indikator kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah menurut program-program yang direncanakan beserta target capaiannya tiap tahunnya.

Tabel 6.1. Indikator Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Jawa Tengah

Tujuan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Th.2013	Target Capaian Sasaran										KONDISI AKHIR		
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun-2018				
				Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)
Meningkatkan kesejahteraan nelayan	Peningkatan pendapatan nelayan	Pendapatan nelayan meningkat sebesar 8,47%/th (Rp/Kap/th)	10.765.779,48	11.566.477,04	8.228.000	12.546.157,65	13.368.308	13.608.817,20	15.464.851	11.718.192,54	15.600.000	12.710.723,45	16.000.000	12.710.723,45	68.661.159	
Meningkatkan jumlah produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Peningkatan produksi perikanan tangkap	Peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 3,44%/th (Ton)	243.694,50	296.663,00	5.074.000	306.868,21	9.009.781	317.424,48	6.016.113	283.714,75	4.250.000	293.474,54	5.250.000	293.474,54	29.599.894	
Meningkatkan kesejahteraan pembudidaya ikan	Peningkatan Pendapatan pembudidaya ikan	Pendapatan pembudidaya ikan meningkat sebesar 5,87 %/th (Rp/Kap/Th)	23.160.988,43	16.339.722,52		17.298.864,23		18.314.307,57		32.587.070,28		35.845.777,31		509.436,29		509.436,29
Meningkatkan jumlah produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya	Peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 7,59%/th (ton)	315.458,67	288.084,05		309.949,63		333.474,81		463.123,90		509.436,29		509.436,29		
Meningkatkan ketersediaan protein hewani yang berasal dari sumberdaya ikan	Peningkatan konsumsi makan ikan di Jawa Tengah)	Tingkat Konsumsi Ikan meningkat sebesar 4,86 %/Th (Kg/kap/th)	17,82	18,69	2.082.000	19,59	2.602.130	20,55	3.384.300	21,55	1.850.000	22,59	2.000.000	22,59	11.918.430	
Meningkatkan jumlah dan ragam produk olahan yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan serta ekspor produk perikanan	Peningkatan volume ekspor (sat: ton) dan nilai ekspor produk hasil perikanan (sat : US\$)	Peningkatan volume ekspor produk hasil perikanan sbst 2,7%/th (ton)	22.898,18	25.093,46		25.770,99		26.466,80		27.181,41		27.915,31		27.915,31		
Meningkatkan kesejahteraan petani garam,	Peningkatan Produksi Garam	Peningkatan Produksi Garam meningkat	0	0	700.000	0	677.387	0	3.819.300	694.575	900.000	729.304	1.000.000	729.304	7.096.687	

Tujuan	Indikator Sasaran	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Kondisi Awal Th.2013	Target Capaian Sasaran										KONDISI AKHIR	
				Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun-2018			
				Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)	Target (Vol & satuan)	Rp. (000)
taruna pesisir dan wanita pesisir		sebesar 5 %/th (Ton)													
	Peningkatan Pendapatan taruna pesisir	Pendapatan taruna pesisir meningkat sebesar 4,06%/th (Rp/Kap/Th)	4.133.005,79	4.300.805,83		4.475.418,54		4.657.120,53		9.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
	Peningkatan Pendapatan wanita pesisir	Pendapatan wanita pesisir meningkat sebesar 3,9 %/th (Rp/Kap/Th)	2.742.951,61	2.849.926,73		2.961.073,87		3.076.555,75		6.800.000,00		7.600.000,00		7.600.000,00	
Meningkatkan peran masya rakat penga was dalam kegiatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	Pembinaan masyarakat pengawas dlm kegia tan penga wasan sum berdaya kelautan & perikanan	Jumlah kelompok masyarakat swakarsa pengamanan sumberdaya kelautan yang aktif (Klp/th)	10	20	11.466.100	20	10.327.774	20	10.995.000	20	9.150.000	20	10.500.000	100	52.438.874
Menjaga kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan	Pelestarian sumberdaya kelautan & perikanan melalui : reservat di perairan umum, penebaran benih di laut dan perairan umum	Peningkatan Luas Mangrove di Kawasan Perikanan (Ha)	8,08	7,50	2.082.000	8,13	2.602.130	8,25	3.384.300	8,38	1.850.000	8,50	2.000.000	40,75	11.918.430
		Peningkatan Luas Terumbu Karang Buatan di Kawasan Perikanan (Ha)	17,28	4,68				5,13				5,58			



BAB VII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 mencakup Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan setiap tahun anggaran pada kurun waktu lima tahun (tahun 2013 - 2018). Sasaran dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) disajikan bersama indikator kinerjanya, sedangkan program disajikan sebagai strategi yang relevan dengan sasaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya kegiatan disajikan dengan mengacu pada program yang relevan, sehingga kegiatan yang dirumuskan setiap tahun yang dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan rangkaian yang sistematis dari program yang akan dilaksanakan.

Rencana kerja pembangunan kelautan dan perikanan yang tertuang dalam renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah ini telah mengalami revisi sesuai perkembangan dinamika politik, sosial, budaya dan isu-isu permasalahan terkini, dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, implementasi penguatan peran para *stakeholders* dalam pelaksanaan Rencana Kerja, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan 5 (lima) tahunan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 – 2018 ini juga dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi seluruh aparat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah, baik di jajaran struktural maupun fungsional dalam melaksanakan kualitas pelayanan dasar dan tugas sehari-hari, baik program, proyek dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan sasaran pembangunan perikanan serta tujuan dan sasaran pembangunan daerah, khususnya peningkatan kualitas pengelolaan Sumber Daya Alam dan Daya Saing Ekonomi Rakyat serta mewujudkan keterpaduan pelaksanaan tata kelola pemerintahan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi, seimbang dan berkualitas sesuai dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.